



VOL 4 NO 4 JULI-AGUSTUS 2019  
LITBANG.KEMENDAGRI.GO.ID  
MAJALAH DWI BULANAN  
P-ISSN 2503 3352  
E-ISSN 2528 4181

IMAJI MEMBENAH STRUKTUR

PEMETAAN KOMODITAS UNGGULAN  
MENJADI PRIORITAS

# MEDIA BPP

J E N D E L A I N F O R M A S I K E L I T B A N G A N

***REFORMASI BIROKRASI  
BUKAN LAGI NARASI***





# CALL FOR PAPERS

## MATRA PEMBARUAN

Mengundang para peneliti, dosen, mahasiswa, dan masyarakat umum untuk mempublikasikan hasil-hasil riset mutakhir di Jurnal Matra Pembaruan Volume 2019, yang akan diterbitkan pada dua edisi yaitu Mei dan November.

Naskah merupakan karya Ilmiah orisinal yang belum pernah dipublikasikan dan tidak memuat unsur plagiat

Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris sebanyak 38.000 s.d 40.000 karakter (tanpa spasi) sudah termasuk referensi, daftar pustaka, dan tabel (jika ada). Naskah dalam Bahasa Indonesia disertai abstrak Bahasa Inggris, dan sebaliknya.

Karena berbasis OJS, maka naskah akan dipublikasikan setiap awal bulan terbit setelah melalui review dan editing.



Naskah yang dikirimkan berupa resume hasil penelitian, bagian dari skripsi, tesis, atau disertasi yang telah mengalami penyesuaian untuk standar jurnal ilmiah. Artikel mengandung unsur temuan baru, yang merespons isu-isu dan wacana kontemporer terkait inovasi kebijakan



Sumber referensi minimal 10 sumber yang berasal dari jurnal ilmiah yang bisa diakses melalui daring (*online*).



Sistematika penulisan terdiri dari empat pembabakan: Pendahuluan, Metode, Hasil dan Pembahasan, dan Kesimpulan. Sedangkan gaya gaya APA (*American Psychological Association*) Lampirkan alamat korespondensi dan penulisan referensi dan kutipan MP menggunakan nomor telepon penulis.

Google Scholar

MORAREF

neliti

GARUDA  
GARUDA BUJARAN DIGITAL

Crossref

Registrasi dan submit artikel anda di  
<http://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/mp>

Jl. Kramat Raya, No 132, Senen, Jakarta Pusat  
082111393927 (Whatsapp Only)  
[matrapembaruan@gmail.com](mailto:matrapembaruan@gmail.com)

Reformasi birokrasi merupakan upaya pemerintah melakukan pembenahan berupa pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pembenahan itu terutama menyangkut aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*), dan sumber daya manusia aparatur negara. Berbagai sandungan yang membuat sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan optimal, harus ditata ulang atau diperbarui.

Sebagai bagian dari struktur pemerintahan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (BPP Kemendagri) dituntut menerapkan reformasi birokrasi dalam menjalankan tugas fungsinya. Salah satu ikhtiar BPP Kemendagri dalam menerapkan reformasi birokrasi adalah dengan mengaplikasikan pelayanan berbasis elektronik. Layanan itu baik diperuntukan bagi internal BPP Kemendagri, maupun yang berhubungan dengan pihak luar.

Namun sayangnya, berbagai layanan aplikasi yang dirancang BPP Kemendagri belum berjalan maksimal. Sebagian besar layanan aplikasi itu baru sekadar konsep. Bahkan, aplikasi yang secara desain siap digunakan nyatanya belum banyak digunakan. Berbagai pihak berpendapat kendala utama dalam menerapkan aplikasi ini adalah belum terbangunnya pola pikir perangkat

kerja terkait pentingnya melakukan perubahan skema layanan berbasis teknologi. Oleh karenanya, komitmen bersama dibutuhkan untuk mendukung penerapan layanan berbasis aplikasi sebagai bagian dari reformasi birokrasi.

Pada edisi Agustus 2019 ini, *Media BPP* berusaha mengulas reformasi birokrasi yang telah dilakukan BPP Kemendagri. Tidak hanya menyoal penerapan layanan berbasis elektronik, tetapi juga aspek lainnya yang penting diperhatikan dalam menjalankan reformasi birokrasi. Selain membahas reformasi birokrasi, informasi menarik lainnya juga tersaji dalam aneka rubrik. Mulai dari aktivitas BPP Kemendagri, yang dikemas melalui rubrik *Jendela BPP*. Ada pula rubrik yang mengabarkan

aktivitas dan tempat wisata menarik di beberapa daerah. Selain itu, dalam rubrik *Lebih Dekat* ada sosok Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, yang berkisah banyak mengenai persoalan ekonomi di Indonesia dan bagaimana mengatasinya.

Berbagai informasi yang dihadirkan merupakan komitmen *Media BPP* untuk membangun pemahaman sekaligus kesadaran ihwal pentingnya peran kelitbangan ke ruang publik. Dengan harapan, berbagai wacana tersebut dapat menjadi diskursus bagi kemajuan Indonesia yang lebih gemilang.



Redaksi...

## MEDIA BPP

PELINDUNG MENTERI DALAM NEGERI TAJHO KUMOLO  
PENANGGUNG JAWAB DODI RIYADMADJI

PEMIMPIN REDAKSI	LITA DEWI WULANTIKA
REDAKTUR PELAKSANA	MOH. ILHAM A. HAMUDY
REDAKTUR	ANSELMUS TAN KURNIASIH SYABNIKMAT NIZAM HORAS MAURITZ PANJAITAN SAFRIZAL LITA DEWI WULANTIKA MOH. ILHAM A. HAMUDY
PENYUNTING	FRISCA NATALIA
PELIPUTAN	MUJAENI SAIDI RIFKY
PENATA LETAK DAN GRAFIS DESAIN COVER	SAIDI RIFKY RIFKY/TERINSPIRASI DARI HDQWALLS.COM

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

ALAMAT REDAKSI  
JALAN KRAMAT RAYA NO. 132, JAKARTA PUSAT  
[REDAKSIMEDIABPP@GMAIL.COM](mailto:REDAKSIMEDIABPP@GMAIL.COM)

### Keterbukaan Informasi

Salah satu kendala yang dihadapi para peneliti adalah minimnya data-data pemerintah daerah yang sudah semestinya dikonsumsi publik. Data-data tersebut biasanya sulit didapatkan, bahkan kadang kala pemda terkesan menutupinya padahal, hanya Renstra dan LAKIP. Bagaimana peran Kemendagri terhadap hal ini?

- Pembaca Media BPP-

Kemendagri menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik di era reformasi bagi Pemerintah Daerah. Pasalnya, keterbukaan informasi merupakan salah satu wujud hadirnya negara yang mampu memberikan pelayanan masyarakat secara maksimal. Pemerintah di Era Reformasi tidak memiliki celah untuk menyembunyikan suatu informasi yang ingin diketahui oleh masyarakat, kecuali informasi-informasi yang memang dikecualikan yang bersifat rahasia dan tidak dapat diakses oleh publik sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Di sinilah pentingnya unit Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pemerintah Daerah. Namun sayangnya, hingga saat ini masih ada 26 Pemerintah Kabupaten dan Kota yang masih belum membentuk PPID. Untuk itu, Kemendagri akan terus mengawal Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pemerintah Daerah. Terdapat 26 kabupaten/kota masih ada yang belum punya unit kerja yang melayani pengaduan, maka disinilah pentingnya harus ada unit pengaduan supaya lalu lintas informasi dan pengaduan informasi dijawab sampai ditindaklanjuti.

Redaksi

### Dampak Kekeringan

Musim kemarau kali ini diperkirakan akan sangat lama. Hal itu tentu akan berakibat pada masyarakat di daerah yang terdampak. Beberapa di antaranya seperti kekeringan dan kesulitan air bersih. Saya berharap Kemendagri bisa secepatnya bergerak untuk mengantisipasi hal itu. Misalnya dengan memberi ketegasan kepada pemerintah di daerah.

- Pembaca Media BPP-

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo telah meminta seluruh kepala daerah mengantisipasi dampak Kekeringan. Hal itu dituangkan dalam surat bernomor 365/7309/SJ tertanggal 1 Agustus 2019. Hal-hal yang harus diperhatikan para kepala daerah adalah sebagai berikut: Pertama, Gubernur mengambil langkah jangka pendek, menengah dan panjang untuk menjaga pasokan air bagi masyarakat sebagai antisipasi resiko dampak kekeringan di Daerah. Kedua, Gubernur mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) akibat dampak kekeringan dengan cara meningkatkan koordinasi dengan TNI dan Polisi di wilayahnya, mengingat sebagian besar penyebab karhutla adalah disengaja atau ulah oknum masyarakat; Mempunyai pos anggaran rutin untuk mengantisipasi karhutla dalam APBD Provinsi yang ditampung dalam RKPD dan RPJMD. Ketiga, berdasarkan Pasal 91 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, Presiden dibantu oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Selanjutnya Gubernur melaporkan pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagai Wakil Pemerintah Pusat kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Gubernur juga diwajibkan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada kabupaten/kota di wilayahnya terhadap antisipasi dampak kekeringan serta melaporkan hasilnya kepada Menteri Dalam Negeri dengan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan.

Redaksi

Opini dan Cerpen dapat dikirim melalui email redaksimediabpp@gmail.com atau melalui whatsapp di 085813258250

## MEDIA BPP

VOLUME 4 NO 4 | JULI-AGUSTUS 2019

BPP DAERAH **34**  
**BAPPEDA LITBANG KABUPATEN GARUT**

PEMETAAN KOMODITAS  
UNGGULAN MENJADI PRIORITAS



DAERAH **37**  
**DARI PETIK JERUK**  
**HINGGA MINUM KOPI**

LEBIH DEKAT **40**  
**MOHAMMAD FAISAL,**  
Direktur Eksekutif Center of  
Reform on Economics (CORE) Indonesia

**MEMETAKAN PERSOALAN**  
**EKONOMI DI INDONESIA**

JENDELA BPP **6**

AKTIVITAS **12**

GAYA HIDUP **42**

SAINS DAN  
TEKNOLOGI **43**

RESENSI BUKU **44**

RESENSI FILM **46**

SASTRA **48**

KOMIK **53**

KILAS BERITA **39**

OPINI  
PENTINGNYA PUBLIC FINANCIAL  
MANAGEMENT **54**

KEBIJAKAN PERTUMBUHAN HIJAU  
INDONESIA **56**

CATATAN **58**

### LAPORAN UTAMA 12-26

## REFORMASI BIROKRASI BUKAN LAGI NARASI

REFORMASI BIROKRASI MERUPAKAN UPAYA PEMERINTAH MELAKUKAN PEMBENAHAN BERUPA PEMBARUAN DAN PERUBAHAN MENDASAR TERHADAP SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN. PEMBENAHAN ITU TERUTAMA MENYANGKUT ASPEK KELEMBAGAAN (ORGANISASI), KETATALAKSANAAN (BUSINESS PROCESS), DAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR NEGARA. BERBAGAI SANDUNGAN YANG MEMBUAT SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN TIDAK BERJALAN OPTIMAL, HARUS DITATA ULANG ATAU DIPERBARUI.



# GIAT MEREPLIKASI INOVASI DI DAERAH TERTINGGAL

**P**usat Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah (Puslitbang Inovda), Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (BPP Kemendagri), terus giat mereplikasi inovasi di berbagai daerah. Tahun ini Puslitbang Inovda menargetkan empat daerah tertinggal untuk menjadi tempat replikasi layanan inovasi berbasis aplikasi. Keempat daerah itu yakni, Kabupaten Seluma, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Bangkalan, dan Kabupaten Lombok Barat. Daerah tersebut masuk dalam daftar 122 kabupaten tertinggal yang diatur dalam Peraturan Presiden No 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015–2019.

Penetapan empat kabupaten itu berdasarkan prioritas nasional Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai daerah percontohan penerapan replikasi inovasi. Selain daerah itu, menurut data yang diterima *Media BPP* sejak 2018-per Juni 2019 ada 84 daerah lain yang telah dan bakal menerapkan aplikasi inovasi.

Beberapa aplikasi yang dapat direplikasi yakni layanan perizinan, kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, ketenagakerjaan, komoditi, dan aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Semua aplikasi terangkum dalam program Pusat Jejaring Inovasi Daerah (Puja Indah). Selain jenis layanan tadi, tahun ini Puslitbang Inovda juga tengah membangun enam aplikasi lain seperti untuk penanggulangan bencana, Sikerja, musyawarah rencana pembangunan desa dan kabupaten, pa-



jak bumi dan bangunan, pariwisata, serta *data base* kemiskinan.

**Kepala Bidang Pengembangan Inovda Saydiman Marto** menyebutkan, pemanfaatan aplikasi itu tergantung pada kebutuhan dan kesiapan masing-masing daerah. Kendati berbagai aplikasi itu lahir atas kajian kebutuhan daerah. Di sisi lain, setiap daerah yang hendak mereplikasi aplikasi tersebut, tidak banyak dibebankan karena *server* terpusat di bawah pengelolaan Puslitbang Inovda. Daerah yang bersedia mereplikasi hanya disyaratkan memiliki perangkat komputer, jaringan internet, serta operator aplikasi. “Daerah yang memiliki keterbatasan SDM (sumber daya manusia) dan sarana, mereka bisa memilih mana yang paling diprioritaskan dari 13 aplikasi itu, atau tujuh, karena enam aplikasi masih dalam tahap pembangunan,” katanya, Kamis (18/7).

Berdasarkan pengalaman kebutuhan di daerah, Saydiman menyarankan agar lokasi penerapan aplikasi memilih paling sedikit empat layanan. Layanan itu meliputi kesehatan, pendidikan, perizinan, dan ketenagakerjaan. Dengan empat layanan ini diharapkan dapat menopang pertumbuhan daerah yang bersangkutan. Saydiman mencontohkan, di bidang ketenagakerjaan misalnya. Lewat aplikasi ini, pencari kerja dan pihak penerima kerja dapat terhubung dalam satu sistem aplikasi. Dengan demikian, proses penyerapan tenaga kerja lebih maksimal,

sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, bidang perizinan juga menjadi bagian yang diprioritaskan. Sebab, layanan ini memengaruhi laju investasi di daerah. Lewat aplikasi ini, segala proses perizinan dapat diakomodasi, termasuk menekan angka praktik pungutan liar, karena prosesnya diatur sistem. “Walaupun sebenarnya tidak ada paksaan menggunakan aplikasi mana, tetapi menurut pengalaman saya beberapa kali ke daerah yang paling dibutuhkan itu,” katanya.

Kepala Subbidang Potensi Inovasi Daerah, Danang Binuko menambahkan, selain gratis layanan aplikasi inovasi Puslitbang Inovda bersifat *open source*, sehingga dapat disesuaikan dengan karakter masing-masing daerah. Selain itu, jika daerah menemui kendala sistem, proses perbaikan dapat dilakukan jarak jauh tanpa perlu mendatangi lokasi terkait. “Jadi menyelesaikan *trouble* itu di Jakarta langsung secara *online*,” katanya.

Dia menyebutkan, sebelum diterapkan terlebih dulu diadakan bimbingan teknis (Bimtek) ihwal penggunaan aplikasi ke masing-masing daerah. Bimtek tidak hanya mengundang daerah, tetapi juga mendatangi langsung daerah terkait. Setelah dilakukan bimbingan, selanjutnya dilakukan tahap instalasi aplikasi agar dapat dioperasikan. “Pada saat Bim-

tek, kita sudah arahkan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk mengisi *data base* nya dulu, misalnya Dinas Kesehatan harus mengisi data dokter, jenis pelayanan, jumlah puskesmas, dan lainnya,” katanya.

Meski aplikasi sudah beroperasi, Puslitbang Inovda tetap melakukan pendampingan ke masing-masing daerah. Prog-

ram pendampingan itu misalnya berupa perbaikan jika ditemui kesalahan sistem, pembaruan aplikasi, ataupun lainnya.

Danang berharap, pemerintah daerah dapat terus melakukan pembaruan dalam tata kelola pemerintahan, termasuk pelayanan publik ke arah yang lebih baik. Terlebih saat ini Puslitbang Inovda memiliki program replikasi inovasi

ke daerah. “Pembaruan itu menyangkut perubahan paradigma, kalau dulunya lambat sekarang lebih cepat, kalau dulunya susah sekarang lebih mudah. Kalau dulunya harus identik dengan biaya tinggi, namun sekarang bagaimana menggunakan biaya minimal tetapi menghasilkan *output* yang maksimal,” katanya.

■ MUJAENI

## E-GOVERNMENT MODAL UTAMA MENUJU KOTA CERDAS

**K**emajuan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat membawa dampak perubahan pada setiap lini kehidupan manusia. Berbagai kemajuan itu dimanfaatkan banyak pihak untuk mempermudah beragam urusan. Perubahan ini juga dimanfaatkan oleh instansi pemerintahan. Tidak sedikit instansi pemerintahan, termasuk di tingkat daerah menerapkan layanan berbasis elektronik (*e-government*). Dengan langkah ini pemerintah daerah berlomba-lomba menerapkan konsep kota cerdas (*smart city*).

Guna melihat dinamika penggunaan layanan *e-government* dalam menuju kota cerdas, Pusat Penelitian dan Pengembangan Otonomi Daerah Politik dan Pemerintahan Umum (Puslitbang Otda Pol-PUM) BPP Kemendagri mengkaji penerapannya di beberapa daerah. Lokus kajian itu di antaranya, Kabupaten Banyuwangi, Kota Semarang, dan Kota Tangerang Selatan. Ketiganya dipilih karena berkomitmen untuk menerapkan kota cerdas. Komitmen itu berupa kebijakan, regulasi, dan mengantongi induk perencanaan kota cerdas.

Ketua Tim Kajian Imam Radianto Anwar Setia Putra menjelaskan, menurut teori, *smart city* memuat enam dimensi, yaitu *smart governance*, *smart people*, *smart mobility*, *smart economy*, *smart building*, dan *smart environment*. Keenamnya menjadi patokan induk perencanaan kota cerdas di tiga daerah tersebut. Selain dimensi itu, lanjut Imam, ada beberapa variasi yang diterapkan daerah kajian. Seperti, Kabupaten Banyuwangi dan Kota Semarang yang memasukkan *smart branding* sebagai bentuk modifikasi dimensi yang didasarkan pada kebutuhan daerah. “Ini jenis layanan kepada wisatawan yang berkunjung ke daerah tersebut,” kata Imam, Selasa (23/7)

Tidak hanya itu, Kabupaten Banyuwangi juga mengubah istilah kota cerdas menjadi kampung cerdas (*smart kampung*). Mereka

beralasan nama itu lebih dekat dengan budaya dan sosial daerah sekitar. “Mereka tidak mau menghilangkan kata kampung, itu karena ingin mempertahankan *culture* mereka, yang sudah hidup di dalam masyarakatnya,” tambahnya.

Saat berada di lokasi kajian, Imam mendapati berbagai infrastruktur telah dibangun dalam menunjang layanan berbasis elektronik. Misalnya membangun zona akses jaringan internet yang dapat digunakan masyarakat umum. Penempatannya dari mulai gedung layanan pemerintahan, sampai dengan ruang terbuka. Dengan layanan itu masyarakat dapat mudah menjelajahi layanan yang tersedia. “Di Banyuwangi jumlahnya hampir seribu, di Kota Semarang juga begitu, di Kota Tangerang Selatan juga ada titik *hotspot* tertentu,” terangnya.

Infrastruktur lainnya berupa layanan berbasis aplikasi. Di daerah, kehadiran layanan berbasis aplikasi ini didukung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Mereka berperan sebagai penjamin pembangunan aplikasi berdasarkan kebutuhan pemerintah daerah. Dinas Kominfo, kata Imam, menyusun kriteria penerapan aplikasi di daerah yang ditunjukkan bagi pihak yang membangun aplikasi. Kriteria tersebut di antaranya, *open source*, bersedia memberikan bahan baku perangkat aplikasi, berkoordinasi dengan perangkat daerah, dan memberikan transfer pengetahuan. “Keempat itu syarat dalam upaya membangun aplikasi berbasis *web*,” katanya.

Imam bercerita mengenai terobosan layanan yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Dalam memudahkan pelayanan kepada masyarakat, Kabupaten Banyuwangi telah membangun sistem pelayanan mandiri dalam mengurus dokumen/perizinan. Kata Imam, pelayanan itu dapat diakses dengan memanfaatkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang dimiliki masyarakat. Cara penggunaannya, masyarakat mendatangi mesin layanan yang ditempatkan di Mal Pelayanan Publik. Untuk memasuki sistem, masyarakat perlu menempel-



kan e-KTP atau *login* pada mesin tersebut. Setelah itu, pemilik akun dapat memilih layanan yang diinginkan dan mengisi data administrasi secara daring.

Imam mencontohkan, pelayanan yang diakomodasi pada sistem itu adalah perizinan pendirian usaha. Calon usahawan tidak perlu mencantumkan bukti usahanya. Dia hanya cukup mengisi data-data dasar mengenai usaha yang bakal dijalankan. Tidak berselang lama, surat izin dapat diperoleh pihak yang mengajukan melalui mesin tersebut. “Kabupaten Banyuwangi memberikan izin dulu, walaupun belum ada buktinya, dengan dikemudian hari pengusaha ini memenuhi kriteria tertentu yang sudah ditetapkan,” kata imam.

Di Mal Pelayanan Publik juga melayani berbagai urusan lainnya, seperti pembuatan paspor, izin menikah, dan lainnya. Bahkan menurut Imam, Mal Pelayanan Publik juga melayani proses pernikahan langsung di tempat, dengan berbagai fasilitas termasuk penghulu yang akan memandu pernikahan kedua mempelai. “Kalau saya tarik, itu masuk ke mekanisme perizinan yang lebih sederhana dan simpel,” katanya.

### Tantangan selanjutnya

Namun beberapa aplikasi di daerah belum sepenuhnya dapat diakses dalam satu sistem. Padahal menurut Imam, kota cerdas butuh interoperabilitas, yakni pengintegrasian antaraplikasi dalam satu portal. Pengintegrasian yang dimaksud Imam, yaitu pengguna cukup melakukan sekali *login*, tetapi bisa mengakses semua jenis layanan aplikasi. “Sayangnya di daerah ini belum, jadi setiap kita *login* hanya untuk satu, dua, atau sekumpulan layanan saja,” katanya. Kondisi ini perlu diperbaiki karena semua aplikasi harus terkoneksi secara digital.

Di sisi lain, berbagai kehadiran infrastruktur layanan berbasis elektronik tidak akan berjalan maksimal jika tidak diimbangi dengan kemampuan mengoperasikannya. Sebagai pelayan masyarakat, kata Imam, perangkat kerja daerah mesti memahami layanan teknologi yang bersangkutan. Hal ini untuk mempermudah memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai fasilitas layanan yang ada. Oleh karenanya, kualifikasi pengetahuan perangkat kerja menjadi jaminan keberhasilan bagi sebuah pelayanan. Namun, di lapangan masih ditemui perangkat kerja yang belum memahami layanan berbasis aplikasi secara maksimal. “Aparatur dengan kualifikasi usia, memilki tingkat pemahaman yang berbeda-beda dalam menguasai teknologi informasi tersebut,” katanya.

Tidak hanya perangkat kerja pemerintahan daerah, pemahaman layanan elektronik juga mestinya dimiliki masyarakat. Imam menekankan, layanan berbasis elektronik tidak dapat berjalan maksimal meski pemerintah telah membangun infrastruktur secara baik. Serupa dengan aparatur pemerintah daerah, warga juga memiliki kategori pemahaman berdasarkan usia. “Kinerja pelayanan publik juga sangat bergantung kepada masyarakat, kalau masyarakat tidak dikenalkan dengan layanan berbasis IT (teknologi informasi) akan menjadi sulit,” katanya.

Imam mengaku, untuk memahamkan penggunaan layanan, pemerintah daerah telah melakukan berbagai strategi di tingkat internal maupun eksternal. Strategi itu berupa forum pertemuan, atau memasang iklan agar diketahui khalayak.

### Peran Kemendagri

Imam menyebutkan, Kemendagri perlu mendesain model perangkat daerah digital (*digital institution*). Desain itu, lanjut Imam, dapat dilihat dari jenis urusannya, alur penyelesaiannya, dan programnya apa saja. Jika sudah terbangun daerah digital, pelayanan tidak lagi dilakukan secara tatap muka. Selain itu, Imam mencontohkan, kebijakan pemberdayaan masyarakat dan penanganan masyarakat miskin. Melalui data elektronik yang terhimpun, pemerintah dapat mengkategorikan masyarakat miskin, masyarakat usia tidak produktif, dan usia produktif. Dengan demikian, perlakuan kebijakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kategori tersebut. “Kita harus tahu di mana posisi dia, alamatnya dia, apa yang dia butuhkan,” katanya.

Selain itu, kata Imam, Kemendagri juga perlu membangun *big data* di masing-masing pemerintah daerah. Data tersebut berisi kondisi penduduk yang bersifat aktual dan *real time*. Dengan infrastruktur itu, nantinya dapat mempermudah pemerintah dalam meringkas waktu proses penentuan kebijakan. Di samping itu, transformasi administratif juga perlu dilakukan. Selanjutnya, pemberdayaan masyarakat dalam membudayakan penggunaan layanan berbasis elektronik menjadi tantangan yang perlu dihadapi. “Dengan terciptanya *digital institution*, instansi pemerintahan tidak lagi membutuhkan tenaga kerja terlalu banyak. Program yang dipilih juga dapat menysasar kebutuhan masyarakat,” katanya.

Kepala Bidang Otonomi Daerah, Achmad Jani Rivai Yusuf berharap, hasil kajian ini dapat benar-benar digunakan oleh komponen Kemendagri, terutama dalam menentukan kebijakan kota cerdas. Paling tidak, lanjut Jani, rujukan ini menjadi salah satu acuan di antara landasan lainnya dalam mendorong terwujudnya kota cerdas. “Kami sangat mengharapkan betul kebijakan dari hasil penelitian yang dilakukan bisa dipakai Kemendagri,” katanya.

■ MUJAEANI



**BEBERAPA APLIKASI DI DAERAH BELUM SEPENUHNYA DAPAT DIAKSES DALAM SATU SISTEM. PADAHAL KOTA CERDAS BUTUH INTEROPERABILITAS, YAKNI PENGINTEGRASIAN ANTARAPLIKASI DALAM SATU PORTAL.**

## Mengkaji Regulasi Penyusunan RPJMD



Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), berperan penting dalam memandu jalannya pembangunan di daerah. Dokumen ini menjadi acuan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya. Selain itu, dokumen lima tahunan tersebut merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Di samping, RPJMD juga erat kaitannya dengan wadah penguangan janji politik kepala daerah terpilih.

Sebagai upaya membantu daerah menyusun RPJMD, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerbitkan Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Regulasi itu merupakan perubahan atas Permendagri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Meski sebagai aturan pembaruan, tidak sedikit daerah yang masih kesulitan menyusun RPJMD sesuai dengan ketentuan Permendagri No 86 Tahun 2017 itu. Hal ini ditandai dengan tidak sedikitnya daerah yang terlambat menetapkan RPJMD. Dokumen tersebut pa-

ling lama enam bulan setelah pelantikan kepala daerah, sudah harus ditetapkan dengan peraturan daerah. Keterlambatan itu menuai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama tiga bulan. Kondisi ini juga berdampak pada keseluruhan proses teknis pembangunan daerah. Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah tahunan, seperti RKPD dan Anggaran Penerimaan Belanja Daerah (APBD) menjadi kurang terarah.

Guna mengetahui kendala sekaligus menemukan formulasi perbaikan yang tepat, Pusat Penelitian dan Pengembangan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Puslitbang Pembangunan dan Keuda) BPP Kemendagri, mengkaji penerapan

Permendagri No 86 Tahun 2017 di beberapa daerah. Ada enam lokus yang menjadi lingkup kajian ini, di antaranya Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara, Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten. Lokasi itu dipilih karena merupakan bagian dari daerah yang menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017. Permendagri No 86 Tahun 2017 dengan Pilkada Serentak 2017 memiliki keterkaitan karena rentang waktu penetapan dan pelaksanaannya tidak terlalu lama.

**Kepala Bidang Urusan Pemerintah dan Pembangunan Daerah, Fredrick Simatupang**, menuturkan berlangsungnya Pilkada Serentak 2017 dengan diundangkannya Permendagri No 86 Tahun 2017, membuat rentang waktu penetapan kepala daerah terpilih dan pengesahan RPJMD tidak berlangsung lama. Kondisi ini, lanjut Fredrick, mengharuskan daerah bekerja keras memahami dan mempedomani Permendagri No 86 Tahun 2017, mengadopsi visi misi kepala daerah, dan menyelarasikannya dengan visi misi kepala negara sebagai bagian dari landasan penyusunan RPJMD. “Kenyataannya OPD (Organisasi Perangkat Daerah) khususnya Bappeda (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) dalam rangka memformulasikan masalah itu membutuhkan waktu yang cukup, sumber daya yang cukup termasuk manusianya, itu menjadi tantangan tersendiri,” kata Fredrick, Kamis (11/7).

Tantangan lainnya, masa transisi antara kepala daerah sebelumnya dengan kepala daerah terpilih juga membutuhkan penyesuaian. Selain itu, tidak mudahnya

membangun hubungan emosional antara kepala daerah terpilih dengan anggota legislatif sebagai pihak yang mengesahkan aturan turut menjadi sandungan. Kondisi demikian, sedikit banyak memengaruhi waktu penetapan naskah tersebut. “RPJMD sebagai instrumen pelaksanaan pembangunan di daerah, berpotensi terlambat, atau adanya ketidaktepatan sasaran,” katanya.

Kepala Subbidang Urusan Pemerintahan Non Mendasar, **Endang Kurniati**, mengatakan berdasarkan temuan di Jawa Barat, mayoritas kabupaten/kota di provinsi itu sudah menerapkan Permendagri No 86 Tahun 2017 sebagai dasar penyusunan RPJMD. Namun, salah satu persoalan yang dihadapi adalah pemaknaan waktu penetapan dokumen tersebut. Dalam regulasi itu tertuang aturan waktu penetapan RPJMD enam bulan pasca pelantikan kepala daerah. Hampir seluruh kabupaten/kota memiliki pandangan beragam mengenai ketentuan ini. Akibatnya, banyak daerah yang merasa tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan.

Selain itu, masalah lainnya Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD yang digelar Bappeda juga tidak berjalan maksimal. Kegiatan yang berlangsung beberapa sesi ini, pada kenyataannya tidak diikuti peserta secara penuh. Selama pelaksanaan peserta Musrenbang berangsur-angsur meninggalkan forum. Akibatnya, hasil perumusan forum itu juga tidak maksimal. Di lain

sisi, banyak kepala daerah mengikuti forum hanya berupa seremonial.

Persoalan lainnya, yaitu beragamnya alat ukur penilaian kinerja aparatur sipil negara (ASN) di daerah yang digunakan kementerian. Endang menyebutkan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) dan Kemendagri misalnya. Keduanya memiliki penilaian kinerja beragam, sehingga kondisi ini cukup membingungkan perangkat daerah. Oleh karenanya, kata Endang, perlunya penyatuan pandangan mengenai penggunaan alat penilaian kinerja. “Kita harus melakukan sinkronisasi dalam pembangunan, terkait apa pun itu,” tuturnya.

Fredrick menjelaskan, secara umum irisan permasalahan yang dihadapi daerah kajian adalah persoalan alokasi waktu penyusunan RPJMD yang singkat. Sebab, untuk menyusun naskah RPJMD dibutuhkan beberapa tahapan yang tidak sebentar. Di sisi lain, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) juga terbatas.

Fredrick berharap, kajian ini dapat memberikan rekomendasi sebagai salah satu referensi kepada Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dalam mencermati kembali amanat Permendagri No 86 Tahun 2017. “Peran ini harus diambil BPP sebagai komponen integratif di lingkup Kemendagri, dalam rangka memberikan kontribusi konstruktif, aktual, dan akademik sebagai penguatan fungsi dan tugas Kemendagri sebagai poros penyelenggaraan pemerintahan. Bentuk penguatan tersebut salah satunya, saat ini antara lain berkenaan dengan kontribusi konkret BPP Kemendagri terhadap penyempurnaan Permendagri No 86 Tahun 2017,” pungkask Fredrick.

■ MUJAENI

## Saatnya Pemerintah Desa Peningkatkan Perempuan dan Penyandang Disabilitas



**D**iskriminasi dan kekerasan masih menjadi persoalan serius di masyarakat. Di beberapa daerah, kelompok seperti perempuan dan penyandang disabilitas kerap menjadi korban dari praktik ini. Mereka sering dipandang sebelah mata, bahkan, akses untuk bersosialisasi dan memperoleh pekerjaan pun dibatasi. Padahal, baik perempuan maupun penyandang disabilitas merupakan warga negara yang memiliki hak sama dengan masyarakat lain. Oleh karenanya, langkah kebijakan dalam rangka melindungi hak mereka perlu diterapkan, termasuk dalam lingkup pemerintahan desa.

Pentingnya perhatian terhadap perempuan dan penyandang disabilitas, menggerakkan Pusat Penelitian dan Pengembangan Administrasi Wilayah, Pemerintahan Desa dan Kependudukan (Puslitbang Adwil, Pemdes, dan Kependudukan), Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (BPP Kemendagri), mengkaji tingkat perhatian pemerintah desa terhadap kedua kelompok masyarakat tersebut.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Tri Rustiana Harahap, mengatakan kajian itu dilakukan di desa dengan kualifikasi tertentu. Guna memberikan gambaran luas, pemilihan lokus kajian berdasarkan tingkat kepedulian, antara yang tinggi dengan yang masih rendah. Kedua karakter itu untuk dijadikan pembanding antardesa. Adapun lokasi daerah yang dipilih, meliputi tiga provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Masing-masing provinsi bakal dipilih tiga atau dua desa yang menggambarkan kualifikasi yang telah ditentukan. “Dengan membandingkan dua karakter tersebut dapat dilihat kendala desa yang tingkat kepeduliannya belum baik. Apakah SDM (sumber daya manusia)-nya kurang, atau memang *nggak* peduli,” kata Rustiana.

Menurut Rustiana, desa dikatakan peduli, dapat dilihat dari tingkat keterlibatan perempuan dan penyandang disabilitas dalam kegiatan pemerintah desa. Ia mencontohkan, keterlibatan pada forum rapat desa misalnya. Selain menghadirkan peserta, kepedulian juga diukur dengan penyerapan aspirasi yang disam-

paikan perempuan dan penyandang disabilitas. Penyerapan aspirasi itu apakah diaplikasikan melalui kebijakan, misalnya dituangkan dalam peraturan desa.

Selain itu, dalam menekan angka kekerasan dan diskriminasi, dapat diukur dari upaya pemerintah desa untuk menanggulangnya. Misalnya, memberikan pemahaman kepada warga melalui kegiatan sosialisasi. “Jadi sosialisasi itu ke yang bersangkutan, keluarga, masyarakat, selain itu kaum bapak-bapak juga diundang, agar kejadian yang tidak diinginkan tidak terjadi atau terulang,” katanya, Kamis (18/7).

Bentuk kepedulian yang tidak kalah penting adalah infrastruktur yang menunjang kegiatan perempuan dan penyandang disabilitas. Misalnya bangunan gedung dan jalan yang ramah difabel, ruang menyusui, dan juga tempat pengaduan bagi perempuan yang mengalami kekerasan.

Rustiana mengatakan, salah satu tempat yang menjadi sampel kajian ini adalah Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Meski belum mengantongi peraturan desa secara khusus, namun Desa Lembang memiliki beberapa program pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas. Seperti pendidikan untuk anak difabel di bawah usia 17 tahun, pelatihan keterampilan, bahkan ada pula fasilitas terapi. Anggaran program pemberdayaan itu tidak hanya bersumber dari pemerintah provinsi, tetapi juga diambil dari kantong pemerintah desa. “Misalnya beberapa minggu sekali diadakan pelatihan, membuat kerajinan hiasan bunga, supaya mereka dapat mandiri,” katanya.

Peneliti BPP Kemendagri, Gunawan, menambahkan, fasilitas terapi bagi penyandang disabilitas di Desa Lembang, juga memiliki peran sebagai

“**RPJMD SEBAGAI INSTRUMEN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DAERAH, BERPOTENSI TERLAMBAT, ATAU TIDAK TEPAT SASARAN**”

ruang interaksi bagi anak difabel maupun orang tuanya. Dengan demikian, masyarakat yang memiliki anggota keluarga difabel tidak merasa canggung saat bergaul. “Mereka seperti membentuk komunitas untuk bergaul, ada ibu-ibu atau orang tua yang mempunyai anak penyandang disabilitas,” kata Gunawan.

Bagi pemberdayaan perempuan, Desa Lembang juga memiliki program simpan pinjam yang beranggotakan perempuan. Selain itu, ada pula wadah serupa tetapi ditujukan untuk perempuan yang sudah tidak bersuami. Di samping permodalan, Desa Lembang juga memiliki program pelati-

han keterampilan berupa merajut, berdagang, atau lainnya. Langkah itu, menurut Gunawan, sebagai upaya menjadikan perempuan lebih mandiri.

Terkait dengan ukuran kepedulian pemerintah desa, menurut Gunawan, selain melibatkan peserta perempuan dan difabel dalam serapan aspirasi, bentuk kepedulian juga dapat dilihat dari komposisi kepengurusan Badan Permusyawaratan Desa. Ia menyebutkan, dalam kepengurusan itu mestinya paling sedikit satu di antaranya adalah perempuan. Hal itu penting untuk mewakili aspirasi perempuan dalam menentukan kebijakan.

Hasil kajian yang dilakukan Puslitbang Adwil, Pemdes, dan Kependudukan ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi Kemendagri, pemerintah daerah, dan pihak terkait dalam upaya memperbaiki tingkat kepedulian terhadap perempuan dan penyandang disabilitas. Gunawan menyebutkan, kajian ini juga dapat memberikan masukan model desa dengan tingkat kepedulian terhadap perempuan dan penyandang disabilitas yang baik. “Kita punya model desa, kita tawarkan ke Ditjen Bina Pemerintahan Desa, dari situ mungkin mereka mengolah untuk dilanjutkan (menjadi kebijakan),” katanya.

■ MUJAENI

pejabat tinggi pratama, beserta seluruh ASN Kemendagri dan BNPP dengan mengenakan kostum bernuansa merah putih. Jumlah peserta apel diperkirakan mencapai 4000 orang.

Dalam sambutannya, Hadi berpesan kepada para pejabat yang hadir untuk mendukung program-program pemerintah yang menekankan pada peningkatan sumber daya manusia (SDM). Menurutnya, peningkatan itu sejalan dengan tema peringatan HUT RI ke-74, yaitu ‘SDM Unggul, Indonesia Maju’. “Tahun ini telah dicanangkan oleh Bapak Presiden untuk 2019-2024. Prioritas adalah peningkatan kualitas SDM untuk memacu diri dalam fenomena globalisme,” kata Hadi.

Hadi juga mengimbau, perangkat kerja Kemendagri agar meningkatkan inovasi dalam memberikan pelayanan publik. Dengan penerapan inovasi, lanjut Hadi, pelayanan akan berjejalan lebih cepat dan tepat sasaran. “Saya harapkan, komponen seluruh ASN berupaya untuk menuangkan ide gagasan dalam pengembangan inovasi-inovasi sesuai dengan tugas yang Saudara-saudara lakukan,” katanya.

Ia juga mengatakan, kegiatan tersebut dapat dijadikan momentum untuk lebih merekatkan kebersamaan dan rasa nasionalisme aparatur Kemendagri dan BNPP. “Ini harapan kita bersama dalam pelaksanaan HUT ke-74 RI. Kita senantiasa harus melakukan pemupukan diri, terutama jiwa patriotik kita, nasionalisme kita, dan eksistensi kita selaku aparatur sipil negara yang mempunyai fungsi dan tugas pelaksana pelayanan publik dan perekat persatuan dan kesatuan NKRI,” ujarnya.

Ketua Panitia yang juga Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga, Hari Nurcahya Murni mengatakan, selain tarik tambang dan balap kelereng eksekutif, HUT Kemerdekaan ke-74 juga dimeriahkan berbagai lomba lainnya. Lomba itu di antaranya, bola basket, futsal, tenis meja, lomba pidato, karya tulis, pemilihan karyawan teladan, dan kebersihan lingkungan di lingkup Kemendagri dan BNPP. Selain itu, pihaknya juga menggelar donor darah dan kegiatan sosial lainnya.

■ MUJAENI

## Peringati Hari Kemerdekaan, Kemendagri dan BNPP Sabet 2 Rekor Muri

JAKARTA- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) berhasil meraih dua penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI). Penghargaan itu di antaranya berasal dari lomba tarik tambang dan balap kelereng eksekutif. Sebanyak 100 tali disiapkan untuk mawadahi 1200 peserta tarik tambang dari Kemendagri dan BNPP. Sedangkan lomba balap kelereng eksekutif diikuti oleh pejabat tinggi madya dan pratama Kemendagri dan BNPP. Kegiatan tersebut dalam rangka memperingati hari jadi Republik Indonesia ke-74.

“Kita melihat belum ada yang memecahkan rekor MURI tarik tambang, termasuk balap kelereng eksekutif itu juga belum ada di MURI,” kata Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo, dalam acara peluncuran peringatan HUT RI ke-74 dan pemecahan dua rekor MURI, di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat (2/8).

Sudah tiga tahun terakhir ini Kemendagri menyabet rekor MURI di beberapa kategori. Sebelumnya, pada 2017 Kemendagri berhasil mencetak rekor MURI kategori jalan sehat dengan melibatkan peserta mengenakan topi merah putih terbanyak. Sedangkan pada 2018, Kemendagri juga berhasil



meraih penghargaan dari lembaga serupa dengan kategori lomba catur terbesar se-Indonesia.

Sebelum lomba dimulai, acara terlebih dulu diawali dengan apel yang dipimpin Hadi. Apel diikuti pejabat tinggi madya,



■ MUJAENI

LAPORAN UTAMA

# **REFORMASI BIROKRASI BUKAN LAGI NARASI**

*REFORMASI BIROKRASI MERUPAKAN UPAYA PEMERINTAH MELAKUKAN PEMBENAHAN BERUPA PEMBARUAN DAN PERUBAHAN MENDASAR TERHADAP SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN. PEMBENAHAN ITU TERUTAMA MENYANGKUT ASPEK KELEMBAGAAN (ORGANISASI), KETATALAKSANAAN (BUSINESS PROCESS), DAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR NEGARA. BERBAGAI SANDUNGAN YANG MEMBUAT SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN TIDAK BERJALAN OPTIMAL, HARUS DITATA ULANG ATAU DIPERBARUI.*



**R**eformasi birokrasi merupakan upaya pemerintahan melakukan pembenahan berupa pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pembenahan itu terutama menyangkut aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*), dan sumber daya manusia aparatur negara. Berbagai sandungan yang membuat sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan optimal, harus ditata ulang atau diperbarui.

Selain itu, reformasi birokrasi juga mendorong tata kelola pemerintahan yang baik

(*good governance*).

Langkah ini sebagai upaya strategis membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dalam mengemban tugas pemerintahan serta menunjang pembangunan nasional. Di sisi lain, dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi, serta perubahan lingkungan strategis, mengharuskan reformasi birokrasi pemerintahan agar disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat.

Reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mulai dicanangkan sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi. Regulasi itu direspons melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri No 061-5259 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri No 061-5923 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kemendagri 2015-2019, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 061.05-57 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2018, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Masing-masing Satuan Kerja di Lingkungan Ke-

mendagri.

Sebagai bagian dari struktur pemerintahan, Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri dituntut menerapkan reformasi birokrasi dalam menjalankan tugas fungsinya. Ada delapan area perubahan yang terangkum dalam reformasi birokrasi, di antaranya manajemen perubahan, penguatan sistem pengawasan, penguatan akuntabilitas, penguatan kelembagaan, penguatan tata laksana, penguatan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan peraturan perundang-undangan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

**Kepala Bagian Perencanaan BPP Kemendagri Muhammad Noval Labadjo**

menjelaskan, reformasi birokrasi di BPP Kemendagri sudah dimulai sejak melakukan penataan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Penataan itu ditandai dengan pembenahan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan penatalaksanaan dalam menjalankan tugas BPP Kemendagri agar membuah hasil maksimal.

Sementara, menurut mantan Kepala Subbagian Sistem dan Prosedur (Sisdur) Bagian Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian dan Sisdur serta Evaluasi Kinerja ASN (PKSE) 2016-Agustus 2018 **Agung Wijaya**, reformasi birokrasi di BPP Kemendagri mulai intens diterapkan pada 2017. Saat itu Mendagri menginstruksikan kepada seluruh jajarannya agar menerapkan reformasi birokrasi. Sebagai bagian dari pemerintahan, Kemendagri diharuskan mampu melayani masyarakat dengan baik.

Selain itu, peningkatan tunjangan kinerja juga menjadi dorongan BPP Kemendagri menerapkan reformasi birokrasi. Penerapan itu juga dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang termotivasi untuk memberikan kontribusi yang baik. "Bukan seperti



dulu yang menunggu perintah dan segala macam," kata Agung yang saat ini menjabat Kepala Bidang Administrasi Kewilayahan Puslitbang Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, dan Kependudukan.

Reformasi birokrasi memang tidak terlepas dari peran sumber daya manusia. Oleh karenanya, pemahaman masing-masing individu dibutuhkan, baik tingkat pimpinan maupun seluruh perangkat kerja. "Makanya kenapa ada salah satu *item* penilaian dari reformasi birokrasi, yaitu pemahaman reformasi birokrasi oleh seluruh pegawai dan personil di tiap unit kerja," kata Noval, Selasa (11/6).

Dengan pemahaman yang menyeluruh, perangkat kerja didorong untuk memberikan kinerja yang terbaik. Noval mencontohkan, salah satu perbaikan dalam pelayanan tamu yang dia-

komodasi melalui penerapan Unit Layanan Administrasi (ULA), yang salah satu fungsinya mengatur sirkulasi kunjungan ke BPP Kemendagri. Ia menyebutkan, sebelum diterapkan ULA kemungkinan adanya pegawai yang memanfaatkan momen kunjungan untuk meraup imbalan bisa saja terjadi. "Misalnya tamu datang, sini Pak SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) nya, dengan harapan dapat imbalan, itu (perilaku) semua harus hilang," katanya.

ULA kemudian dikembangkan menggunakan sistem berbasis elektronik (e-ULA). Melalui layanan e-ULA pihak yang akan berkunjung atau konsultasi diarahkan terlebih dulu mengisi administrasi secara daring. Administrasi itu misalnya berupa surat permohonan, keterangan perangkat kerja

yang dituju, jumlah orang yang terlibat, dan sebagainya. Dengan informasi yang diberikan, BPP Kemendagri dapat mempersiapkan penerimaan kunjungan atau konsultasi, sehingga berjalan sesuai harapan. "Pada saat dia datang yang menerima siapa, kalau tiba-tiba datang nanti yang menerima siapa," katanya.

Meski demikian, BPP Kemendagri masih menerima kunjungan tanpa melalui prosedur e-ULA. Noval menyebut, hal itu karena tidak ingin menampik kunjungan yang seringnya memakan ongkos besar. "Kasian juga, mereka sudah membuang biaya dari daerah," katanya. Tetapi, dengan kunjungan mendadak, kemungkinan unit kerja yang dituju tidak berada di tempat bisa terjadi. Walhasil, pertemuan pun dialihkan ke perangkat kerja lainnya.

## Rencana aksi

Dalam menerapkan reformasi birokrasi, BPP Kemendagri diwajibkan menyusun rencana aksi yang mengacu pada delapan area perubahan. Noval mengaku, telah menyusun rencana aksi itu bersama PJKSE untuk diterapkan pada 2019. Belum lama ini rencana aksi juga telah disosialisasikan kepada seluruh perangkat kerja BPP Kemendagri, dengan harapan dapat dipahami dan dijalankan. Ia menekankan, mestinya sosialisasi itu ditandaklanjuti oleh masing-masing unit kerja. "Contohnya di Pusat Penelitian dan Pengembangan melakukan sosialisasi ke aparat di lingkungannya masing-masing sesuai tugas fungsinya, di Sekretariat juga sama," katanya.

Kepala Subbagian Sistem dan Prosedur Serta Evaluasi Kinerja ASN **Joko Kartiko Krisno** menyebutkan, tahun ini BPP Kemendagri memiliki 93 rencana aksi reformasi birokrasi yang mesti dijalankan. Target tersebut menjadi landasan penilaian yang dilakukan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang dibentuk Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri. Adapun penilaian itu dilakukan pada jangka waktu tertentu.

Joko menuturkan, reformasi birokrasi BPP Kemendagri pada semester pertama tahun ini telah dinilai APIP. Hasilnya, poin BPP Kemendagri melampaui target yang dicanangkan Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemendagri. Penilaian itu berdasarkan bukti penerapan reformasi birokrasi yang dilaporkan BPP Kemendagri. "Contohnya area manajemen perubahan, pembentukan tim kerja reformasi birokrasi, ini ada SK (surat keterangan)," ujar Joko.

Dengan menerapkan reformasi birokrasi, pelayanan publik serta kinerja organisasi menjadi lebih baik. Di sisi lain, pola pikir aparatur sipil Negara (ASN) juga menjadi berubah. "Contohnya peningkatan kualitas pelayanan publik, jadi si ASN ini juga diminta untuk selalu ramah terhadap tamu," katanya.

### Anggaran reformasi birokrasi

Persoalan anggaran sering kali menjadi sandungan tidak berjalannya suatu program. Namun, untuk penerapan reformasi birokrasi diyakini dapat berjalan tanpa adanya anggaran khusus. Hanya saja anggaran itu diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Sebab, menurut Noval, anggaran reformasi birokrasi melekat pada semua kegiatan. Seperti misalnya saat menyusun Rencana Kerja tahunan. Tanpa menyebutkan reformasi birokrasi, aktivitas itu sudah termasuk dalam reformasi birokrasi. “Kalau *nggak* ada RB-nya di situ (proses penyusunan Renja) hancur, nanti (rawan) pusat penelitian dan pengembangan sana ada yang *ngasih* duit *nggak*?” katanya.

Contoh lainnya, seperti penerapan zona integritas yang diterapkan pada Puslitbang Inovasi Daerah (Inovda) yang diakui tidak memuat anggaran khusus reformasi birokrasi. Pusat tersebut dipilih karena banyak berhubungan dengan pemerintah daerah, misalnya penilaian *Innovation Government Award* (IGA). Sebagai ajang yang menentukan peraih penghargaan daerah berinovasi, membuat IGA rawan terjadinya gratifikasi. Kendati tidak dikurangkan dana reformasi birokrasi, menurut Noval dalam pelaksanaannya tetap mengacu pada semangat tersebut. Oleh karenanya, program itu dicantumkan dalam rencana aksi. “Kalau ada gratifikasi di situ bisa saja nilainya berubah. Nilai berubah nanti siapa yang dapat juara berubah, itu kenapa ditempelkan zona integritas,” katanya.

Namun, karena panduan Biro Organisasi dan Tatalaksana Setjen Kemendagri yang mengharuskan adanya anggaran khusus sebagai bukti pelaksanaan reformasi birokrasi, alokasi biaya dimasukkan. “Paling tidak untuk memayungi tim, untuk melaksanakan aktivitas harus ada anggarannya walau pun kecil,” katanya.

Aktivitas yang dimaksud Noval meliputi penyusunan rencana aksi reformasi birokrasi, pelaksanaan, dan evaluasi rencana aksi. Aktivitas itu membutuhkan anggaran khusus, karena proses-

nya perlu menggelar rapat, serta melibatkan tim penilai. Namun Noval menekankan, untuk penjiwaan reformasi birokrasi mesti masuk ke dalam setiap kegiatan.

Noval menilai, BPP Kemendagri telah melakukan perbaikan reformasi birokrasi dari tahun ke tahun. Perbaikan itu salah satunya ditunjukkan dengan lahirnya Puslitbang Inovasi Daerah. Terlebih pusat itu terlibat dalam program prioritas nasional yang termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Sehingga gaung kinerja BPP Kemendagri lebih terlihat. “Supaya apa yang dihasilkan BPP Kemendagri itu lebih nampak, dengan kita terlibat dalam program prioritas nasional,” katanya.

Terkait anggaran, Agung mengaku saat menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Sisdu kegiatan reformasi birokrasi kadang tidak terakomodasi anggaran. Hal itu karena terbatasnya dana yang dialokasikan ke BPP Kemendagri. Namun, karena termotivasi untuk tetap dijalankan hal itu menjadi bagian dari rencana aksi reformasi birokrasi. Seperti saat 2017 menerapkan program zona integritas berupa pemasangan spanduk, sosialisasi, dan lainnya.

Menurut Agung, pada prinsipnya reformasi birokrasi mengarahkan pada keterbukaan publik. Dengan reformasi birokrasi masyarakat dapat mengetahui kerja yang dilakukan BPP Kemendagri. Semua hasil kerja itu, lanjut Agung, dapat diakses melalui laman resmi BPP Kemendagri. Selain itu berbagai aplikasi juga dirancang untuk melancarkan kerja BPP Kemendagri seperti e-ULA dan lainnya.

Agung mengatakan, biasanya kegiatan yang dilaporkan sebagai bagian dari reformasi birokrasi hanya yang memuat SOP. Pelaksanaan SOP itu menjadi bagian ukuran penilaian penerapan reformasi birokrasi. “Mereka (penilai) tanya, apakah SOP ini dijalankan itu yang kita laporkan di delapan area perubahan itu,” katanya.

Salah satu kegiatan itu, seperti aktivitas kelitbang yang dijalankan Puslit-



bang BPP Kemendagri. SOP memuat berbagai tahapan penelitian. Berkas itu kemudian diserahkan ke Bagian Sisdu untuk dilaporkan ke aplikasi reformasi birokrasi yang terhubung dengan Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Jenderal Kemendagri, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Senada dengan Noval, Agung menilai, laju reformasi birokrasi BPP Kemendagri dari waktu ke waktu mengalami peningkatan. Hal itu seperti ditandai dengan gencarnya berbagai program peningkatan inovasi daerah yang

dilakukan Puslitbang Inovda, dan program penyusunan Perkiraan Isu Strategis Nasional (Kirstanas) yang dilakukan Puslitbang Otonomi Daerah, Politik, dan Pemerintahan Umum. Selain itu peningkatan dapat dilihat dari delapan area perubahan lain, baik dari sisi manajemen pengelolaan maupun sebagainya. “Dalam arti *mindset* SDM-nya sudah berubah,” katanya. Terlebih pengarah reformasi birokrasi kepada perangkat kerja terus dilakukan.

Ihwal zona integritas yang diterapkan di Puslitbang Inovda, Kepala Subbidang Standar Kompetensi Puslitbang Inovda, **Isman**, menjelaskan program

itu berupa pemberlakuan sistem aplikasi penilaian berbasis indeks untuk mengukur daerah berinovasi. Penilaian itu bertujuan memberikan penghargaan kepada daerah yang dinilai paling berinovasi. Dengan menerapkan penilaian berbasis sistem aplikasi, dapat menekan terjadinya korupsi dan subjektivitas tim penilai. Sebab, nilai yang muncul merupakan hasil kerja aplikasi dengan mengacu pada instrumen inovasi yang diunggah daerah. “Artinya apa yang dikeluarkan sistem, ya segitu *lah* nilainya, jadi *nggak* bisa tiba-tiba ada *gitu*,” kata Isman.

Dari instrumen yang diunggah kemudi-

an dilakukan analisis dan verifikasi oleh tim penilai. Tahapan ini merangking daerah mana saja yang lolos sebagai nominator penerima penghargaan. Tidak hanya itu, penilaian dilanjutkan dengan tahapan presentasi oleh kepala daerah untuk mengukur pemahaman inovasi yang diterapkan. Selanjutnya, dilakukan verifikasi lapangan dengan mengacu setiap obyek yang diisi dalam aplikasi indeks inovasi serta instrumen kriteria penilaian. “Verifikasi lapangan bisa dilakukan secara diam-diam, atau secara resmi,” jelasnya. Setelah semua tahapan dilakukan, barulah muncul hasil akhir, daerah mana saja yang ber-

hak mendapat penghargaan pada ajang IGA.

Isman memastikan, tim penilai yang terlibat merupakan orang-orang yang memiliki integritas tinggi. Selain melibatkan BPP Kemendagri, Puslitbang Inovda juga menggandeng pihak lain untuk dijadikan tim penilai. Ia menegaskan, tim penilai tidak memiliki wewenang menambah skor. Otoritasnya hanya mengurangi skor atau maksimal mempertahankan skor yang sudah muncul berdasarkan aplikasi indeks inovasi. “Kemungkinan yang diinput itu ternyata *nggak* ada (instumen) nilainya nol, tidak bisa menambah nilai, walaupun ada maksimal nilainya tetap,” katanya.

### Tunjangan kinerja

Penerapan reformasi birokrasi berdampak besar pada pengalokasian anggaran tunjangan kinerja bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkup kementerian termasuk Kemendagri. Meski orientasi reformasi birokrasi sebenarnya bukan sekadar menyoal angka tunjangan kinerja, melainkan perbaikan dalam memberikan pelayanan. Noval menegaskan, angka itu hanya dampak dari sumbangsih kinerja yang diberikan perangkat kerja.

Hal itu perlu dipahami, sebab tidak sedikit pihak yang salah mengartikan reformasi birokrasi sebagai capaian peningkatan tunjangan kinerja. Padahal naiknya tunjangan kinerja hanyalah efek dari penerapan reformasi birokrasi. Oleh karenanya, ia mengimbau kepada perangkat kerja BPP Kemendagri agar tidak menjadikan tunjangan kinerja sebagai acuan melakukan reformasi birokrasi, tetapi lebih ke arah perubahan yang lebih baik.

Angka tunjangan kinerja tersebut diberikan berdasarkan capaian poin reformasi birokrasi Kemendagri yang dihimpun dari kinerja masing-masing komponen. Salah satu ikhtiar Kemendagri mendorong peran setiap individu dalam menyukseskan reformasi birokrasi, dengan menerapkan layanan Sikerja. Layanan ini sebagai portal laporan kinerja masing-masing ASN saban harinya.

Noval menyebutkan, sebelum diterapkan Sikerja, pegawai yang absen tetap mendapatkan honor. Namun, semenjak sistem tersebut diterapkan pengaturan skema hukuman bagi pegawai yang melanggar diberlakukan. “Itu bagian dari reformasi birokrasi,” jelas Noval. Sedangkan penghargaan bagi pegawai yang melaksanakan reformasi birokrasi secara maksimal masih belum jelas, apakah diutamakan mendapat promosi jabatan atau berupa lainnya.

Guna mendorong semua komponen memberikan perhatian terhadap reformasi birokrasi, pada jangka waktu tertentu, Menteri Dalam Negeri bakal berkirim surat yang memuat laporan capaian reformasi birokrasi masing-masing komponen. “Komponen ini rangkingnya ini, sudah memberikan hasil yang baik, baru informasi (suratnya),” katanya.

Menurut Noval, dalam area perubahan reformasi birokrasi ada komponen khusus yang harus menyiapkan sistem layanan untuk mengakomodasi seluruh komponen di tingkat kementerian. Ia mencontohkan, aplikasi Sikerja yang dibuat Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemendagri. Aplikasi itu dimanfaatkan seluruh komponen, sehingga komponen lain tidak perlu membuat. “Mereka membuat untuk digunakan seluruhnya, tetapi kalau tidak membuat itu nilai RB (reformasi birokrasi) Kemendagri jelek,” katanya.

Hal itu serupa dengan layanan penerapan SPIP (Sistem Pengendali Intern Pemerintah), *Whistleblowing System*, yang digunakan Itjen Kemendagri dalam melakukan pengawasan dengan berkoordinasi dengan Sekjen. Namun, untuk instrumen lainnya seperti zona integritas, tim reformasi birokrasi, dan sebagainya, masing-masing komponen harus membuatnya. Seluruh nilai komponen tersebut kemudian direkap dan menjadi hasil kinerja Kemendagri. “Makanya memang nilainya kumulatif, kalau ada komponen yang kurang nilainya, misalnya kita (BPP Kemendagri) paling rendah itu akan menjadi total penilaian, nanti kita yang kena tegur,” katanya.



**Kepala Bagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kemendagri, Budi Utomo**, mengatakan pegawai yang memaknai reformasi birokrasi sebagai kesempatan untuk meningkatkan tunjangan kinerja, merupakan hal yang lumrah dan manusiawi. Di samping, tunjangan kinerja juga menjadi stimulus agar pegawai bekerja lebih baik. Meski reformasi birokrasi tidak melulu diartikan dengan kenaikan tunjangan kinerja. “Reformasi birokrasi itu *kan* sebenarnya sebuah keharusan untuk membenahi birokrasi agar akuntabel, responsif, dan transparan, prinsip *good governance* kalau kita gabungkan hanya tiga itu saja,” katanya.

Budi menambahkan, Mendagri Tjahjo Kumolo menginginkan pada 2020 tunjangan kinerja Kemendagri bisa

mencapai 100 persen. Untuk menggapai itu, dibutuhkan nilai reformasi birokrasi sebesar 85,01. Sedangkan pada 2018 nilai itu baru sebesar 75,02, turun 0,01 dari tahun sebelumnya. Budi mengatakan, tahun ini langkah perbaikan mulai digenjut dengan mewajibkan setiap komponen menyusun rencana aksi reformasi birokrasi, yang akan dilaporkan progres capaiannya saban bulan.

Dia menjelaskan, saat tunjangan kinerja mencapai 100 persen, strategi selanjutnya menargetkan nilai reformasi birokrasi berada di angka 100. Angka itu sebagai modal untuk menaikkan kelas jabatan di Kemendagri yang semula 1-17 menjadi 27. Guna mendongkrak nilai itu, pihaknya bakal mengusulkan regulasi yang mengatur perolehan tunjangan kinerja setiap komponen

didasarkan pada capaian reformasi birokrasi. Dengan sistem seperti itu, antarkomponen akan berlomba-lomba meningkatkan capaian indeks reformasi birokrasi. “Jadi ada kompetitif di Direktorat Jenderal dan Badan, kalau semua dipukul rata (tunjangan kinerjanya) yang RB nya jelek dia akan menikmatinya, sementara yang *ngos-ngosan* hasilnya sama,” katanya.

Merespons pernyataan Budi, Joko mengimbau agar komponen bisa kompak berkontribusi mewujudkan target yang sudah dicanangkan Kemendagri. Kekompakkan itu juga harus ditunjukkan pada setiap satuan unit kerja seperti BPP Kemendagri, dengan saling bersinergi antarperangkat kerja. “Kabannya (Kepala BPP Kemendagri) *getol*, yang di bawahnya malas-mala-

san, ya *nggak* bisa (tercapai). Harus sama-sama mau maju untuk perubahan,” katanya.

Dia berpesan, salah satu hal yang perlu dibenahi adalah keterlibatan pimpinan, terutama dalam melakukan pengendalian jalannya berbagai program. Sebab pimpinan memiliki otoritas kuat dalam menjalankan roda instansi. “Kalau saya *sih* hanya memfasilitasi saja, apa yang diminta Biro Ortala (Organisasi dan Tata Laksana Sekjen Kemendagri), kita sampaikan ke atas, sebatas laporan,” katanya.

Budi menambahkan, reformasi birokrasi di BPP Kemendagri mestinya tidak hanya dilakukan oleh sekretariat, tetapi juga didukung oleh setiap Puslitbang termasuk jajarannya. Dirinya beberapa kali melihat laporan kemajuan reformasi birokrasi yang disampaikan Kepala Bagian Perencanaan dan Kepala Bagian PJKSE, justru cenderung yang bekerja bagian Sekretariat. Dirinya belum melihat peran Puslitbang secara maksimal. Padahal, reformasi birokrasi merupakan pekerjaan bersama. Sebab, meski secara penempatan berada di PJKSE yang didukung oleh Bagian Perencanaan, tetapi pelaksanaannya melibatkan seluruh elemen BPP Kemendagri. “Kami mengharapkan agar seluruh elemen yang ada di BPP di Pusat satu sampai empat, mengintegrasikan diri untuk mendukung reformasi birokrasi BPP,” katanya.

Keterlibatan yang dimaksud Budi adalah pemberian wewenang setiap perangkat sesuai *road map* reformasi birokrasi internal instansi. Ia mencontohkan, di area manajemen perubahan mestinya dilimpahkan ke Kepala Puslitbang, Sekretaris, dan Kepala BPP. Hal ini penting untuk menunjukkan sinergitas di tingkat pimpinan, sehingga penerapan di tingkat bawah semakin mudah. “Jadi seluruh Kapus (Kepala Puslitbang), Sekretaris dan Kepala BPP harusnya *nge-blending*, karena reformasi birokrasi *kan* sebenarnya *top down*, kalau atasannya sudah berkomitmen untuk menggerakkan RB BPP, tentu jenjang eselon di bawah akan mengikuti,” katanya.

■ MUJAEANI

# MENANTI MANFAAT APLIKASI

Layanan Berbasis Aplikasi Masih Butuh Perhatian

Salah satu ikhtiar Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (BPP Kemendagri) untuk meningkatkan reformasi birokrasi, adalah dengan menerapkan layanan berbasis elektronik. Sejumlah aplikasi telah dirancang untuk menunjang kinerja BPP Kemendagri. Beberapa di antaranya sudah berjalan baik, tetapi tidak sedikit aplikasi yang masih membutuhkan perhatian serius. Kendalanya bukan hanya masalah teknis pengoperasian, melainkan kurangnya komitmen bersama untuk mendukung program tersebut.

Kepala Subbagian Pembinaan Jabatan Fungsional BPP Kemendagri **Rachman Kosasih**, menjelaskan beberapa aplikasi layanan elektronik yang berkaitan dengan tugas fungsi BPP Kemendagri. Di bidang penelitian, BPP Kemendagri merupakan pengguna dari aplikasi *e-peneliti*. Aplikasi yang dibuat Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Pusbindiklat Peneliti LIPI) pada 2016, ini untuk memudahkan penilaian angka kredit sebagai acuan kenaikan jabatan peneliti di Indonesia, termasuk di BPP Kemendagri.

Sebelum adanya *e-peneliti* proses pengajuan penilaian angka kredit dilakukan secara manual. Tetapi dengan aplikasi itu, peneliti hanya perlu memindai berkas-berkasnya ke bentuk digital, yang kemudian diunggah ke

*e-peneliti*. Selain memudahkan pengurusan berkas, sistem tersebut juga dapat meringkas waktu penilaian. Karena berkas yang terunggah, secara otomatis dapat langsung ditelaah oleh tim penilai LIPI. “Zaman dulu kita harus *nyerahin* buku, tulisan itu secara manual, dibawa bertumpuk-tumpuk,” kata laki-laki yang kerap disapa Deden ini.

Dia menyebutkan, BPP Kemendagri sempat ditunjuk sebagai koordinator bagi peneliti yang ada di pemerintahan daerah. Penunjukan itu disertai dengan penyerahan akun khusus dari LIPI ke BPP Kemendagri. Pihaknya juga bertugas membagikan akun *e-peneliti* ke masing-masing peneliti termasuk yang berada di pemerintah daerah. Berkas yang diunggah pun terlebih dulu diperiksa BPP Kemendagri. Jika dinyatakan lengkap dan sesuai persyaratan, berkas kemudian dilimpahkan ke proses selanjutnya untuk dilakukan penilaian. Namun, tugas itu sebenarnya tidak lagi diemban BPP Kemendagri, semenjak diterbitkannya Peraturan Kepala LIPI No 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti. Tetapi, penerapan regulasi itu belum berjalan maksimal, sehingga BPP Kemendagri masih berfungsi sebagai koordinator. “Sebenarnya berlaku 2019 ini, cuma secara sistem *e-peneliti* masih tampilan dan proses yang lama,” katanya.

Guna mengenalkan serta memahami *e-peneliti* kepada pegiat riset, BPP Kemendagri juga membuat konten informasi berbasis audio visual di *Youtube*. Dengan pemaparan *audio visual*, diharapkan memudahkan calon pengguna *e-peneliti* dalam memahami langkah yang perlu dilakukan dalam pengajuan angka kredit.

Selain itu, untuk mengetahui sebaran jumlah peneliti di internal maupun pemerintah daerah di Indonesia, pada



2017 BPP Kemendagri meluncurkan portal data dasar peneliti. Melalui layanan ini,

BPP Kemendagri dapat mengetahui profil peneliti, seperti jabatan, jenis kelamin, dan lainnya. Deden menyebutkan, tahun ini aplikasi tersebut rencananya akan dikembangkan dengan menambah sejumlah informasi, seperti rekam jejak pendidikan, pelatihan, dan lainnya. “Ada latar belakang pendi-

dikan, kursus apa saja yang sudah ia laksanakan, jadi kita punya rekam jejak,” katanya.

Selain menghimpun informasi profil pribadi peneliti, lewat layanan itu pihaknya dapat melihat masa jabatan peneliti. Sehingga, peneliti yang pensiun dapat dihapus dari daftar, untuk memberikan jumlah peneliti yang akurat. Dengan layanan ini kualifikasi masing-masing peneliti dapat terlihat dan dipetakan. Pemetaan berfungsi sebagai

acuan penerapan langkah kebijakan untuk meningkatkan kualitas peneliti.

Tidak hanya itu, dalam rangka memastikan penelitian dilakukan sesuai tahapan yang diatur Permendagri No 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, BPP Kemendagri melalui Bagian Perencanaan juga membuat aplikasi *e-kelibangan*. Deden menjelaskan, setiap kegiatan kelitbangan

harus mengunggah berbagai tahapan yang telah dilalui. Unggahan itu dapat menjadi bukti bahwa penelitian sudah sesuai prosedur. Di sisi lain, lewat data yang ditampilkan, Bagian Perencanaan dapat memantau sekaligus mengevaluasi capaian proses dari sebuah kelitbangan. “Jadi buktinya sudah kelihatan di situ, misal suatu saat nanti bukti itu diminta tinggal *download* saja di *e-kelibangan*,” katanya.

Permendagri No 17 Tahun 2016

menginstruksikan agar pemerintah daerah juga membuat layanan serupa *e-kelitbangan*. Namun, lanjut Deden, tidak sedikit daerah yang mengaku kesulitan untuk pengadaan layanan tersebut karena terbentur anggaran. Sementara *e-kelitbangan* sendiri masih diperuntukkan bagi internal BPP Kemendagri. Mereka meminta agar *e-kelitbangan* juga dapat digunakan oleh pemerintah daerah.

Dalam rangka mensukseskan kegiatan kelitbangan, BPP Kemendagri juga menginisiasi beberapa layanan proses penelitian terdapat dalam aplikasi *e-research*. Layanan itu sendiri memiliki tiga sub aplikasi, seperti *e-survey*, Sistem Informasi Penelitian dan Pengembangan (Sinlitbang) dan *e-funding*. Aplikasi *e-survey* merupakan layanan untuk membantu penyebaran kuesioner penelitian ke banyak tempat. Deden menjelaskan, penelitian sering terbentur anggaran yang membuat jumlah lokus kelitbangan menjadi terbatas. Dengan layanan ini kegiatan penelitian dapat menjangkau lokus yang lebih luas dan murah dengan melibatkan BPP di daerah.

Sementara Sinlitbang, merupakan aplikasi yang berfungsi untuk menghimpun seluruh data penelitian di Indonesia. Sebab, selama ini masih sulit merangkum data penelitian yang ada. Melalui aplikasi ini dapat menghindari keterulangan objek kajian. Menurut Deden, akan menjadi percuma jika mengkaji objek yang sebenarnya sudah diteliti. “Kita langsung saja konsultasi ke orang yang melakukan penelitian, apa saja kekurangannya, kita bisa *tambahin*,” katanya.

Tidak hanya terbatas penelitian yang dilakukan peneliti profesional, tetapi Sinlitbang juga menghimpun penelitian mahasiswa, atau perseorangan. Mekanismenya, setiap pihak yang

ingin melakukan penelitian terlebih dulu mendaftar ke BPP Kemendagri. Namun, inisiasi itu terbentur dengan respon masyarakat yang masih dirasa kurang. Deden mengatakan, belum adanya aturan yang mengharuskan kegiatan penelitian mendaftar pada layanan tersebut menjadi kendala dalam penerapannya. “*Pas kita maksain* hukumannya apa kalau tidak menggunakan itu, apalagi bukan hanya berkaitan dengan Aparatur Sipil Negara (ASN), melainkan masyarakat umum,” katanya.

Selain itu, untuk mempermudah pembiayaan kelitbangan, BPP Kemendagri juga mengembangkan aplikasi *e-funding*. Layanan itu dapat mempertemukan lembaga yang hendak membiayai kegiatan kelitbangan dengan peneliti yang membutuhkan dana. Aplikasi ini dapat digunakan oleh peneliti BPP Kemendagri maupun daerah dengan mencantumkan informasi terkait penelitian yang bakal dilakukan. “Kita bisa memaparkan proposal,” katanya.

BPP Kemendagri juga memiliki aplikasi data kelembagaan BPP pusat dan daerah di Indonesia. Melalui layanan itu dapat diketahui informasi singkat terkait instansi yang bersangkutan. Sebelum ada aplikasi ini, Deden mengaku kesulitan menghimpun data pejabat alamat dan kontak, serta profil singkat daerah tersebut. Di sisi lain, informasi yang dapat diakses secara daring itu juga dapat dibuka oleh masyarakat umum. “Misanya Bappeda (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang memiliki unit kelitbangan) Provinsi Aceh, kontakannya siapa saja, terus kepala badannya siapa, sekretarisnya siapa,” katanya.

Layanan itu juga memuat tipologi yang menggambarkan tingkat BPP berdasarkan beban kerjanya yang dikelompokkan menjadi tiga golongan,



yaitu A, B, dan C. Deden menyebutkan tipologi tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Data yang dihimpun merupakan hal yang penting karena daerah merupakan salah satu *partner* BPP Kemendagri dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

#### Publikasi karya ilmiah dan populer

Selain proses kelitbangan, hal yang perlu diperhatikan adalah sebaran publikasi hasil penelitian. Banyaknya hasil penelitian jika tidak diimbangi dengan publikasi yang baik akan menjadi sia-sia. Oleh karenanya, sebagai instansi yang konsen di bidang kelitbangan, BPP Kemendagri berupaya menghadirkan publikasi karya ilmiah yang berkualitas. Pada awal 2016 Pusat In-

formasi, dan Dokumentasi (PID) BPP Kemendagri membangun pengelolaan jurnal berbasis elektronik (*e-journal*). Kebijakan itu untuk merespon, Perdirjen DIKTI No 17 Tahun 2016 tentang Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah Elektronik dan Perka LIPI No 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah. Regulasi tersebut mengharuskan pengelolaan jurnal dilakukan secara elektronik jika hendak terakreditasi.

Melalui pengelolaan berbasis elektronik, memungkinkan sebaran publikasi karya ilmiah lebih luas, tidak terbatas ruang dan waktu. Guna mewujudkan terbangunnya sistem tersebut, PID BPP Kemendagri memanfaatkan layanan *Open Journal System* (OJS). Produk *open source* dari *Public Knowledge Project* (PKP) ini, khusus digunakan

untuk mengelola jurnal elektronik. Aplikasi ini dinilai kompatibel dengan mesin pencari *Google* termasuk *Google Scholar*, “Sehingga artikel yang dimuat pada jurnal yang memakai OJS akan terindeks *Google* lebih baik,” kata Moh. Ilham A. Hamudy mantan Kepala PID BPP Kemendagri.

Kondisi ini cukup menguntungkan, terlebih semenjak terbitnya Permenristekdikti No 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah. Regulasi itu mengatur proses akreditasi menjadi satu pintu di bawah kewenangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi (Kemenristekdikti), baik jurnal yang dikelola perguruan tinggi, maupun kementerian/lembaga seperti BPP Kemendagri. Sebelumnya, jurnal kementerian/lembaga berada di bawah pengelolaan akreditasi LIPI.

Dalam melakukan indeks, Kemenristekdikti menggunakan Sinta (*Science and Technology Index*). Sinta ini juga dijadikan istilah bagi pemeringkatan jurnal di Indonesia, mulai dari 1-6 dengan sebaran nilai yang berbeda. Sedangkan salah satu acuan data yang dihimpun Sinta adalah *Google Scholar*, selain *Scopus* dan *Web of Science*. “Dengan demikian menggunakan OJS dalam pengelolaan jurnal membuka peluang artikel yang terbit dapat terindeks dan tersitasi secara baik,” katanya.

Saat ini BPP Kemendagri memiliki dua *e-journal*, yaitu Jurnal Bina Praja dengan peringkat Sinta 2 dan Matra Pembaruan peringkat 3. Jurnal yang terbit dua kali setahun ini, menghimpun karya ilmiah dari internal BPP Kemendagri maupun pihak luar.

Selain itu, untuk mengabarkan informasi dan wawasan seputar kegiatan kelitbangan, PID juga menerbitkan beberapa program seperti portal berita daring, yang muncul jika mengunjungi laman utama *website* BPP Kemendagri. Selain itu, untuk berita yang lebih mendalam, PID juga menerbitkan majalah dua bulanan. Majalah tersebut berisi aneka rubrik, mulai dari kegiatan internal maupun eksternal yang benang merahnya menyoal kelitbangan. Guna memudahkan pembaca mengakses majalah, PID juga menghidrarkannya dalam bentuk elektronik (*e-magazine*). Dengan layanan ini, pembaca dapat mengunduh majalah dari berbagai edisi. “Ini bentuk komitmen kita untuk menonjolkan wacana kelitbangan,” jelas Ilham.

Sebagai instansi yang konsen di bidang penelitian, perangkat kerja BPP Kemendagri juga dituntut memahami berbagai pengetahuan, untuk menunjang kerja-kerjanya. Untuk memenuhi itu, BPP Kemendagri membangun perpustakaan internal pada 2017, bahkan pengelolaannya pun berbasis elektronik (*e-library*). Melalui layanan ini, pengunjung bisa mencari informasi seluruh koleksi buku tanpa harus berkunjung terlebih dahulu ke perpustakaan. Proses peminjaman dan

“Data yang dihimpun merupakan hal yang penting karena daerah merupakan salah satu *partner* BPP Kemendagri dalam menjalankan tugas dan fungsinya.”

pengembalian juga diakomodasi ke dalam sistem, sehingga koleksi buku itu terjamin keamanannya. “Ini tentu mempermudah pengunjung dalam melakukan pencarian bahan bacaan,” kata Ilham.

### Pembenahan Sekretariat

Sementara itu, pada Bagian Sekretariat, BPP Kemendagri membuat aplikasi *e-office* yang sudah diinisiasi Deden sejak tahun kemarin. Namun secara sistem, layanan tersebut masih perlu banyak pembenahan. Sebab, saat ini *e-office* hanya berfungsi mengunggah serta menyimpan pemindaian berkas di lingkup kecil. Sebelum membuat aplikasi itu, Deden sebenarnya sudah studi banding ke Kota Tangerang Selatan yang memiliki layanan Sisumaker (Sistem Informasi Surat Masuk Keluar). Aplikasi tersebut juga direplikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM serta beberapa daerah. Layanan itu dapat melakukan pengiriman surat elektronik, dengan dilengkapi notifikasi jejak saat surat diterima, dibaca, maupun diteruskan. “Jadi kita bisa memantau, *oh* suratnya ada di meja tetapi belum dibaca, *oh* suratnya sudah di sana dan diteruskan,” katanya.

Penggunaan Sisumaker sendiri dapat dimanfaatkan oleh setiap perangkat kerja dengan mengantongi akun pribadi. Deden menyebutkan, dengan mekanisme seperti itu memungkinkan pelayanan surat menyurat lebih cepat tanpa harus menunggu yang bersangkutan berada di ruang kerjanya. “Mempermudah pimpinan, kapan saja melakukan disposisi,” katanya.

Deden berkeinginan *e-office* hadir serupa Sisumaker. Namun, karena anggaran terbatas menjadikan sistem *e-office* belum maksimal. Di sisi lain, kebijakan Kepala BPP Kemendagri lebih ingin membuat aplikasi secara mandiri. Sehingga menurutnya perlu komitmen yang kuat, agar *e-office* dapat hadir dan digunakan secara maksimal. Deden menyebutkan, rencananya *e-office* akan dikembangkan pada 2020. Penempatannya pun akan dipindahkan ke Bagian Umum bukan di Pembinaan Jabatan Fungsional,



Kepegawaian dan Sistem dan Prosedur serta Evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara (PJKSE). “Itu bagus, karena memang Tupoksinya (Tugas pokok dan fungsi), memang harusnya di TU (tata usaha),” katanya.

Deden menjelaskan, untuk mempermudah pemerintah daerah yang hendak berkunjung ke BPP Kemendagri, pihaknya telah mengembangkan e-ULA (Unit Layanan Administrasi Elektronik). Melalui layanan yang dibangun pada 2018 ini, pemerintah daerah dapat mengatur jadwal dengan perangkat kerja yang dituju. Selain itu, semua berkas dan kepentingan dapat diunggah melalui layanan tersebut. “Ada petugas ULA yang membuka aplikasi ini, nanti dia konsultasikan ke orang yang dituju,” jelasnya.

Selain itu, pertanyaan konsultasi juga dapat diajukan melalui aplikasi terse-

but. Bahkan, bagi pertanyaan yang sering diajukan akan ditampilkan beserta jawabannya. Hal ini untuk memangkas proses pelayanan serta anggaran kunjungan karena bisa dilakukan secara daring. Meski begitu, kebanyakan pemerintah daerah lebih memilih menghubungi langsung perangkat kerja yang bersangkutan ketimbang menggunakan sistem e-ULA. Namun BPP Kemendagri tetap mengencarkan sosialisasi e-ULA dan menyerahkan akun pengguna ke setiap perwakilan pemerintah daerah. “Tetapi secara sistem kita buat kan, ini *kan* bagian dari reformasi birokrasi,” katanya.

Deden menuturkan, rencananya e-ULA dari berbagai komponen Kemendagri akan dibuat terpusat dalam satu wadah. Komponen seperti BPP Kemendagri akan diberikan akun khusus untuk membuka pengajuan yang

diarahkan ke masing-masing komponen. Dengan begitu Kemendagri dapat mengetahui jumlah kunjungan, pertanyaan yang diajukan, dan lainnya ke komponen. “Secara aplikasi nanti ULA Kemendagri bukan lagi ULAnya BPP atau komponen lainnya, jadi satu portal saja” terangnya.

Deden juga berinisiasi membuat aplikasi e-PTT (Pegawai Tidak Tetap Elektronik). Aplikasi ini digunakan untuk merekam sekaligus menjadi bukti jejak kinerja masing-masing PTT. Sehingga data itu menjadi pertimbangan saat melakukan pemberhentian PTT. Adapun cara kerja e-PTT serupa aplikasi Sikerja yang digunakan PNS dalam menjalankan tugasnya setiap hari. Beberapa poin pengisian e-PTT,

seperti waktu memulai dan mengakhiri kerja, serta kegiatan apa saja yang dilakukan saban harinya. Laporan itu juga diperkuat dengan persetujuan masing-masing pimpinannya.

Kendati layanan ini belum bisa diakses secara daring, tetapi Deden mengaku sistem tersebut telah dibuat dan sudah dapat digunakan. Ia menyebutkan, komponen khususnya Kemendagri pun belum memiliki layanan serupa e-PTT. Bahkan, layanan itu diapresiasi Inspektorat Jenderal Kemendagri saat mengevaluasi bukti-bukti yang dilampirkan sebagai penunjang reformasi birokrasi pada 2018. “Itjen selaku evaluator RB kita, itu mengapresiasi *gitu*,” katanya.

### Membangun indeks

Selain pengembangan layanan kelitbang dan sekretariat, BPP Kemendagri melalui Puslitbang Inovasi daerah (Puslitbang Inovda) juga mengembangkan portal indeks inovasi daerah. Peneliti Puslitbang Inovda, Adi Suhendra menyebutkan, indeks tersebut merupakan sekumpulan indikator dan variabel untuk mengukur inovasi daerah. Layanan itu serupa *Global Innovation Index*, yang mengukur inovasi di 122 negara. Indonesia sendiri menurut Adi, pada 2018 Indonesia bertengger di posisi 85 negara yang berinovasi. Angka itu naik ketimbang 2017 yang berada di peringkat 87. “Naik *sih*, cuma kurang massif, masih jauh tertinggal dengan Malaysia, Thailand, apalagi Singapura,” katanya.

Langkah mengukur indeks inovasi dimulai dari 2017, dengan membuat kumpulan profil inovasi daerah. Kemudian pada 2018 disempurnakan menjadi indeks. “Bedanya kalau 2017 belum ada variabel dan indikator untuk mengukur inovasi, kalau sekarang sudah detail ada 35 indikator,” katanya.

Melalui aplikasi ini

dapat menghimpun data inovasi dari seluruh daerah. Adi menyebutkan, saat ini sudah ada 298 pemerintah daerah yang mengakses layanan tersebut. Angka itu menunjukkan masih separuh pemerintah daerah yang belum mengakses indeks inovasi. Belum maksimalnya akses tersebut, salah satunya akibat kurang massifnya sosialisasi. Pada 2018 sosialisasi hanya diberikan durasi 1,5 bulan. Oleh karenanya, tahun ini pihaknya menambahkan durasi sosialisasi menjadi 3 bulan. Ia berharap, dengan data yang terhimpun dapat menjadi acuan kebijakan untuk meningkatkan daerah berinovasi.

Adi menjelaskan, secara mekanisme penggunaan layanan ini diawal dengan pemberian *username* dan *password* dari Puslitbang Inovda ke masing-masing pemerintah daerah. Kemudian mereka masuk ke sistem indeks inovasi, dengan menginput seluruh profil inovasi daerah sesuai dengan kolom yang tersedia. Tahap selanjutnya mengisi indikator satuan pemerintah daerah seperti visi misi, jumlah perizinan yang dikeluarkan, dan sebagainya. Setelah itu, pemerintah daerah mengisi indikator inovasi. “Setelah mengisi indeks, kemudian muncul hasil indeks yang menjadi salah satu penilaian juri untuk menentukan penerima *Innovative Government Award* (IGA),” kata Adi.

Untuk meningkatkan daerah menerapkan inovasi, tahun ini Puslitbang Inovda akan meluncurkan portal *Tutorial Exhibition Display of Innovation* (Tuxedovation) berisi kumpulan video inovasi dari berbagai daerah. Dimuatnya video inovasi merupakan kebijakan terbaru dari Puslitbang Inovda, di mana saat pengisian indeks inovasi, pemerintah desa dianjurkan mengunggah video. Video tersebut akan secara otomatis terhimpun di dalam Tuxedovation. Dengan format dan durasi yang ditentukan, video itu memuat paling sedikit empat aspek, yakni latar belakang, proses penentuan ide, proses penerapan, serta dampak yang dihasilkan. “Bisa jadi animasi, infografis, bisa jadi video grafis,” kata Isman selaku Kepala Subbidang Standar Kompetensi Puslitbang Inovda.

Dia mengatakan, lahirnya Tuxedovation merupakan ikhtiar untuk menjawab persoalan terkait cara pembelajaran masyarakat Indonesia terutama generasi milenial. Menurutnya, generasi saat ini lebih menyukai metode pembelajaran dengan menonton dan mendengar. “Kurang tertarik membaca, lebih banyak menonton, mengandalkan pendengaran dan penglihatan,” ujarnya.

Dengan adanya Tuxedovation memudahkan pemerintah daerah maupun masyarakat umum untuk mempelajari sebuah inovasi. Ia mengaku, terobosan medium pembelajaran inovasi ini mendapat respons positif dari pemerintah daerah karena lebih mudah dipahami. Selain itu, dengan banyaknya video inovasi, diharapkan memunculkan berbagai ide.

Selain indeks inovasi daerah, BPP Kemendagri melalui Puslitbang Keuangan Daerah juga tengah merancang aplikasi pengelolaan keuangan daerah. Aplikasi ini dapat dimanfaatkan untuk pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah. **Kepala Subbidang Perimbangan Keuangan Nuril Fikri Aulia** menyebutkan, ongkos pembangunan aplikasi tersebut sudah dianggarkan pada 2020. Sementara tahun ini, pihaknya fokus menyusun Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), untuk menjadi landasan program tersebut.

Nuril menyebutkan, beberapa aspek data pengelolaan keuangan daerah itu meliputi pengukuran proses perencanaan pembangunan, transparansi, sinkronisasi perencanaan penganggaran, dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Nuril menambahkan, pihaknya menginginkan daerah yang memasukkan data dari aspek tersebut dapat terhubung dengan Puslitbang Keuda. Dengan demikian, Puslitbang Keuda akan mendapat gambaran pemetaan kondisi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Sehingga memudahkan proses pembinaan yang bakal dilakukan pemerintah pusat. “Kalau misal ada kurangnya, dia kurang di faktor apa, oh dia rendahnya di sinkronisasi

perencanaan, pembinaannya mesti ke situ,” jelas Nuril.

Selain itu, dengan adanya aplikasi ini pemerintah daerah dapat terpacu melakukan pembenahan untuk mencapai angka indeks tertentu. Guna memotivasi pemerintah daerah, dalam Permendagri juga akan mengatur ajang penghargaan bagi daerah yang berprestasi. Namun Nuril mengaku belum mengetahui secara pasti formula apresiasi tersebut seperti apa.

### Butuh perhatian serius

Beberapa layanan elektronik yang sudah dicanangkan, belum sepenuhnya berjalan maksimal. Oleh karenanya, dibutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak, terutama di internal BPP Kemendagri jika hendak menjalankan layanan elektronik sebagai bagian dari reformasi birokrasi.

**Kepala Bagian Perencanaan Muhammad Noval Labadjo**, menjelaskan beberapa hal yang menjadi sandungan belum maksimalnya penerapan layanan berbasis aplikasi. Pertama, kata Noval, hal yang paling mendasar yakni belum terbangunnya pola pikir perangkat kerja ihwal pentingnya mengubah layanan. Pola pikir itu penting dan mesti dimiliki semua perangkat kerja, terutama pemangku kepentingan. “Kita berkata-kata inovasi, tetapi *mindset* kita tidak berubah, kita *nggak* bisa mengarahkan ini kalau tidak ada keinginan untuk melaksanakan,” katanya

Kedua, masih rendahnya keinginan untuk melaksanakan layanan elektronik. Meski hal ini sebenarnya dapat diatasi jika ditunjang dengan pola pikir yang maju. Dengan pola pikir demikian, berbagai cara untuk sukseskan program dapat ditempuh. Noval mencontohkan, penerapan program yang dalam pelaksanaannya terbentur tenaga teknis. Persoalan itu dapat ditangani dengan menunjuk staf yang paham di bidang tersebut atau skema lainnya. Ketiga, kendala sosialisasi ke perangkat kerja yang diakuiinya masih kurang getol dilakukan. Terlebih, ada aplikasi yang ditujukan untuk pihak luar, se-



hingga jangkauan sosialisasi tidak sebatas internal BPP Kemendagri

Salah satu aplikasi yang belum banyak dimanfaatkan, seperti *e-kelitbangan* yang dikembangkan Bagian Perencanaan. Noval menyebut, beberapa pihak menilai aplikasi tersebut menyulitkan proses kerja. Padahal, persiapan seperti sosialisasi dan pelatihan untuk menjalankan aplikasi itu sudah diberikan pada 2017 dan 2018 kepada unit terkait. “Cara *ngisinya* begini, konsultannya datang *ngajarin*,” katanya, Selasa (11/6).

Menurutnya, jika mengikuti prosedur *e-kelitbangan* sebenarnya tidak menyulitkan pekerjaan, tetapi justru

membantu berbagai macam pekerjaan kelitbangan. Selain itu, sumbangsih poin penilaian reformasi birokrasi dari *e-kelitbangan* pun diyakini cukup banyak. “Misal kita ingin membuat SK (surat keputusan), draf SK nya itu sudah ada di situ, rujukan peraturan perundang-undangan, kalau ada perubahan tinggal kita *tambahi*,” katanya.

Selain itu, dengan menggunakan *e-kelitbangan* dapat memudahkan proses pemeriksaan pelaksanaan kegiatan kelitbangan. Pemeriksa cukup mengakses *e-kelitbangan* untuk mengetahui bukti pengerjaan penelitian. “Saat ini *e-kelitbangan* masih ada, tetapi tidak ada yang mau melaksanakan,” katanya. Oleh karenanya, ia berharap ada-

nya kebijakan yang kuat untuk mende-sak penerapan *e-kelitbangan*.

Guna sukseskan penerapan *e-kelitbangan*, Noval pernah berencana mengintegrasikannya dengan Bagian Keuangan. Skemanya, Pusat Penelitian dan Pengembangan BPP Kemendagri (Puslitbang) yang hendak melanjutkan tahapan penelitian dan membutuhkan biaya, terlebih dulu harus mengunggah bukti tahapan sebelumnya. “Tetapi kita *kan* masih *nggak pengen gitu, pengennya* langsung di laporan akhir,” katanya.

Padaحال, saat di forum Kemendagri, tidak sedikit pihak yang mengapresiasi berbagai layanan aplikasi yang dirancang BPP Kemendagri. Namun,

justru dalam pelaksanaannya aplikasi tersebut belum berjalan maksimal. “Cuma jadi konsep saja, karena tidak dilaksanakan,” katanya.

Berbagai program, termasuk pengada-an aplikasi tidak terlepas dari anggaran. Menurut Noval, aplikasi yang membutuhkan anggaran pengembangan, dapat dirumuskan bersama. Kendati demikian, anggaran pengembangan dapat dicabut jika selama tiga tahun berturut-turut aplikasi itu tidak dimanfaatkan dengan baik. Hal ini seperti yang dialami *e-kelitbangan*. “Sudah banyak aplikasi yang kita cabut, termasuk *e-kelitbangan* meski dikelola Bagian Perencanaan tetapi kalau tidak efektif dilaksanakan kita tidak diang-

garkan lagi,” katanya.

Kepala Bidang Administrasi Kewilayahan Puslitbang Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, dan Kependudukan Agung Wijaya menduga, belum berjalannya aplikasi *e-kelitbangan* karena merupakan program baru. Sehingga perangkat kerja belum terbiasa dan memahaminya. Oleh karenanya, fasilitator seperti dari Bagian Perencanaan dan PJKSE sebagai motor penggerak *e-kelitbangan* harus rajin mengontrol.

Agung tidak memungkiri jika ada pihak yang menganggap *e-kelitbangan* hanya mempersulit pekerjaan. Sebab, anggapan itu muncul karena *e-kelitbangan* orientasinya akan mengatur skema tertentu dalam pembiayaan penelitian. Namun, hal itu bisa ditanggulangi jika pegawai yang berkepentingan komit untuk menjalankannya. Selain itu, terbatasnya alat kerja seperti mesin pemindai digital juga turut memengaruhi belum berjalannya *e-kelitbangan*. Mengingat jumlah berkas yang mesti diunggah tidak sedikit. “Tidak semua orang punya mesin *scan*, ini paling satu bidang cuma punya satu,” katanya.

Namun demikian, Agung mengakui, dengan adanya *e-kelitbangan* dapat membantu pembuktian capaian pengerjaan. Terlebih nantinya bukti tahapan itu juga menjadi bagian yang harus diunggah pada aplikasi Sikerja. “Kalau sudah di-*upload* di sana (*e-kelitbangan*) berarti kita tinggal *copy file* saja,” katanya.

Senada dengan Noval, Agung berpendapat hal yang perlu dibenahi adalah pola pikir aparatur sipil negara (ASN), yang memiliki karakter berbeda dengan pegawai swasta yang terus dipacu berinovasi. Guna mendorong pengembangan pegawai, sejak 2018 Biro Kepegawaian Kemendagri melakukan asesmen ASN. Dengan upaya itu setiap pegawai dituntut untuk mengetahui minat dan kompetensinya. “Itu *kan* program RB-nya Biro Kepegawaian kita (Kemendagri), hasil dari situ *kan* imbasnya ke kita (BPP Kemendagri) juga,” katanya.

Asesmen dilakukan bertahap, berdasarkan golongan eselon sampai kemudian meliputi staf. Agung sendiri mengaku telah mengikuti program tersebut pada Maret 2019. “Jadi kita termotivasi untuk membawa sesuatu hal yang baru,” katanya.

Sementara itu, Kepala Subbagian Sistem dan Prosedur Serta Evaluasi Kinerja ASN PJKSE **Joko Kartiko Krisno** menduga, belum maksimalnya berbagai aplikasi tersebut akibat sosialisasi yang masih kurang. Selain itu, perhatian terhadap reformasi birokrasi juga masih perlu ditingkatkan. Oleh karenanya, ia mengharapkan Kepala BPP Kemendagri untuk aktif terlibat melakukan pengontrolan. Sebab, peran pimpinan dalam menyukseskan reformasi birokrasi sangat besar. “Kalau kita *sih* hanya memfasilitasi saja, apa yang diminta Biro Ortala (Organisasi dan Tatalaksana), kita sampaikan ke atas, sebatas laporan,” katanya.

Joko menekankan, segala hal yang berkaitan dengan penelitian merupakan nilai jual BPP Kemendagri. Berbagai layanan seperti *e-kelitbangan* sudah mestinya dapat dimanfaatkan. Ia menyamakan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menonjolkan segala hal yang berkaitan dengan administrasi penduduk seperti *e-KTP*. “Kita ini penelitian, hasil penulisan peneliti maupun tahapan penelitian tersebut, jadi yang berbau penelitian harusnya kita tonjolkan,” katanya.

Ia berharap, penerapan reformasi birokrasi di BPP Kemendagri dapat berjalan lebih baik, terlebih jumlah perangkat kerja yang dimiliki tidak terlalu banyak ketimbang komponen lainnya. Sehingga kondisi itu memudahkan pengaturan unit kerja dalam menyukseskan capaian reformasi birokrasi. Dengan demikian, lanjut Joko, BPP Kemendagri dapat menjadi *pilot project* reformasi birokrasi di lingkup Kemendagri.

Kepala Subbidang Standar Kompetensi Puslitbang Inovasi Daerah (Inovda), Isman, menjelaskan, belum berjalannya *e-kelitbangan* akibat sosialisasi dan kolaborasi di internal



BPP Kemendagri belum maksimal, sehingga perlu diperkuat. Meski pelatihan sudah dijalankan, tetapi jika tidak diiringi dengan sosialisasi berkelanjutan dampaknya menjadi kurang. Terutama dalam membangun pengertian dan pemahaman ke seluruh perangkat kerja. Sebab, untuk membangun pemahaman sistem tidak membutuhkan waktu sebentar. Hal ini penting, karena tantangan terberat dalam menjalankan inovasi adalah persoalan sumber daya manusia.

Oleh karenanya, sosialisasi secara berkelanjutan dibutuhkan. Inovasi lanjut Isman, perlu didukung dengan merombak kebiasaan yang sudah ada, dengan menunjukkan kerja yang lebih efektif dan efisien. Ia menyarankan, langkah awal yang perlu dilakukan adalah segera menggelar pertemuan internal untuk membahas teknis dan mengetahui aspek mana saja yang perlu dibenahi. “Kita harus kumpul, setelah IGA (*Innovation Government Award*) tahun ini misalnya,” katanya.

Di sisi lain, dalam menerapkan inovasi, lanjut Isman, perlu keberanian untuk melakukan uji coba. Melalui proses itu dapat diketahui aspek mana saja yang

perlu dibenahi dan dikembangkan. Ia menegaskan, Puslitbang Inovda secara prinsip mendukung diterapkannya *e-kelitbangan* di BPP Kemendagri dan mendorong agar aplikasi itu dilakukan pengujian. “Ayo kita uji sistemnya dulu, pengembangan *kan* perlu diuji, mulai dari *login* meng-*upload*, mengisi data,” katanya.

Guna mengenalkan program seperti layanan berbasis aplikasi, perlu juga memanfaatkan media sosial sebagai alat sosialisasi. Isman menyebutkan, dalam sebuah perusahaan anggaran terbesar bagi pengembangan produk adalah promosi, sehingga sosialisasi secara luas menjadi sebuah keharusan. “Barang yang bagus jika tidak ditunjang dengan promosi yang baik tidak akan laku,” katanya.

Menjalankan program aplikasi, perlu juga memerhatikan ketersediaan alat kerja, seperti komputer, kesiapan *server*, dan aspek lainnya. Isman menyarankan, agar BPP Kemendagri menyewa satu *server* berkapasitas besar untuk menampung semua kebutuhan unit kerja. Tidak seperti sekarang yang pengelolaannya masih terpecah di setiap unit kerja. “Kita integrasikan,

yang sewa *server* sekretariat berapa, pusat-pusat (Puslitbang) berapa, sewa yang *gede* sekalian,” katanya.

Dengan pengelolaan yang terpusat pada satu *server*, diyakini dapat mempercepat akses layanan. Selain itu, keamanan data juga lebih terjaga, hingga muaranya bisa menjadi penyimpanan data besar *kelitbangan*. “Pimpinan kalau minta data ke satu sumber saja, *nggak* minta ke sini, ke situ,” jelasnya.

Di beberapa daerah *e-kelitbangan* telah diterapkan, seperti yang dilakukan Provinsi Sumatera Barat. Isman menyebutkan, tahun ini Puslitbang Inovda berencana mereplikasi *e-kelitbangan* dari daerah tersebut. Replikasi tersebut dimungkinkan, apalagi daerah juga mengacu pada Permendagri No 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Isman sudah mengusulkan agar aplikasi itu dikembangkan, dengan mengintegrasikan *e-survey*. Sehingga setiap kegiatan *kelitbangan* dapat menjangkau lokus secara luas. “Misalnya BPP Kemendagri akan melakukan survei, misal hanya terbatas lima provinsi, kenapa tidak seluruh provinsi saja, ketika *e-kelitbangan* itu ada,” katanya.

Namun jika mengembangkan aplikasi *e-kelitbangan* yang dimiliki BPP Kemendagri menjadi pilihan terbaik ketimbang mereplikasi aplikasi dari daerah, pihaknya juga siap memberikan kontribusi. Kendati demikian, ia mengusulkan agar sistem *e-kelitbangan* diperbarui dengan memasukkan *e-survey* sebagai bagian dari menu *e-kelitbangan* dan digunakan secara nasional. Bahkan, jika memungkinkan layanan itu dapat diakses oleh kementerian lainnya.

Kepala BPP Kemendagri Dodi Riyadmadji menilai, belum maksimalnya penerapan aplikasi disebabkan belum terbangunnya kesadaran secara penuh pada setiap individu. Aplikasi, lanjut Dodi, hanya sebuah alat yang bakal dimanfaatkan oleh setiap perangkat kerja. Sehingga cepat lambatnya penerapan bergan-

tung pada masing-masing individu. “Pelaku-pelakunya itu yang belum sadar betul, bagaimana mengerjakan sesuai aturan yang sudah ada,” katanya.

Mengacu *road map* reformasi birokrasi, hal yang perlu dibenahi di Kemendagri terutama pokok kerja BPP Kemendagri, yakni salah satunya memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada masyarakat. Dodi menyebutkan, dibanding negara lain seperti Vietnam, pelayanan publik di Indonesia masih terbilang rendah. Untuk itu, ia mengajak perangkat BPP Kemendagri meninggalkan zona aman dan berpikir menemukan strategi pelayanan yang cepat, misalnya dengan mempelajari program digital. “Bapak Jokowi saya kira sudah mulai ketularan dengan bagaimana mempermudah layanan itu, meski perubahan di luar lebih cepat daripada yang dilakukan timnya Bapak Jokowi,” katanya.

Ihwal *e-kelitbangan* yang belum berjalan, dirinya mempertanyakan sosialisasi yang selama ini dilakukan. Untuk itu dirinya mengimbau, agar sosialisasi dilakukan secara maksimal. “Ayo sosialisasi yang matang, lalu kemudian kawan-kawan di pusat (Puslitbang BPP Kemendagri) istilahnya untuk mengikutinya. Kalau sudah ada pola terdigitalisasi mestinya menggapangkan, tetapi kadang-kadang orang masih malas untuk mengikuti seperti itu,” katanya.

Ia mengaku, instruksi untuk menerapkan layanan digitalisasi sudah disampaikan sejak 2017 secara tegas. Namun, masih ada perangkat kerja yang belum menyadari pekerjaan sesuai peraturan yang ada. Sebelum purna tugas dirinya ingin memperbaiki komputerisasi di BPP Kemendagri. Sampai sekarang pembenahan tersebut masih terus berjalan. Adapun aplikasi yang perlu dikembangkan, dapat dilakukan seiring berjalannya waktu penerapan. Dengan demikian, kelemahan program bakal diketahui dan memudahkan langkah pembenahan. “Mudah-mudahan sebelum pensiun ada perubahan yang bisa diberikan,” katanya.

■ MUJAEANI

# IMAJI MEMBENAH STRUKTUR

Aspek kelembagaan menjadi bagian penting dari delapan area perubahan reformasi birokrasi. Salah satu hal penting dalam kelembagaan adalah struktur organisasi. Oleh karenanya, guna meningkatkan kualitas tugas dan fungsi, setiap instansi pemerintah dituntut terus berbenah dalam menerapkan struktur organisasi yang ideal.

Kondisi ini disadari Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (BPP Kemendagri) Dodi Riyadmadji. Menurutnya, struktur organisasi BPP Kemendagri masih perlu dibenahi. Sebagai lembaga fungsional, saat ini BPP Kemendagri justru lebih kuat di wilayah struktural. Sedangkan peran peneliti yang menjadi pejabat fungsional masih belum optimal. Dengan demikian, Dodi mengajak semua pihak untuk melakukan pembenahan dalam rangka memperkuat jabatan fungsional di BPP Kemendagri. Melalui jabatan fungsional yang kuat, ia membayangkan jabatan struktural dapat dirampingkan. "Silahkan tinggalkan zona nyaman, bentuk organisasi yang fungsionalnya diperkuat dan strukturalnya semakin diminimalisasi," katanya.

Dodi menambahkan, sebaran peneliti di BPP Kemendagri masih belum maksimal. Di mana tingkat peneliti yang rendah masih mendominasi jabatan. "Sambil jalan perubahan-perubahan ini (struktur organisasi) segera untuk diprogramkan," katanya.

Senada dengan Dodi, **Kepala Bagian Perencanaan Muhammad Noval Labadjo** mengatakan, tugas fungsi BPP harus dipertegas, salah satunya dengan menata struktur organisasi sesuai peran lembaga fungsional. Sebagai lembaga yang menghasilkan rekomendasi

kebijakan, upaya untuk mencapai hasil yang berkualitas mesti ditingkatkan. "Karena ujung tombak kita *kan* menghasilkan rekomendasi dalam rangka input penyusunan hasil kebijakan," katanya.

Dalam meningkatkan peran kelitbangan, lanjut Noval, mestinya BPP Kemendagri memiliki unit kerja yang mengoordinasikan data hasil kelitbangan. Unit kerja itu serupa badan pusat statistik yang hanya fokus menghimpun data kelitbangan. Selain itu, penataan juga perlu dilakukan di masing-masing pusat penelitian dan pengembangan (puslitbang) BPP Kemendagri. Langkah itu agar menghasilkan rekomendasi yang berorientasi pada lahirnya inovasi kebijakan berdasarkan peran masing-masing puslitbang. Ia menekankan, melahirkan inovasi kebijakan bukan hanya tugas Puslitbang Inovasi Daerah, tetapi seluruh puslitbang BPP Kemendagri. "Misalnya (Puslitbang) Pembangunan dan Keuangan Daerah, dia harus melahirkan kebijakan inovatif yang membantu teman-teman di Ditjen Bina Keuangan Daerah," katanya.

Selain itu, permasalahan yang menimpa BPP Kemendagri adalah pencantuman nomenklatur tugas fungsi masing-masing puslitbang yang belum jelas. Noval menyebutkan, tugas fungsi ini ditulis hampir serupa hanya mengganti nomenklatur unit kerja. Se-



■ Kepala BPP Kemendagri Dodi Riyadmadji

hingga, nantinya perlu ada perbaikan dengan mencantumkan spesifikasi peran Puslitbang yang krusial dalam kelitbangan. Ia mencontohkan, Puslitbang Otonomai Daerah Politik dan Pemerintah Umum yang memiliki tugas menyusun naskah perkiraan strategis nasional (Kirstanas). Redaksi itu mestinya dicantumkan dalam tugas fungsi Puslitbang Otonomai Daerah Politik dan Pemerintah Umum. Dirinya menginginkan, Biro Organisasi dan Tata Laksana lebih detail dalam membuat struktur organisasi, khususnya tugas dan fungsi masing-masing unit kerja terutama di eselon dua.

Sementara itu, Kepala Bagian Fasilitas Reformasi Birokrasi Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Jenderal Kemendagri, Budi Utomo, mengapresiasi rencana BPP Kemendagri yang hendak membenahi struktur organisasinya. Ia mengamini komposisi BPP mestinya lebih mengarah pada organisasi fungsional, tidak seperti sekarang yang identik dengan organisasi

struktural. Kondisi itu menjadi catatan penting Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku evaluator reformasi birokrasi. Dengan adanya perubahan itu, menurutnya dapat meningkatkan capaian angka reformasi birokrasi Kemendagri. "Kalau untuk organisasi (yang mendapat catatan) hanya BPP, karena organisasi BPP itu *kan* sebenarnya organisasi fungsional," katanya.

Budi menjelaskan, tipologi organisasi fungsional yang cukup ideal dapat melihat struktur organisasi Inspektorat Jenderal Kemendagri. Di mana mereka hanya menempatkan jabatan struktural di bagian sekretariat. Sedangkan masing-masing inspektorat wilayah, ditopang oleh inspektur yang langsung membawahi fungsional dibantu kasubbag tata usaha. Komposisi itu dapat diterapkan di BPP Kemendagri. Misalnya, setiap Puslitbang dipimpin Kepala Pusat yang membawahi langsung peneliti dengan dibantu Kasubbag Tata Usaha. Secara pribadi, lanjut Budi, posisi eselon tiga dan empat, dalam hal ini Kepala Bidang, dan Kepala Subbidang di Puslitbang dapat dikesampingkan.

Di internal Puslitbang nantinya memiliki ketua tim yang membawahi peneliti lainnya, posisi ini dapat digunakan sebagai pengendali kualitas dari kajian. "Jadi begitu Kepala Pusat langsung peneliti, peneliti utama, madya, muda, pertama," katanya.

Kondisi BPP Kemendagri yang lebih didominasi jabatan struktural dikawatirkan membuat peran peneliti tidak optimal dalam menuangkan gagasan. Padahal, sebagai organisasi fungsional peran peneliti harus lebih mendominasi. "Yang harus kita benahi dulu untuk lembaga BPP, kalau kita mau dia jadi lebih progresif yang fungsional itu yang jadi nomor satu," katanya.

Dia menyangkan peran pengendali teknis mutu penelitian justru dilakukan oleh pejabat struktural. Jika mengacu pada tata kelola yang benar hal itu justru keliru. Sebab, yang mengetahui kualitas riset bukan pejabat struktural, melainkan peneliti senior. "Kalau kualitas riset yang menentukan struktural, sedangkan strukturalnya misalnya dia tidak mempunyai *basic* peneliti, *wah* mau jadi apa risetnya," katanya.

Budi menuturkan, dengan manajemen yang kurang baik akan berdampak pada publikasi riset yang tidak maksimal. Hal itu dapat dilihat, misalnya dalam setahun seberapa banyak riset BPP Kemendagri yang terpublikasi. Di sisi lain, dirinya mengaku pernah menghadiri bedah buku di BPP Kemendagri. Awalnya ia menduga buku yang dibahas merupakan karya peneliti internal. Namun, nyatanya buku yang dibedah merupakan hasil peneliti dari pihak luar. Padahal, ruang sejenis itu dapat dimanfaatkan sebagai wadah eksistensi bagi peneliti BPP Kemendagri. "Bagi saya ruang itu bisa dimanfaatkan peneliti (BPP), hasil riset mereka bisa dijadikan satu buku," katanya.

## Kebijakan internal

Budi menjelaskan, pembenahan desain organisasi sepenuhnya merupakan otoritas internal komponen. Pihaknya tidak bisa terlibat terlalu jauh, kecuali ada intruksi langsung dari Men-

dagri. Meski skema pembagian tugas dan fungsi kewenangan berasal dari atas ke bawah. Namun terkait desain kelembagaan, skema itu tidak dapat digunakan. Biro Organisasi dan Tata Laksana harus menghormati otoritas yang dimiliki eselon satu masing-masing komponen. Selain itu, selama ini asistensi yang diberikan kepada lembaga/kementerian lebih ditekankan pada usulan internal komponen yang bersangkutan. "Kalau ada wacana seperti itu (perubahan desain organisasi) harusnya *bottom up* (dari bawah ke atas), misalnya dari BPP sendiri yang melakukan pengkajian," katanya saat ditemui di ruang kerjanya belum lama ini.

Kendati demikian, sebenarnya wacana perubahan desain organisasi BPP itu sudah bergulir sejak beberapa waktu. Namun, wacana itu tidak bisa menjadi acuan sebagai penerapan kebijakan. Budi mengaku, selama menjabat hampir dua tahun di Biro Ortala belum pernah mengetahui surat resmi yang diajukan BPP Kemendagri terkait dengan usulan perubahan desain organisasi. Oleh karenanya, jika perubahan itu menjadi agenda serius BPP, bisa dilakukan dengan pernyataan sikap secara resmi. "Harus ada surat resmi misalnya ke Bapak Sekjen, usulan penataan organisasi BPP Kemendagri 2020-2024," katanya.

Selain itu, untuk mewujudkan rencana ini, bisa saja Kepala BPP Kemendagri mengumpulkan semua sekretaris dan kepala pusat untuk menyusun organisasi BPP lebih progresif. Namun yang perlu diperhatikan, Kepala BPP juga perlu memikirkan proyeksi penempatan jabatan struktural yang terencana dampak. Guna mawadahi hal itu, Budi menyebutkan beberapa skema yang dapat dilakukan Kepala BPP Kemendagri. Pertama, memberikan pilihan kepada pejabat struktural untuk pindah ke posisi fungsional. Kedua, menyediakan pilihan untuk ditempatkan sebagai pelaksana. Ketiga, pejabat struktural yang terdampak dapat diakomodasi ke komponen lain.

■ MUJAJENI

## PEMETAAN KOMODITAS UNGGULAN MENJADI PRIORITAS

Jika dilihat dari letak geografisnya, Kabupaten Garut merupakan daerah penting di Jawa Barat. Selain memiliki potensi ekonomi tinggi dan penyangga ibukota Jawa Barat, Garut dianggap paling mewarisi sejarah dan budaya Parahyangan. Garut juga dikenal sebagai *Switzerland van Java*, yang merepresentasikan keindahan bumi Parahyangan. Kendati cukup potensial, namun Garut masih betah dengan tingkat kesejahteraan yang rendah. Memang, Garut cukup berhasil menjadi daerah di Jawa Barat yang paling cepat dalam pembangunan manusia, serta menyumbang kenaikan indeks pembangunan manusia (IPM) Jawa Barat pada 2018. Tetapi faktanya IPM Garut masih berada di urutan ke-25 dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat.

Kenyataan demikian juga diakui Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Garut Agus Kurniawan saat ditemui Juni lalu di Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Garut. Ia mengatakan banyak tantangan pemerintah untuk membangun kabupaten yang berada di timur Jawa Barat ini. Potensi besar yang dimiliki Garut menurut Agus selama ini belum berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakatnya.

Kabupaten Garut mencatat, hingga 2018 tingkat pengangguran dan kemiskinan di Garut masih tinggi sekira 9,27 persen dan 7,07 persen. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Garut juga diikuti oleh angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per/kapita yang rendah yaitu hanya

Rp18,53 juta. Padahal PDRB Jawa Barat mencapai Rp37,18 Juta. Semakin parah ketika kapasitas keuangan daerah Garut juga rendah yaitu hanya sebesar 15,66%. Garut juga menjadi daerah yang selalu gagal memenuhi target PAD setiap tahunnya. Bahkan pada 2017, PAD Garut hanya mencapai Rp12 miliar saja dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp50 miliar.

“Ini menjadi tantangan kita saat ini. Padahal Garut memiliki banyak potensi ekonomi yang besar terutama di sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan. Sektor penyumbang terbesar terhadap PDRB. Begitu juga dengan industri pengolahan, akomodasi dan pariwisata, yang saat ini menjadi sektor yang mulai mengalami tren peningkatan kontribusinya terhadap PDRB. Selain itu juga masih ada beberapa sektor potensial seperti agribisnis (*agriculture*), pariwisata (*tourism*), perindustrian perdagangan (*industrial and trade*), peternakan, perikanan & kelautan (*fishery and livestock*), serta perkebunan (*plantation*),” ungkap Agus ketika berdiskusi.

Selain Agus, Bambang Heri Susanto, Kabid Ekonomi dan SDA Bappeda sadar, banyaknya tantangan dan permasalahan di Garut saat ini, adalah peluang bagi lembaga penelitian dan pengembangan untuk memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah. Lembaga penelitian bisa menjadi *leading sector* perencanaan pembangunan, mengingat semua kebijakan harus didasarkan pada akurasi data dan penelitian. “Lembaga kelitbang seperti Bidang Litbang, saat ini memiliki peran utama dalam mengkoordinasi semua bentuk inovasi di daerah se-



bagaimana tuntutan PP No 37 tentang Inovasi Daerah,” ucapnya.

Hanya saja, sejauh ini kinerja Bidang Litbang Bappeda Garut belum kentara. Program utama masih lebih banyak program perencanaan. Kegiatan penelitian belum banyak dilakukan. Kalau pun ada dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Pasalnya, Bidang Litbang Garut belum memiliki fungsional peneliti.

Tidak adanya peneliti bisa saja menjadi salah satu faktor penyebab kinerja Bidang Litbang Kabupaten Garut tidak terlihat nyata. Sumber daya manusia di banyak lembaga kelitbang di daerah selama ini memang menjadi faktor penghambat kinerja lembaga penelitian dan pengembangan. Jika pun ada produktivitas yang dihasilkan mereka

sangat minim.

Permasalahan-permasalahan tersebut tidak membuat patah semangat bagi Bidang Litbang Bappeda Garut. Justru masalah adalah modal untuk menjadikan lembaga kian maju. Semangat tersebut tidak hanya dalam menyelesaikan permasalahan internal, tetapi yang lebih besar seperti harapan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Garut dengan harapan melebihi laju ekonomi Jawa Barat.

“Fungsi kelitbang masih menyatu dalam perencanaan, seperti penyusunan RKPD, RPJMD, kita juga yang dorong. Cukup berat jika harus dengan perencanaan. Makanya kita akan dorong agar ada satu Bidang baru di BAPPEDA yaitu Bidang Evaluasi dan Perencanaan. Sehingga kelitbang

bisa fokus dan optimal. Kedua-duanya bisa jalan bersamaan,” tambah Agus.

### Potensi ekonomi

Upaya memaksimalkan potensi ekonomi daerah juga dilakukan dengan merumuskan prioritas pembangunan 5 tahun yang akan datang melalui *roadmap* penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Bidang Litbang mengklasifikasi potensi daerah dari berbagai sektor. Prioritas potensi daerah tersebut kemudian dituangkan dalam Rencana Induk Kelitbang (RIK) yang akan disusun pada tahun ini.

Pertanian di Garut menurut Agus memang menjadi prioritas utama dalam peningkatan potensi ekonomi 5 tahun yang akan datang. Kabupaten Garut masih mengandalkan sektor pertani-

an sebagai penggerak perekonomian masyarakat. Sektor ini telah berperan besar dalam pembangunan Kabupaten Garut, baik terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penyediaan lapangan kerja, sumber pendapatan masyarakat, dan ketahanan pangan.

Pemetaan potensi pertanian, misalnya, dilakukan dengan pengembangan agribisnis tanaman pangan, sayuran, dan buah-buahan unggulan seperti jeruk dan alpukat. Pengembangan potensi ekonomi juga dilakukan terhadap tanaman semusim seperti akar wangi. Rakhmat Jatnika Kabid Hortikultura Dinas Pertanian mengatakan produksi akar wangi tahun 2016 mencapai 350 ton atau mengalami kenaikan dari tahun 2015 yang mencapai 71 ton.

“Permasalahannya, pada umumnya para petani akar wangi kurang memerhatikan aspek lingkungan, sehingga masih banyak yang mengusahakan akar wangi di DAS yang sedang menjadi daerah penghijauan/reboisasi, daerah yang berfungsi hidrologis, dan di daerah dengan kemiringan lebih dari 15 persen,” tutur Rahmat.

Pegiat akar wangi di Kabupaten Garut Yusuf Mulyana yang ditemui Media BPP di Bappeda menyayangkan pemasaran akar wangi saat ini sangat lemah. Rahmat juga mengamini jika masih terdapat beberapa kelemahan pengembangan budidaya tanaman tersebut, padahal bisa diekspor. “Beberapa kelemahannya, misalnya, modal usaha, lokasi usaha tani dan pasar akar wangi, lemahnya kelembagaan pengolahan dan pemasaran minyak akar wangi, pada umumnya, unit usaha penyulingan akar wangi belum mengetahui standar teknis produksi dan kualitas produk yang sesuai dengan permintaan pasar dunia. Apalagi sampai pada kriteria spesifik, seperti untuk industri obat-obatan dan produk kosmetik,” tambahnya.

Selain tanaman semusim pengembangan dilakukan juga terhadap tanaman tahunan seperti kopi. Kopi merupakan salah satu komoditi unggulan di kabupaten Garut, yang mempunyai peranan penting sebagai salah satu penghasil

devisa negara, sumber pendapatan, dan penciptaan lapangan kerja.

Dari sektor peternakan, Domba Garut menjadi list utama. Kabupaten Garut merupakan salah satu sentra produksi domba di Jawa Barat setelah Kabupaten Bandung. Domba menyebar secara merata di seluruh wilayah. Selain domba Garut, budidaya udang *vanamei* merupakan prospek yang cukup bagus untuk dikembangkan di pantai selatan Garut, hal ini didukung oleh kondisi perairan yang belum tercemar bila dibandingkan dengan perairan pantai utara Jawa.

Budidaya udang *vanamei* belum dapat menyentuh para pelaku usaha dengan modal investasi kecil. Budidaya justru banyak dilakukan oleh para pengusaha yang memiliki modal besar dan berasal dari luar Kabupaten Garut yang menguasai kegiatan usaha dari hulu sampai hilir, dari proses budidaya sampai jaringan pemasaran.

“Permasalahan penting lainnya adalah kurangnya pengetahuan dan keterampilan budidaya udang *vanamei*, memerlukan modal usaha yang besar, kurangnya keinginan usaha yang memerlukan proses dengan waktu yang cukup lama. Selanjutnya sebagian

besar masyarakat tidak memiliki lahan yang cukup besar untuk budidaya udang *vanamei*, dan belum adanya percontohan kegiatan budidaya udang *vanamei* pada skala usaha kecil di masyarakat,” jelas Irvan Kasie Sarana Prasarana Perikanan Budidaya Dinas Perikanan dan Peternakan.

### Ekonomi kreatif

Dalam hal ekonomi kreatif Garut juga menyimpan potensi unggulan seperti keberadaan Batik Garutan. Namun, gaung Batik Garutan tersebut tidak lagi setenar dulu. Rajib salah satu pengrajin batik Garut mengeluhkan lambannya regenerasi pembatik. Padahal pasar batik di Indonesia sedang tumbuh. Tak ayal hingga kini jumlah perusahaan batik lokal khas Garut bisa dihitung jari.

Menurut Rajib, pasar batik tulis Garut memiliki pangsa pasar tersendiri, sehingga bagi sebagian orang, kualitas dan keunggulan batik tulis asal kota dodol ini, tidak diragukan lagi. Minat generasi muda untuk terjun membesarkan batik lokal buatan dalam negeri terus menurun. Tidak mengherankan dalam beberapa kali pelatihan pembatik yang ia gelar bersama pemerintah daerah Garut, hanya 20 persen

yang akhirnya memilih hidup menjadi pembatik.

“Kita kekurangan sumber daya manusia, harus ada pelatihan, kemudian direkrut menjadi pegawai. Saya hanya memiliki 8 pembatik. Itu masih kurang. Kalau melihat dari pasar yang ada, baik Garutan banyak peminat bahkan hingga ke luar negeri,” ucapnya.

Ia berharap pemerintah bisa melakukan rekrutmen pembatik dan melakukan pembinaan sehingga minat pembatik kian tumbuh. “Perajin di Garut ada 8, kalau dengan penjual ada 30-an harusnya banyak lagi. Malah kalau bisa seperti di Cirebon, semakin banyak semakin bagus,” kata Rajib.

Harapan Rajib, petani akar wangi, dan Irvan menjadi catatan bagi Bidang Litbang. Potensi daerah yang telah dipetakan dalam *roadmap* beserta permasalahan-permasalahannya adalah modal untuk yang cukup bagi Bidang Litbang Bappeda untuk bergerak, menyusun program dan memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran bagi pemerintah setempat. Dengan begitu, tidak ada alasan bagi lembaga kelitbang di daerah sulit berkembang.

■ SAIDI RIFKY

## DARI PETIK JERUK HINGGA MINUM KOPI

*Media BPP juga berkesempatan mengunjungi beberapa sentra pengembangan komoditas unggulan di Garut. Di antaranya Wahana Kampung Jeruk Bosaga di Kecamatan Samarang dan Mahkota Java Coffee Garut di kaki Gunung Cikuray.*



Cuaca terik Garut siang itu seketika berganti hawa sejuk ketika *Media BPP* memasuki Wahana Kampung Jeruk Bosaga yang berada di Kecamatan Samarang, Garut, Jawa Barat Juni lalu. Dadan (45) mengantarkan kami memasuki kebun jeruk seluas 2 hektare tersebut. Ia banyak bercerita tentang produksi jeruk jenis jeruk keprok atau yang lebih dikenal jeruk Garut yang minim jika dibandingkan dengan varietas jeruk lainnya yang dikembangkan di Garut. Sambil bercerita ia mempersilakan kami memetik dan mencicipi langsung buah jeruk dari pohonnya. Ia juga mengajak kami berkeliling menunjukkan berbagai jenis jeruk yang ia produksi.

Bersama kelompoknya, Dadan mengembangkan tiga varietas jeruk yaitu keprok (garut), siem, dan cokun. Berbeda dengan siem dan cokun, jeruk keprok memiliki rasa yang enak

■ **DADAN**, Pemilik wahana kampung Jeruk Bosaga. Ia meneruskan usaha keluarganya sejak beberapa tahun silam.

dengan rasa manis yang pas, serta berukuran besar. Perawatan jeruk jenis ini juga berbeda dengan jeruk lainnya yakni lebih sulit.

“Jika jeruk siem dan cokun jenis pohonnya pendek-pendek, jeruk keprok lebih tinggi, memetikinya harus dengan tangga. Begitu juga perawatannya yang agak sulit. Misalnya, kontur tanah yang tidak boleh terlalu kering dan juga terlalu basah, memetikinya pun harus hati-hati,” ucapnya.

Selain itu, perawatan jeruk keprok juga memerlukan biaya yang tidak murah. Misalnya, untuk satu pohon membutuhkan biaya Rp 200 ribu s/d Rp 500 ribu hingga panen. Jenis jeruk keprok juga saat ini dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan jeruk lokal. “Di

Garut saja untuk jenis jeruk Garut belum bisa dijual ke luar. Kadang, di sini saja sudah habis, sama pengunjung,” tambah Dadan.

Jeruk saat ini memegang peran penting sebagai komoditas unggulan Kabupaten Garut. Terdapat 1.400 hektare lahan pertanaman jeruk di Garut dengan jenis jeruk yang beragam, meliputi jeruk siem, keprok (Garut), konde, dan jeruk orange priangan.

Garut juga pernah menjadi kota penghasil jeruk dengan jumlah tanaman mencapai 1,3 juta pohon. Saat ini pemerintah mencanangkan kembali agar jeruk menjadi produk unggulan dan menjadi salah satu subsektor tanaman pertanian karena prospektif dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi.

Wahana Kampung Jeruk Bosaga yang dikelola Dadan tidak hanya memproduksi ketiga jenis jeruk di atas, ia juga mengembangkannya dengan membuka wisata edukasi petik jeruk. Wisata edukasi ini berkonsep *Eptilu-fresh from farm*, seperti merek setiap kemasan yang ia buat untuk setiap pengunjung yang memetik dan memakannya langsung di kebun.

Cerita Dadan dalam melestarikan budidaya jeruk khas Garut sekaligus menjadi catatan bagi pemerintah agar tidak ada lagi alasan bagi pemerintah setempat dalam mendukung pengembangan komoditas jeruk. Selanjutnya perhatian dan sinergitas pemerintah sangat dibutuhkan dalam pengembangan kawasan Jeruk yang berorientasi ke arah agrowisata.

Dadan juga berharap ada investor yang bisa memberikan modal untuk pengembangan jeruk khas Garut. Menurutnya pengembangan agrowisata jeruk bisa dikembangkan ke arah wisata kuliner atau bahkan produksi bibit jeruknya. Di sisi lain, Jeruk Garut mempunyai peluang tinggi untuk terus dikembangkan karena keunggulan komparatif dan kompetitifnya serta adanya peluang yang masih terbuka luas.

“Dengan berbagai usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksinya, Jeruk Garut



akan mampu bersaing seperti halnya Jeruk Medan, Jeruk Pontianak serta jeruk impor seperti Jeruk Mandarin dan New Zealand,” ucapnya.

### Kopi Garut yang mendunia

Potensi pertanian Garut juga tidak hanya jeruk. Dari aspek perekonomian, ternyata Garut juga memiliki salah satu sumber bernilai ekonomis tinggi, salah satunya kopi. Garut sudah terbukti sebagai salah satu penghasil kopi Arabika terbaik di dunia. Kopi Arabika Garut juga tengah menjadi perbincangan beberapa tahun terakhir ini. Pasalnya, kopi Arabika Garut merupakan jenis kopi terbaik di Jawa Barat. “Dataran tinggi Garut cocok dengan Arabika, sementara untuk daerah pantainya cocok untuk Robusta,” ucap Hari Yuniardi pendiri Mahkota Java Coffee yang ditemui *Media BPP* di Garut beberapa waktu lalu.

Kami bertemu langsung dengan Hari di Mahkota Java Coffee. Suasana malam itu terasa dingin, cukup maklum karena lokasinya berada di Kecamatan Bayongbong, tepat di kaki gunung Cikuray. Namun, dengan secangkir kopi Arabika membuat suasana menjadi hangat. Rasa dan aroma kopi yang nikmat, membuat diskusi semakin akrab.

Hari membeberkan rahasia cita rasa kopinya yang dikenal mendunia. Menurutnya kunci dari cita rasa kopi itu adalah proses pengolahan dari hulu sampai hilir. Pengolahannya harus benar-benar baik. Mulai dari pemilihan buah kopi (ceri), biji kopi mentah (*green bean*) dan gabah (*parchment*) harus diolah dengan baik. “Kalau salah dari awal, maka akan salah sampai akhir,” ucapnya.

Ia juga menerapkan standar sangat tinggi terhadap para pegawainya dalam melakukan pengolahan, hingga bisa menyajikan kopi dengan cita rasa yang luar biasa dan diakui oleh para ahli cita rasa kopi dunia. “Dalam beberapa tahun terakhir kita menerima banyak kunjungan dari beberapa negara, pernah ada Special Tea Coffee Association Europe dan pernah juga



■ Hari Yuniardi (Tengah), pendiri Mahkota Java Coffee yang ditemui *Media BPP* di Garut beberapa waktu lalu

kedatangan ahli cita rasa kopi Cupping Taste dari Korsel. Intinya mereka memberikan pujian,” terangnya.

Hari juga pernah mengeksport produksi kopinya ke Taiwan. Terakhir ia mengeksport 22 ton kopi. Saat ini ia juga masih menjadi pemasok kopi Arabika untuk beberapa kedai kopi di Indonesia. Jika dibanding dengan pembisnis kopi lainnya yang ada di Garut, Hari bisa dibilang cukup sukses. Pasalnya, Mahkota Java Coffee merupakan bukan yang pertama yang mengembangkan kopi di Garut.

Kegigihan Hari dalam mengangkat kopi Garut menjadi mendunia perlu diberikan apresiasi. Ia juga turut membantu memberdayakan warga sekitar khususnya petani kopi di Garut. Menurut Hari, jika kopi di Garut banyak diminati, yang paling sangat diuntungkan adalah petani. Karena petani kopi sudah mengetahui harga pasaran kopi di dunia secara langsung. Berbeda dengan sayuran yang biasanya harga dari petani berbeda jauh dengan harga jual di pasaran. Jika petani untung, ia sebagai pengepul cukup bahagia, meski dirinya *lah* yang menurutnya paling banyak risiko. Hari berharap pengembangan lahan kopi di Garut semakin



banyak lagi.

Perhatian Pemerintah Jawa Barat terhadap komoditas unggulan seperti kopi cukup tinggi. Pemerintah Kabupaten Garut semestinya melihat peluang tersebut. Jutaan bibit kopi yang dibagikan setiap tahun oleh Pemerintah Jawa Barat seharusnya bisa memperluas areal tanaman kopi di Garut. Sehingga tingkat produktivitas kopi Garut semakin tinggi. Selain itu pengolahan produk hilir kopi harus dilakukan secara intensif. Sehingga peluang untuk memperoleh nilai tambah (*added value*) serta penciptaan lapangan pekerjaan di perdesaan bisa optimal.

■ SAIDI RIFKY

## PERLUNYA MEMBUKTIKAN EKSISTENSI KERJA

Tahun ini Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kota Mojokerto terancam digabung ke dalam struktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mojokerto. Wacana ini bergulir diduga akibat adanya penghematan anggaran dan anggapan kurang terlihatnya peran BPP Kota Mojokerto dalam menunjukkan eksistensinya. Kendati demikian, BPP Kota Mojokerto masih berharap rencana tersebut tidak dilaksanakan.

Sejak berdiri pada 2001, BPP Kota Mojokerto belum memiliki peneliti. Kondisi ini menjadi persoalan serius dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Selama menjalankan tugas berupa kajian, BPP Kota Mojokerto lebih mengandalkan kerja sama dengan instansi yang memiliki profesi di bidang penelitian. Kerja sama itu misalnya dengan menggandeng perguruan tinggi baik di Jawa Timur maupun daerah lainnya.

Kekurangan sumber daya manusia itu sebenarnya sudah dilaporkan beberapa tahun sebelumnya ke pihak terkait, harapannya agar mendapat tambahan tenaga kerja. Setidaknya kondisi itu tercatat pada naskah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dari 2015-2018 yang diterima *Media BPP*. Namun, BPP Kota Mojokerto tidak tahu secara jelas tindak lanjut dari laporan tersebut. Kondisi ini semakin sulit, ketika beberapa perangkat kerja purna tugas bahkan dipindahkan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya. “Kita sudah usulkan ke BKD (Badan Kepegawaian Daerah) tetapi tidak ada tindak lanjut,” kata Heru Tri Yuwono, Sekretaris BPP Kota Mojokerto, Kamis (27/6).

Heru mengatakan, setiap tahun jumlah kajian yang dilakukan BPP Kota Mojokerto bervariasi, tergantung pada usulan dan anggaran yang diberikan. Misalnya, pada 2017 BPP Kota Mojokerto mengerjakan 9 kajian, 2018 sebanyak 5 kajian. Sedangkan tahun ini, BPP Kota Mojokerto ditargetkan mengerjakan 13 kajian dengan alokasi anggaran yang beragam.

Selama ini hasil kajian yang dilakukan BPP Kota Mojokerto masih berupa buku dengan sebaran ke wali kota dan OPD terkait. Meski ada juga beberapa hasil kajian yang diketahui terpublikasi di jurnal perguruan tinggi. Namun, secara keseluruhan, laporan dimuatnya hasil kajian ke dalam jurnal ilmiah belum diketahui secara jelas.

Pemimpin Redaksi Jurnal BPP Kementerian Dalam Negeri, Moh Ilham A Hamudy mengatakan, untuk bisa mempertahankan posisi kelembagaannya, BPP Kota Mojokerto mesti mampu membuktikan eksistensi kerjanya. Salah satu bukti yang bisa ditunjukkan adalah dengan memublikasikan hasil kajian ke dalam jurnal ilmiah. Terlebih kewajiban penerbitan itu diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam



Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Oleh karenanya, kerja sama dengan pihak ketiga seperti perguruan tinggi mestinya mengatur keharusan menerbitkan hasil kajian yang dilakukan. Adapun publikasi itu harus mengatasnamakan BPP Kota Mojokerto selaku donator pembiayaan kajian. “Itu jurnalnya tidak mesti di sini (BPP Kota Mojokerto), bisa juga di Universitas Brawijaya, ITS (Institut Teknologi Surabaya), atau di Universitas Airlangga,” katanya saat berkunjung ke BPP Kota Mojokerto.

Selain sebaran publikasi hasil penelitian, bukti lainnya bisa berupa jumlah telaah hasil kajian dari Kepala BPP Kota Mojokerto ke berbagai pihak, seperti sekretaris daerah, wali kota, atau OPD terkait dengan merekomendasikan langkah kebijakan yang perlu diambil atas berbagai fenomena yang ada.

Berbagai bukti yang dimiliki itu, dapat digunakan sebagai bahan argumentasi jika ada pihak seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempertanyakan peran BPP Kota Mojokerto. Namun, jika pembuktian itu tidak ada maka dengan mudah kebijakan seperti penggabungan ke dalam struktur Bappeda dapat dilakukan. “Kalau *nggak* ada bukti itu susah untuk mempertahankannya,” katanya.

Ilham menambahkan, dalam rangka memberikan pemahaman pentingnya keberadaan BPP di daerah, selama ini BPP Kemendagri telah melakukan sosialisasi ke pemerintah daerah. Hal itu agar setiap kepala daerah paham dan perhatian terhadap BPP di lingkup kerjanya. Namun, pihaknya tidak dapat mencampuri lebih jauh setiap kebijakan masing-masing pemerintah daerah. Ia menyarankan, BPP Kota Mojokerto harus memaksimalkan target kajian tahun ini sebagai ajang pembuktian. “Kita kalau mau diakui, dilihat orang, tunjukkan dengan bukti eksistensi kerja,” katanya.

■ MUJAENI

**LEBIH DEKAT**

**MOHAMMAD FAISAL,**  
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia

**MEMETAKAN PERSOALAN EKONOMI DI INDONESIA**

DI NEGARA BERKEMBANG SEPerti INDONESIA, ISU EKONOMI MENJADI HAL YANG KRUSIAL. KEBERADAAN INFRASTRUKTUR DAN TINGKAT MASYARAKAT TERDIDIK DI NEGERI INI DINILAI MASIH TERTINGGAL KETIMBANG NEGARA MAJU. KENDATI DEMIKIAN, NEGARA BERKEMBANG SEPerti INDONESIA MEMILIKI POTENSI EKONOMI YANG DAPAT DITINGKATKAN. REALITAS INI MENUNTUN **MOHAMMAD FAISAL** MEMILIH MELAKONI KEILMUANNYA DI BIDANG EKONOMI UNTUK BERKONTRIBUSI KEPADA NEGARA.

**R**ekam jejak pendidikan Faisal terbilang gemilang. Terbukti, saat menyelesaikan strata satu Program Studi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 1998, Faisal berhasil menyabet gelar *Cum laude*, dan menjadi lulusan terbaik pada tahun yang sama. Tidak hanya itu, studi program magister dan doktoralnya ia tunaikan di masing-masing kampus yang berbeda di Australia, melalui jalur beasiswa. Ketertarikannya di bidang ekonomi sudah tumbuh saat menempuh pendidikan di ITB yang mempelajari multi disiplin ilmu seperti sosial, teknik, termasuk ekonomi. “Saya mengenal ekonomi dari S1, walaupun saya bukan dari jurusan ekonomi,” terangnya.

Selain pendidikan, karier bapak dua anak ini telah malang melintang di beberapa tempat. Di antaranya bank dunia, United Nations Population Fund (UNFPA), Economics Industry and Trade (ECONIT), ASEAN Sekretariat dan beberapa tempat lainnya dengan jabatan beragam. Lelaki kelahiran Balikpapan itu, kini aktif sebagai Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia. Lembaga independen ini bergerak di bidang penelitian dan



**Tempat Tanggal Lahir :**

Balikpapan, 1974

**Jabatan :**

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia

**Istri :**

Susiati Puspasari

**Anak :**

Faruq Abdul Fattah (14),

Fadhil Abdul Fattah (12)

**Pendidikan :**

S1 Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, ITB 1998

S2 Studi Pembangunan University of Melbourne, Australia 2006

S3 Ekonomi Politik University of Queensland, Australia 2013

konsultasi ekonomi, industri, perdagangan, pembangunan wilayah, dan kebijakan publik. Ditemui di kantornya, Senin (08/07), di daerah Tebet, Jakarta Selatan, Faisal banyak bercerita mengenai kondisi ekonomi di Indonesia, mulai dari persoalan sampai penanganannya.

Permasalahan mendasar yang kerap dialami Indonesia dalam menghadapi berbagai persoalan, termasuk ekonomi adalah semangat sinergitas antarsemua pihak. Sinergi itu meliputi lembaga pemerintahan dengan swasta, akademi, masyarakat, sampai politisi. “Juga antar-aktor di lembaga pemerintahan itu sendiri, itu menjadi tantangan yang paling besar menurut saya,” katanya.

Faisal menyebutkan, dalam membangun sinergitas, Indonesia memiliki tantangan yang tidak mudah dibanding negara lain. Selain, masih tingginya kesenjangan pendidikan dan ekonomi di tiap wilayah, secara kebudayaan Indonesia memiliki keberagaman yang kompleks antara satu daerah dengan daerah lainnya. Aspek politik juga tidak dapat dilepaskan dalam memengaruhi dinamika perkembangan ekonomi. Faisal menyebutkan, seringkali putusan kebijakan di berbagai bidang termasuk ekonomi dilakukan atas dasar pertimbangan politik. “Itu juga mengapa kemarin waktu S3 saya masuk ke *political economy*, karena saya melihat Indonesia memang peta politik itu sangat memengaruhi kebijakan,” kata Faisal yang mengenyam pendidikan doctoral di University of Queensland, Australia.

Kendati demikian, secara esensial pemerintah Indonesia dinilai telah melakukan banyak langkah perbaikan ekonomi, seperti membangun infrastruktur di berbagai tempat. Namun, yang tidak kalah penting, lanjut Faisal, adalah membentuk cara pandang pembangunan yang tidak mengacu pada Jawa sentris. Pandangan itu tidak hanya menyoal letak daerah yang dibangun, tetapi meliputi penanganan saat membangun. Ia menyayangkan, program yang dilakukan untuk daerah di Indonesia masih banyak yang me-

nganut Jawa sentris. Faisal mencontohkan, program dana desa yang memberikan kucuran anggaran ke setiap desa melalui penerapan skema tertentu. Penerapan program itu harus dilakukan dengan pendekatan yang merujuk pada lokalitas setiap desa. Dengan skema tertentu mungkin berhasil diterapkan di Jawa karena pemerintahan dan pendidikannya sudah berjalan baik. Tetapi tidak dipungkiri, skema serupa mungkin tidak bisa diterapkan di daerah luar Jawa, karena memiliki kondisi lapangan yang berbeda. “Saya rasa proses pendampingannya harus lebih intensif, harus lebih panjang, berbeda dengan yang ada di Jawa,” katanya.

Dengan demikian, pembangunan di daerah luar Jawa harus dilakukan dengan melihat kondisi setempat. Hal ini perlu dilakukan tidak hanya pada program dana desa. Tetapi meliputi berbagai kebijakan seperti pembangunan infrastruktur dan lainnya. Ia



“**SECARA ESENSIAL PEMERINTAH INDONESIA DINILAI TELAH MELAKUKAN BANYAK LANGKAH PERBAIKAN EKONOMI, SEPerti MEMBANGUN INFRASTRUKTUR DI BERBAGAI TEMPAT. NAMUN, YANG TIDAK KALAH PENTING, ADALAH MEMBENTUK CARA PANDANG PEMBANGUNAN YANG TIDAK MENGACU PADA JAWA SENTRIS.**”

menyebutkan, pembangunan di luar Jawa berbeda antara di Jawa baik dari segi harga, teknis, maupun tantangan masyarakatnya. Sehingga kondisi ini perlu dipahami oleh penyelenggara kebijakan. Pemahaman ini harus terus didorong, karena Faisal menilai aspirasi dari daerah dalam hal pembangunan belum tersalurkan dengan baik.

**Menekan urbanisasi**

Salah satu dampak pertumbuhan

ekonomi yang tidak merata antar-daerah adalah angka urbanisasi yang semakin tinggi. Di mana, banyak daerah yang ditinggalkan masyarakatnya karena dinilai tidak dapat memberikan kesejahteraan hidup. Sehingga langkah strategis perlu terus dilakukan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan. Pemerintah juga saat ini menggaungkan pembangunan Indonesia dari daerah pinggiran termasuk desa.

Faisal menyebutkan, salah satu ikhtiar pemerintah dalam memberikan perhatian kepada daerah pinggiran adalah membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang ditunjang dengan berbagai perlengkapan infrastruktur, seperti jalan dan keamanan. Dengan pembangunan itu, Faisal menilai dapat menumbuhkan rasa kebanggaan masyarakat sekitar terhadap daerahnya. Selain itu, dengan hadirnya berbagai fasilitas mestinya dapat mempermudah mobilitas antara dua negara.

Namun, agar memberikan manfaat yang lebih besar terutama di bidang ekonomi, pembangunan itu harus didukung dengan kebijakan lain. Faisal menyebutkan, dengan mobilitas yang mudah mestinya dapat mendukung perbaikan ekonomi di wilayah itu dengan memanfaatkan fasilitas yang ada. Oleh karenanya, pemerintah perlu mengkaji untuk mencari sektor andalan yang mampu dikembangkan dan menarik minat investor. “Bisa mempekerjakan banyak orang di daerah pinggiran, hasilnya bisa dipasarkan ke ibu kota, provinsi, Jawa, atau juga negara luar,” kata Faisal.

Sedangkan di perdesaan, pemerintah telah mengucurkan dana desa dengan harapan, desa mampu melakukan akselerasi pembangunan ekonomi untuk menurunkan angka kemiskinan secara cepat. Sebab, tanpa ada intervensi seperti itu, menurut Faisal, kota akan mengalami perkembangan yang lebih cepat, ketimbang desa. Akibatnya, kesenjangan keduanya semakin jauh dan menimbulkan gelombang urbanisasi. Meski kebijakan itu baru terlihat signifikan dampaknya bagi daerah di lingkungan Jawa.

Faisal mengatakan, negara-negara maju banyak memberikan insentif ke daerah perdesaan terutama untuk mendukung sektor pertanian. Misalnya menjamin harga hasil panen, subsidi pupuk, permodalan, bibit, ketersediaan lahan, dan lainnya. Sehingga, para petani merasa diperhatikan karena tingkat kesejahteraannya tidak jauh berbeda dengan bekerja di kota. Jika tidak menerapkan seperti itu, masyarakat bakal berduyun-duyun meninggalkan desa dan memilih mengadu nasib ke kota. "Bukan hanya tingkat upah yang besar, tetapi fasilitas juga lebih banyak di kota, itu kemudian menjadi penting insentif ini," katanya.

Ia menilai, saat ini Indonesia masih kurang dalam memberikan insentif di sektor pertanian. Padahal, adanya insentif dapat memacu semangat para petani untuk terus bercocok tanam. Sebab, saat ini petani di Indonesia masih didominasi oleh usia lanjut. Sedangkan generasi muda merasa enggan untuk terjun ke sektor tersebut. Mereka memilih mencari penghidupan di kota. "Kalau tidak ada insentif yang lebih besar, proses ini akan terus terjadi," katanya.

Bahkan dalam hal yang mendasar seperti sebaran kepemilikan lahan pertanian masih belum berjalan maksimal. Hal itu ditandai dengan banyaknya petani di Indonesia yang statusnya bukan sebagai pemilik lahan. Lahan hanya dikuasai oleh segelintir orang tertentu. Selama struktur kepemilikan lahan seperti ini perbaikan sektor pertanian untuk seluruh masyarakat masih terbilang sulit. Tetapi, melaksanakan kebijakan reforma agraria yang membagikan lahan dalam jumlah tertentu pun bisa jadi belum cukup menyelesaikan masalah. Jika langkah itu tidak diimbangi dengan meningkatkan kesadaran, pendidikan, dan dukungan lainnya kepada masyarakat. Kemungkinan lahan itu dijual untuk mengongkosi kehidupannya sehari-hari bisa saja terjadi. "Permasalahannya memang kompleks, jadi ada faktor budaya, pendidikan juga yang harus didorong," katanya.



Namun pemerintah mesti mementingkan pembangunan sektor pertanian. Terlebih sektor ini menjadi basis pembangunan ekonomi Indonesia dan kebutuhan masyarakat. Oleh karenanya, berbagai polemik seperti impor dan tidak impor, perselisihan data pangan antara Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pertanian harus dibenahi, karena menimbulkan dampak yang luas. Dampak itu menurut Faisal, meliputi masalah pembangunan desa, kesenjangan, bahkan angka urbanisasi. "Jadi satu hal yang mungkin tidak kepikiran tetapi punya dampak yang besar," terangnya.

Dengan kondisi demikian, pemerintah perlu berpikir komprehensif tidak hanya sebatas membagikan uang, meski dana desa memberikan banyak manfaat. Namun, dengan tingkat kompleksitas permasalahan seperti ini, pendekatan yang dibutuhkan tidak hanya sekadar itu. "Terutama bagaimana

keberpihakan pembangunan sektor pertanian, itu ada kaitannya dengan pembangunan desa," katanya.

### Mencari sumber ekonomi alternatif

Dalam meningkatkan ekonomi di masing-masing daerah, pemerintah sebenarnya telah menerapkan kebijakan otonomi daerah sejak 1999. Namun kebijakan itu menurut Faisal belum diikuti dengan kemandirian daerah. Selain itu, langkah untuk menyebarkan pusat-pusat pertumbuhan perekonomian seperti industri manufaktur ke daerah luar Jawa masih kurang. Akibatnya, daerah khususnya di luar Jawa yang memiliki kekayaan komoditas ekstraktif, hanya mengandalkan sumber tersebut. "Mereka tidak ada variasi sumber ekonomi, sekarang sudah mulai muncul pariwisata tetapi itu baru pada tahap awal, belum terbentuk," katanya.

Ia menyebutkan, ketergantungan pada komoditas ekstraktif sebetulnya rentan terhadap dinamika yang terjadi di tingkat global. Karena seringnya pemasaran komoditas itu banyak diekspor ke luar negeri. Saat harga komoditas di luar negeri turun, otomatis daerah yang bergantung pada komoditas itu akan ikut anjlok. "Artinya kondisi global sangat memengaruhi tingkat profitabilitas sektor ini," katanya.

Ia menyebutkan, Kalimantan Timur pada 2015 pertumbuhan ekonominya minus akibat harga batu bara dan minyak turun. Padahal, sebelumnya, pertumbuhan ekonomi di wilayah itu tinggi bahkan sempat mencapai 8 persen di atas rata-rata nasional. Kondisi itu berbeda dengan daerah Jawa yang tidak banyak terpengaruh oleh dinamika harga komoditas di tingkat global.

Selain itu, jika melihat dari indikator sebaran produk domestik bruto (GDP)

pada 1998, daerah Jawa angka terhadap ekonomi nasionalnya sebanyak 59 persen, sedangkan 41 persen dimiliki daerah luar Jawa. Setelah sekira 20 tahun kemudian, pada 2018 angka itu tidak mengalami perubahan berarti. Sebaran kontribusi di Jawa hanya sebanyak 58 persen dan sisanya diperoleh daerah luar Jawa. Padahal, pada rentang waktu tersebut pemerintah telah menerapkan otonomi daerah. "Berarti upaya untuk menyebarkan pertumbuhan keluar Jawa itu masih belum, dan hampir jalan di tempat," katanya. Meski ada pula daerah tertentu di luar Jawa mengalami kenaikan, tetapi kondisi terbalik di daerah lainnya. Dengan demikian, proporsi pertumbuhan ekonomi daerah luar Jawa dengan Jawa tidak banyak berubah.

Kondisi seperti ini perlu direspons pemerintah pusat dengan mendampingi daerah, terutama yang banyak mengandalkan komoditas ekstraktif yang tidak dapat diperbarui, seperti tambang. Ia mencontohkan, daerah Bangka yang mengandalkan sektor tambang. Namun, setelah tambangnya habis perekonomian di daerah itu ikut berhenti. "Belitung tertolong karena ada pariwisata," katanya.

Ia menekankan sektor alternatif perlu dicari, misalnya mengembangkan sektor pariwisata. Terlebih Indonesia memiliki modal kekayaan alam yang khas antara satu daerah dengan tempat lainnya. Dirinya mengapresiasi langkah pemerintah yang menempatkan pariwisata sebagai bidang yang saat ini diprioritaskan. Langkah itu perlu terus didorong, agar tidak hanya daerah tertentu saja yang mengalami perbaikan. "Sekarang masih beberapa daerah saja yang sudah tumbuh lebih baik, jadi belum cukup merata," katanya.

Selain pariwisata, pembangunan manufaktur perlu terus didorong keluar Jawa. Meski ia menyadari langkah itu tidak mudah, karena investor kurang tertarik membangun manufaktur di lokasi tersebut. Keterbatasan infrastruktur, ketersediaan tenaga kerja terampil yang masih terbatas dibanding

Jawa, menjadi alasan kuat keengganan itu. "Makanya insentif yang diberikan untuk di luar Jawa harus lebih besar, karena kalau tidak lebih besar investor *nggak mau*," terangnya.

Ia menyebutkan, sejak otonomi daerah diberlakukan daerah-daerah mulai mencari sumber pendanaannya sendiri. Banyak daerah yang mengorbankan kekayaan alamnya, dengan merusak hutan untuk membuka perkebunan sawit, atau dijual kayunya. Kondisi ini terjadi akibat tidak adanya pengetahuan yang memadai dalam mengembangkan sektor di luar komoditas tersebut. Selain itu, sistem masa jabatan kepala daerah juga memengaruhi kebijakannya yang lebih mengedepankan capaian jangka pendek ketimbang jangka panjang.

Guna mengkaji potensi daerah dalam memunculkan sumber ekonomi yang beragam, CORE Indonesia bakal melakukan kajian di salah satu daerah di luar Jawa yang tingkat ketergantungan sektor ekstraktifnya tinggi. Faisal memperkirakan, kajian itu akan dimulai pada September 2019, dengan waktu pengerjaan dua tahun. Rentang waktu itu terbagi dua termin, satu tahun pertama difokuskan pada kajian, sedangkan di tahun kedua diarahkan pada pendampingan daerah untuk mendesain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dalam mendorong potensi non ekstraktif sebagai sumber ekonomi baru. Selain itu, sosialisasi dalam skala lokal maupun nasional juga dilakukan pada tahun kedua dengan melibatkan berbagai pihak. "Di pusat memberikan pendampingan yang dibutuhkan, di daerah mereka *aware* (sadar)," katanya.

Hasil kajian ini bakal menjadi rekomendasi bagi pihak terkait termasuk kementerian. Faisal menjelaskan, yang membedakan CORE Indonesia dengan lembaga penelitian lainnya adalah, pengerjaan kajian yang tidak sekadar mengacu pada kerangka acuan kerja (TOR), tetapi dimungkinkan kajian itu diteruskan sampai menghasilkan kebijakan.

■ MUJAEINI

## Es Himalaya Mencair Drastis

Fenomena pemanasan global telah memberikan dampak yang signifikan pada perubahan iklim dan cuaca. Berbagai peristiwa, seperti cuaca yang tidak menentu, dan maraknya kebakaran hutan, disinyalir terjadi akibat dari pemanasan tersebut. Berbagai kajian dilakukan untuk mengetahui dampaknya secara luas, agar mendorong perhatian sekaligus kesadaran umat manusia terkait pentingnya menjaga ekosistem bumi.

Baru-baru ini sebuah penelitian dilakukan untuk mengukur dampak pemanasan global terhadap laju melelehnya gletser di Himalaya. Analisis ini dilakukan melalui pantauan satelit di wilayah India, Cina, Nepal, dan Bhutan selama 40 tahun. Penelitian itu menunjukkan gletser di Himalaya mengalami jumlah penurunan drastis sejak 2000. Saban tahunnya Himalaya kehilangan gletser setara setinggi 45 meter. Jumlah itu dua kali lipat dari pencairan yang terjadi di antara 1975 dan 2000.

"Ini gambaran yang paling jelas tentang seberapa cepat gletser Himalaya mencair dan apa faktor penyebabnya," kata penulis utama Jhosua Maurer dari Observatorium Bumi Lamon-Doherty, Universitas Columbia, Amerika Serikat. Penelitian ini telah dipublikasikan dalam *Journal Science Advances*, Mei 2019 dengan judul, *Acceleration of Ice Loss Across the Himalayas Over the Past 40 Years*.

Keberadaan gletser Himalaya, berfungsi sebagai penyangga ketersediaan air di beberapa tempat, baik untuk kepentingan ekologi, pertanian, atau sebagai penggerak pembangkit listrik tenaga air. Dengan arus pencairannya yang lebih cepat, sedikit banyak akan memengaruhi stabilitas ketersediaan air. Maurer mencatat, dampak lainnya adalah meluasnya risiko banjir di berbagai tempat, dengan ditandai naiknya permukaan air laut dan volume saluran air lainnya.

Studi ini menunjukkan, pencairan es konsisten dalam waktu dan ruang yang kenaikannya diakibatkan dari aktivitas peningkatan suhu bumi. Meski suhu wilayah bumi ini bervariasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Tetapi, dari 2000 hingga 2016, rata-rata kenaikannya 1 derajat Celcius. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan antara kurun waktu 1975 hingga 2000.

Maurer bersama timnya, menganalisis citra satelit berulang atas sekira 650 gletser yang terbentang sejauh 2 ribu kilometer dari barat ke timur di Himalaya. Mereka menciptakan sistem yang menjadikan kondisi gletser menjadi model tiga dimensi (3D). Dengan penerapan itu memudahkan peneliti untuk mengetahui perubahan ketinggian gletser dari waktu ke waktu. Gambar-gambar itu kemudian dibandingkan dengan menggunakan data optik pasca 2000 dari satelit yang lebih canggih, dengan kemampuan menampilkan perubahan ketinggian gletser yang lebih jelas.

Para peneliti menemukan, dari 1975 hingga 2000, gletser di seluruh wilayah kehilangan rata-rata 0,25 meter es setiap tahun akibat pemanasan global. Tren pemanasan yang lebih nyata, dimulai pada 1990-an, menyebabkan terjadinya percepatan sekira setengah meter per tahun. Kehilangan tahunan itu rata-rata setara 8 miliar ton air. "Jika perkiraan ini akurat, kehilangan massa tahunan yang diamati menunjukkan bahwa dari total massa es yang ada pada tahun 1975, sekira 87 persen tetap pada tahun 2000 dan 72 tetap di 2016," katanya.

Jika kondisi ini terus berlanjut secara tetap bahkan meningkat, maka akan membawa dampak buruk bagi kehidupan manusia. Dengan demikian, sudah semestinya umat manusia mementingkan fenomena pemanasan global sebagai isu yang mesti ditangani. Dikutip dari *liputan6.com*, salah satu langkah konkret dalam melakukan perubahan itu adalah dengan menerapkan pola hidup yang ramah terhadap lingkungan. Misalnya, menerapkan laku bijak dalam menggunakan saluran listrik, karena sebagian besar sumber tersebut berasal dari bahan bakar fosil. Masyarakat juga bisa melakukan penghijauan dengan melakukan penanaman pohon di ruang terbuka. Langkah itu tidak lain untuk menjaga udara tetap stabil, karena pemanasan global erat kaitannya dengan kadar karbon dioksida yang terlalu tinggi.

"Perubahan gletser selama beberapa dekade diperlukan untuk memahami pendorong perubahan iklim dan menilai dampak yang dihasilkan, sehingga bisa melakukan beberapa tindakan yang tepat," kata Maurer.

■ MUJAENI

## Atasi Kanker dengan Diet Keto

Belum lama ini masyarakat Indonesia dikagetkan dengan kabar duka yang menimpa aktor Agung Hercules. Pria yang identik dengan tubuh kekarnya itu meninggal akibat kanker otak jenis glioblastoma. Kanker Jenis ini termasuk dalam tumor ganas stadium 4, di mana sebagian besar sel tumor akan terus bereproduksi dan membelah diri pada waktu tertentu.

Sebelumnya, beberapa tokoh Indonesia juga meninggal akibat mengidap kanker. Seperti Istri Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Ani Yudhoyono yang wafat karena kanker darah. Selain itu, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Sutopo Purwo Nugroho, yang juga meninggal akibat kanker paru-paru. Beberapa nama terkenal lainnya juga mangkat, akibat serangan kanker.

Kanker memang masih menjadi jenis penyakit yang tidak mudah untuk disembuhkan. Namun, sebuah penelitian menyebutkan, kanker terutama otak seperti yang dididap Agung Hercules dapat ditangani dengan terapi radiasi dan diet ketogenik. Diet ini menerapkan pola makan tinggi lemak, tetapi rendah karbohidrat dan protein. Dengan menerapkan diet ketogenik tubuh dipaksa untuk mengonsumsi lemak daripada gula. Cara ini telah digunakan sejak 1920-an untuk mengobati epilepsi.

Diet ketogenik menuntut tubuh untuk berada dalam keadaan ketosis. Kondisi ini terjadi ketika tubuh tidak mempunyai cukup karbohidrat dari makanan untuk memberi energi pada sel-sel. Guna mengatasi kekurangan asupan ke sel-sel, tubuh menggunakan lemak untuk menyediakan kebutuhan energi. Jika dalam kondisi tubuh normal konsumsi lemak sekira 20 persen hingga 30 persen, diet keto menganjurkan asupan itu mencapai 60 hingga 70 persen.

Dengan menurunkan kadar glukosa dalam darah diyakini dapat melemahkan sel-sel kanker. Sebab, sel-sel ini mengandalkan glukosa sebagai bahan utama untuk berkembang dan menyebar. Dengan begitu, perkembangan sel kanker dapat dibatasi bahkan dihilangkan.

Peneliti melakukan uji coba dengan memanfaatkan beberapa tikus yang terlebih dahulu ditanamkan sel tumor. Beberapa tikus tersebut kemudian mendapat perlakuan yang berbeda, yaitu antara diet keto yang dikombinasi penanganan radiasi dengan diet biasa. "Kami menggunakan model tikus dengan memasukkan *bioluminescent intrakranial glioma ganas*," kata ketua tim riset Adrienne C Schek dari Barrow Neurological Institute di Rumah Sakit dan Pusat Medis St. Joseph di Phoenix, Arizona, Amerika Serikat. Penelitian ini telah dipublikasikan dalam *Journal PLoS ONE*, Mei 2012, dengan Judul *The Ketogenic Diet is an Effective Adjuvant to Radiation Therapy for the Treatment of Malignant Glioma*.

Scheck mengatakan, dengan perlakuan yang berbeda itu dapat menunjukkan hasil dari penerapan diet keto. Menurut Scheck, dengan menerapkan diet keto yang dikombinasi perawatan radiasi terbukti dapat memperpanjang kelangsungan hidup tikus dengan kondisi tumor otak. "Satu tikus dengan penanganan diet keto ternyata sudah sembuh dari tumornya sebagaimana dibuktikan dengan hilangnya sinyal *bioluminescent*," kata Scheck.

Tentu penelitian ini menjadi kabar baik bagi pengidap kanker. Namun, bagi para pasien kanker yang tertarik menerapkan diet keto, sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Hal ini penting untuk mendapat penanganan tepat sesuai dengan kondisi masing-masing pasien.

■ MUJAENI

## PEMERINTAH DESA: WARISAN KOLONIAL YANG INKONSTITUSIONAL

Pembangunan Indonesia melalui pinggiran menjadi narasi yang kerap digaungkan pemerintah. Konsep ini salah satunya dengan memosisikan daerah pinggiran termasuk desa sebagai bagian penting yang mesti diperhatikan. Satu dari sekian program, dilakukan pemerintah seperti dengan mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke desa-desa atau yang dikenal dana desa. Melalui kebijakan ini pemerintah optimis dapat memajukan desa yang selama ini masih jauh dari kata sejahtera.

Dana desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan desa, pada perjalanannya kerap dijadikan ladang basah tindakan korupsi. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, sejak bergulir pada 2015 hingga semester I 2018, kasus korupsi dana desa dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Selama rentang waktu itu ada 181 kasus korupsi dana desa yang merugikan negara sebesar Rp 40,6 miliar (*kompas.com*). Realitas itu mengharuskan pemerintah lebih waspada dalam menjalankan kebijakan dana desa.

Salah satu penyebab maraknya kasus korupsi dana desa adalah sumber daya manusia pemerintahan desa yang dinilai kurang kompeten. Kondisi ini akibat model sistem pemerintahan desa yang masih menganut warisan kolonial. Hanif Nurcholis menjelaskan, kepala desa diisi dengan cara pemilihan langsung dari warga yang pendidikannya terbilang rendah. Di sisi lain, rekrutmen perangkat desa tidak berdasarkan standar Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi disandarkan pada kualifikasi komunitas. Akibatnya mereka tidak mampu melaksanakan program birokratis dan tenokratis. Selain itu, selama ini pemerintah desa tidak menangani urusan-urusan pemerin-

tah yang jelas. Mereka tidak memiliki fungsi-fungsi pemerintahan, seperti urusan pelayanan publik yang mesti dilaksanakan. Pemerintah desa menjadi bingung ketika harus membuat program dengan uang yang sangat besar (hlm. 185-186).

### Membaca posisi desa

Di tengah upaya pemerintah membangun desa, Hanif melalui buku ini berusaha menghadirkan cara pandang lain ihwal pengelolaan desa. Hanif menaruh persoalan desa dari hal mendasar, yakni tata kelola dalam konstitusi pemerintahan. Ia menggali fakta sejarah bagaimana proses terbentuknya desa—ada juga yang menyebut nagari, gampong, marga, dan sejenisnya—serta perannya dalam kehidupan negara baik saat masa penjajahan maupun era kemerdekaan. Hal ini penting sebagai landasan bagaimana mestinya pemerintah memperlakukan desa.

Hanif menilai ada ketidakpahaman bagaimana pemangku kepentingan memaknai desa. Kondisi itu melahirkan regulasi terkait desa menjadi keliru karena menggunakan landasan yang kurang tepat. Salah satu kekeliruan itu adalah, banyak yang beranggapan bahwa desa sebagai republik kecil, satuan pemerintah terendah yang memiliki otonomi asli, desa memiliki kewenangan asli dan asal



### Pemerintah Desa, Nagari, Gampong, Marga, dan Sejenisnya

**Penulis** : Prof. Dr. Hanif Nurcholis MSi

**Penerbit** : Pusat Penerbit Universitas Terbuka

**Cetak** : 2019

**Tebal** : 350 hlm

**ISBN** : -

**Harga** : -

usul, serta desa sebagai persekutuan adat. Padahal, seharusnya desa dimaknai sebagai agen negara, organisasi negara, satuan pemerintahan, atau unit birokrasi negara dengan fungsi pelayanan publik untuk mencapai tujuan negara (hlm. 27). Pemaknaan ini penting, karena memengaruhi penempatan pemerintahan desa pada tata kelola pemerintahan negara.

Hanif berusaha membuktikan bahwa desa saat ini bukanlah sebuah entitas yang dibentuk sesuai kehendak masyarakat adat. Desa hari ini merupakan kelanjutan dari bentukan kolonial. Mereka mengubur tatanan asli desa yang sebenarnya, dan merombak strukturnya sedemikian rupa berdasarkan kepentingan pemerintah saat itu. Langkah pembedaan dapat ditinjau melalui terbitnya regulasi yang mengatur desa.

Hanif mencatat, perubahan model pemerintah desa sempat dilakukan saat Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUP-KI) menggelar sidang. Pada forum itu para pendiri bangsa mengusulkan berbagai konsep perubahan yang poinnya mengatur daerah Indonesia terbagi antara otonom besar dan kecil.

Namun Orde Baru yang menggeser Orde Lama, kembali menghidupkan model pemerintah desa masa kolonial. Di bawah kendali Soeharto, Orde Baru mengembalikan model itu dengan membekukan UU No. 18 Tahun 1965 dan mengundang UU No 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, dan UU No 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Meski Reformasi hadir meruntuhkan Orde Baru tetapi model pemerintahan desa tidak banyak mengalami perubahan. Pemerintahan desa yang dibentuk pada masa reformasi melalui UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, *juncto* UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, *juncto* UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, juga memiliki ruh, paradigma, konsepsi, dan strukturnya sama dengan pemerintahan masa kolonial dan serupa Orde Baru. Di mana pemerintah desa tidak hadir sebagai organ pemerintah, tetapi sebagai badan hu-

kum sosial-politik bentukan negara di bawah kontrol pejabat pemerintah. Fungsinya sebagai broker kepentingan pemerintah atasan dengan kebutuhan masyarakat desa. Tugas pokoknya bukan memberikan pelayanan publik tingkat dasar (pendidikan, kesehatan, serta pengembangan dan pemberdayaan ekonomi) kepada masyarakat desa, melainkan hanya melaksanakan perintah pejabat atasan sebagaimana model pemerintah desa zaman kolonial (hlm. 20).

### Perlu merestrukturisasi

Hanif banyak memberikan catatan kritis terhadap argumen hukum yang melahirkan sistem pemerintahan tidak langsung seperti yang diatur IGO tahun 1906 *juncto* IGOB 1938 *juncto* UU No 5 Tahun 1979 *juncto* UU No 22 Ta-



**“  
PERLUNYA DILAKUKAN  
PENELITIAN MENDALAM  
ATAS SEMUA DESA  
DI INDONESIA DAN  
MENGELOMPOKANNYA  
BERDASARKAN KONDISI  
MASING-MASING DESA**”

hun 1999 *juncto* UU No 32 Tahun 2004 *juncto* PP No 72 Tahun 2005 *juncto* No 6 Tahun 2014. Ia menegaskan aturan tersebut inkonstitusional karena bertentangan dengan UUD 1945 dan UUD NRI 1945 (hlm. 224). Hanif menyarankan, kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat agar merestrukturisasi pemerintahan desa sesuai dengan UUD 1945, UUD NRI 1945, dan TAP MPR No IV Tahun 2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Selain itu, lanjut Hanif, perlunya dilakukan penelitian mendalam atas semua desa di Indonesia dan mengelompokannya berdasarkan kondisi masing-masing desa (hlm. 227).

Hanif memberikan berbagai ilustrasi persoalan masyarakat yang tidak

mampu ditangani pemerintah desa karena tidak mendirikan unit pelayanan pemerintahan. Kondisi itu akibat sistem pemerintahan desa yang belum strategis karena masih diposisikan sebagai perantara kepentingan antara pemerintah pusat dan masyarakat desa. Pada bagian penutup dia juga menjelaskan bagaimana konsep para pendiri bangsa terkait pemerintahan desa mulai dari aturan, sampai struktur pemerintahan. Konsep tersebut dinilai mampu menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat desa.

Buku yang ditulis Hanif ini penting bagi siapa saja yang perhatian terhadap persoalan desa. Hanif berhasil menawarkan gagasan alternatif bagaimana mestinya Indonesia mengatur sebuah pemerintahan desa. Jika pembangunan hendak dimulai dari pinggiran, maka salah satunya dapat dilakukan dengan memperbaiki tata kelola pemerintahan desa. Dengan demikian, masyarakat desa dapat benar-benar merasakan kehadiran negara, karena mampu melayani segala kebutuhan dasar secara tanggung jawab.

Selama ini ikhtiar pemerintah dalam memajukan desa perlu diapresiasi, seperti adanya pengucuran dana desa dan sebagainya. Meski dalam penerapannya masih perlu pembenahan di berbagai lini. Namun, kiranya tidak ada salahnya jika kita kembali menggali fakta sejarah dan cita-cita para pendiri bangsa untuk menemukan formulasi yang tepat, dalam mengatur pemerintahan desa sebagai bagian dari alat negara dengan tujuan menyejahterakan masyarakat.

Meski menghadirkan diskursus baru terkait pemerintahan desa, buku ini memiliki beberapa celah terutama dalam hal kepenulisan. Beberapa bagian teks banyak ditemui salah ketik. Hal ini membuat pembaca merasa tidak nyaman saat menikmati setiap narasi yang dihadirkan. Meski secara keseluruhan hal itu tidak menghilangkan esensi dari muatan pesan penulis. Namun, alangkah lebih baik jika buku ini mengalami perbaikan di ranah penulisan. Dengan begitu, pesan yang disampaikan penulis kepada pembaca menjadi lebih maksimal.

■ MUJAENI



## THE CURSE OF LA LLORONA

**Sutradara:**

Michael Chaves

**Pemain:**

Linda Cardellini,

Patricia Velasquez,

Marisol Ramirez,

Sean Patrick Thomas,

**Produksi:**

Warner Bros Picture,

New Line Cinema

**Tayang:**

17 April 2019



## Cerita Rakyat yang Menegangkan

Rasa sakit hati dan kecewaan dapat membuat sebagian orang frustrasi dan melakukan sesuatu yang diluar nalar. Misalnya saja menyerang dan menghancurkan seseorang, merusak dan menyebabkan disorganisasi struktur kepribadian, serta mengakibatkan destruksi diri (bunuh diri) disebabkan timbulnya rasa putus asa. Gambaran dampak dari frustrasi tersebut dapat dilihat dari film horor *The Curse of La Llorona* karya Michael Chaves yang telah tayang pada 17 April 2019 lalu.

Michael Chaves mengangkat legenda masyarakat Meksiko, yang terjadi pada 1970an yaitu La Llorona yang artinya wanita menangis. Legenda masyarakat Meksiko tersebut berawal dari seorang wanita

cantik yang bernama Maria (Marisol Ramirez) yang menikah dengan peternak kaya dan tampan. Sebelumnya, kehidupan Maria dan kedua anaknya bahagia, namun Maria bunuh diri karena frustrasi yang disebabkan oleh suaminya berselingkuh. Tidak hanya bunuh diri tetapi dengan amarah cemburu Maria membunuh kedua anaknya dengan cara menenggelamkan mereka di sungai. Kematian Maria dengan cara bunuh diri dan menjadi hantu bergaun putih menjadi sebuah legenda di Meksiko dengan nama *The Curse of La Llorona*.

Rasa amarah dan penyesalan Maria yang telah membunuh anaknya membuat dia menjadi hantu bergaun putih dan mengincar anak-anak untuk menghapus rasa bersalahnya. Setelah kematian Carlos

(Oliver Alexander) dan Tomas (Aiden Ledowski) anak dari Patricia Alvarez (Patricia Velasquez), Chris dan Samantha merupakan target dari hantu bergaun putih ini. Chris (Roman Christou) dan Samantha (Jaynee-Lynne Kinchen) merupakan anak dari Anna Tate-Gracia (Linda Cardellini) yang berprofesi sebagai pekerja sosial. Berbagai teror La Llorona lakukan untuk membunuh kedua anak Anna tersebut. Seperti, La Llorona muncul pada saat Samantha berendam di bathtub, menarik Samantha dan menenggelamkannya di kolam renang, dan mendorong Chris dari atas tangga.

Untuk menyelamatkan anaknya dari teror jahat La Llorona, Anna meminta bantuan Pastor Perez (Tony Amendola). Namun, gereja tidak dapat membantu karena untuk memusnahkan La Llorona harus melewati proses keuskupan yang butuh waktu lama. Pastor Perez menyarankan Anna untuk me-

nemui cenayang, "Ada metode tak lazim, dahulu dia seorang pendeta. Gereja dan dia punya cara masing-masing. Makanya dia tinggalkan kerahnya bertahun-tahun lalu. Sekarang dia jadi cenayang, bekerja di batas agama dan ilmu pengetahuan. Dia seorang Curandero," kata Pastor Perez.

Film garapan Michael Chaves memiliki alur cerita yang mudah ditebak, karena jalan ceritanya sama dengan film horor-horor lainnya yaitu kekuatan gaib dapat dimusnahkan dengan kepercayaan dan benda-benda yang dianggap keramat, seperti dalam film ini kalung dan salib menjadi simbol kekuatan untuk menghancurkan La Llorona.

Walaupun, jalan cerita dalam film ini sudah terbaca, namun sutradara dalam film ini pintar memanfaatkan berbagai seting yang bisa membangunkan efek kejut dan rasa takut bagi penonton seperti

La Llorona di dalam mobil, area kolam renang, dan kamar mandi, serta gaun yang dikenakan La Llorona.

Selain kesan horor, Michael Chaves mengangkat film ini untuk mengingatkan kembali legenda La Llorona. Konon, anak-anak Meksiko yang tidak patuh kepada orangtua mereka maka La Llorona akan datang untuk menculik mereka.

Film *The Curse of La Llorona* telah tayang dibioskop-bioskop luar negeri, tetapi sayang di Indonesia tidak tayang. Tidak ada alasan jelas mengapa film *The Curse of La Llorona* tidak tayang di bioskop Indonesia. Mungkin saja, rumah produksi film tersebut melihat Indonesia bukan pasar yang potensial untuk peredaran film *The Curse of La Llorona*. Padahal, selain film action, komedi, drama, dan petualangan. Masyarakat Indonesia pun pencinta film horor.

FRISKA NATALIA

# Kegelisahan Marmo di Rumah Kiai Zainudin

Hari Taqwan Santoso\*

Mendengar pintu rumahnya diketuk disertai salam penuh rasa hormat, Kiai Zainudin segera menjawab salam itu dan menyuruh tamunya menunggu sebentar. Hari sedang gerah, di langit mendung menggantung. Barangkali sebentar lagi turun hujan. Sang kiai sedang tidak memakai baju karena hawa gerah ini dan ia menyuruh tamu tadi menunggu supaya dia bisa mengenakan baju dan memberikan sambutan yang layak.

Beberapa saat kemudian pintu dibuka dan Kiai Zainudin melihat kepala berpeci miring. Satu-satunya orang di desanya yang mengenakan peci dengan posisi miring sudah berdiri di depan pintu. Nama orang itu Marmo. "Kamu to Mo? Ayo masuk," ajak sang kiai.

Marmo masuk lalu mengikuti kiainya berjalan ke arah sofa-sofa di ruang tengah. Dia berhenti dan berdiri di samping salah satunya ketika sang kiai mulai duduk, tapi dirinya sendiri tidak berani ikut duduk sebelum dipersilakan. "Kenapa kamu malu-malu begitu, Mo? Seperti baru pertama kali masuk rumah ini. Duduklah."

Laki-laki dengan peci miring itu nyengir lalu menurut. Dia pun duduk. Perlahan dia meletakkan pantatnya di atas sofa yang empuk. Meski tidak mau terkesan kampung, tapi Marmo tidak bisa menyembunyikan kenyataan bahwa dia sangat menikmati duduknya itu. Jarang-jarang ada kesempatan untuk duduk di tempat duduk seempuk sofa Kiai Zainudin. Tempat duduk untuk ruang tamu rumah-rumah di desa Marmo terbuat dari kayu, sofa adalah barang mahal dan hanya dua orang yang memunainya sebagai perabot di ruang tamu mereka, yaitu Kiai Zainudin dan Pak Saniman si tengkulak gabah.

Marmo tidak segera mengutarakan maksud kedatangannya. Dia sudah terlalu banyak memberanikan diri sejak mengambil langkah pertama dari rumahnya menuju tem-



malangvoice.com

pat ini. Hatinya masih tegar sampai saat ketika dia melangkah ke pekarangan, dan akhirnya mengetuk daun pintu rumah Kiai Zainudin. Namun begitu masuk, tekad yang tadi dikumpulkannya mendadak surut. Nyalinya menyiu sampai hampir hilang. Wajah Marmo pun berubah kecut.

Sialnya, Kiai Zainudin dapat membaca gelagat itu dengan mudah. Kiai Zainudin segera tahu bahwa Marmo datang untuk mengadukan masalah tertentu. "Kenapa kamu malah bengong begitu Mo? Ada apa?" tanyanya sambil menebak-nebak alasan kekecutan Marmo dalam hati. Meski begitu, dia telah siap dengan masalah apa pun yang akan diutarakan lelaki berpeci miring itu.

Kiai Zainudin adalah satu-satunya orang yang dituakan di desanya. Dia adalah orang yang selalu dimintai pendapat kapan pun dan oleh siapa pun yang memunyai masalah. Orang-orang desa menganggapnya arif dan bijaksana. Bagi mereka, seorang kiai adalah sosok mumpuni, manusia yang kedalaman ilmu agamanya tidak perlu diragukan lagi, berpengalaman seluas samudera dan selesai dengan dirinya sendiri sehingga tidak akan memberikan keputusan yang menguntungkan diri sendiri melainkan mengutamakan kepentingan orang banyak. Mereka menganggap bahwa seorang kiai yang menjadi guru bagi orang-orang di suatu wilayah, mampu memecahkan berbagai masalah di wilayah itu, mulai dari masalah-masalah mistis, keluarga, sosial, ekonomi bahkan politik. Benar, politik.

Namun sejauh ini, masalah politik yang harus dipecahkan Kiai Zainudin memunyai cakupan yang sangat terbatas. Misalnya seperti ini: para calon kepala desa selalu mendatangi Kiai Zainudin untuk meminta restu dan doanya demi kemenangan mereka sebelum masa kampanye. Dengan restu dan doa itu, mereka menjadi lebih percaya diri dalam menghadapi pemilihan. Sebatas itu. Tak pernah ada satu calon kepala desa pun, yang dalam pikirannya ter-

pantik gagasan untuk melihat sosok Kiai Zainudin sebagai tokoh yang diikuti banyak orang, sehingga jika mereka bisa menjadikan tokoh itu sebagai sekutu mereka secara politis, maka mereka akan memenangkan pemilihan kepala desa itu dengan mudah. Tidak, mereka tidak pernah berpikir begitu. Bahkan seandainya mereka sempat berpikir sampai ke sana, mereka tidak akan melobi Kiai Zainudin, segan. Restu dan doa saja sudah cukup.

Terkadang, orang-orang di desa Marmo juga mempercayakan urusan kesehatan mereka pada Kiai Zainudin. Mereka bukan tidak percaya pada dokter dengan segala pengobatan modernnya, namun mereka yakin bahwa semua itu adalah sarana serta pada akhirnya Tuhanlah yang memberikan kesembuhan. Sementara dokter dan obat-obatan modern adalah sarana yang sangat mahal dan sulit dijangkau dari desa, Kiai Zainudin dengan doa-doanya adalah sarana yang jauh lebih murah. Jika pada akhirnya Tuhan pula yang menyembuhkan, bukankah doa orang saleh yang dekat dengan-Nya bisa menjadi sarana yang jauh lebih terjangkau dibandingkan dokter yang mahal itu? Begitulah cara orang-orang di desa Marmo berpikir.

"Mo!" Kiai Zainudin tidak sabar dengan Marmo yang belum juga mengutarakan maksud kedatangannya itu.

"Aduh! Maaf Kiai. Maaf. Ampun kalau saya lancang..." Tiba-tiba saja Marmo memohon-mohon.

"Wong iki piye to?" Maksudmu apa? Aku tidak paham. Coba kamu tenang dulu. Tarik nafas tiga kali. Istighfar. Baru cerita baik-baik."

Marmo menurut. Dia melakukan semua yang diperintahkan kiainya secara berurutan, baru setelah itu mulai berbicara lagi. "Maaf kalau saya terlalu lancang, Kiai. Maaf kalau saya kurang sopan santun."

"Iya, tapi ada apa?" Kiai Zainudin semakin tidak sabar.

"Ini Kiai..." kata Marmo sambil memasukkan tangan ke saku bajunya. Dia menarik selembar amplop putih bersih yang masih baru, lalu meletakkannya di atas meja. Dia diam selama beberapa saat, baru mulai bercerita. "Tempo hari orang utusan Gus Fahmi membagi-bagikan amplop seperti ini ke orang-orang desa, lalu menyatat nama dan nomer KTP orang-orang yang menerimanya. Kata si pesuruh, ini adalah 'sodaqoh' darinya sebagai salah satu caleg DPRD. Saya paham betul, bahwa pada masa-masa kampanye pileg seperti sekarang, amplop-amplop banyak disebar. Dan berdasarkan apa yang telah saya pelajari dari Kiai, bahwa menerima amplop seperti ini berdosa, maka saya sudah mantap untuk menolaknya, berapapun isinya. Tapi kalau kemudian yang

\*Orang ini bagaimana sih?

membagi-bagikannya adalah Gus Fahmi, saya menjadi tidak tahu harus bagaimana. Memang, kemudian ada beberapa orang yang berpikiran seperti saya, kebetulan mereka itu adalah kawan saya belajar agama di sini. Tapi kemudian Gus Fahmi meyakinkan mereka dengan berkata, 'Gus Fahmi, putra Kiai Zainudin, memperbolehkan disebarnya amplop-amplop

itu, karena itu kalian tidak perlu ragu.' Banyak yang kemudian setuju dan menerima amplop itu tanpa beban, tapi saya lain. Saya masih tidak sependapat. Saya ragu dan hati kecil masih menolak. Batin saya bimbang. Saya bingung, Kiai!"

Cerita Marmo seketika menampar muka Kiai Zainudin. Sekarang, ganti sang kiai yang terjatuh dalam perenungan tanpa kata. Dia terpukul oleh kenyataan bahwa apa yang dikhawatirkannya sejak beberapa lama, belakangan akhirnya mewujudkan menjadi masalah besar di depan mata. Gus Fahmi yang tidak lain adalah putra sulungnya memang sejak beberapa waktu yang lalu mulai terlibat kegiatan nolitik. Sebenarnya dia kurang setuju. Kiai Zainudin lebih

suka kalau anaknya itu melanjutkan tugas mulia, berupa mengajarkan ilmu agama pada orang-orang di desanya. Meski begitu, dia tidak kemudian melarang sang anak, sebab bagaimana pun dia betul-betul sadar bahwa seseorang tidak bisa berpikiran seratus persen sama dengan orang lain meskipun orang lain itu adalah anaknya sendiri. Lagipula si anak berhak menentukan di wilayah mana dia berkecimpung. Kiai Zainudin hanya berharap Gus Fahmi menjadi politisi yang baik jika ia memang hendak menempuh jalan hidup berpolitik. Kiai Zainudin pun tidak menghalangi ketika dia menyalonkan diri sebagai caleg dengan dukungan dari kawan-kawan partainya.

Sayang, Kiai Zainudin tidak pernah memantau kegiatan Gus Fahmi, apalagi sampai tahu isi kepala putra sulungnya itu. Sehingga dia tidak tahu bahwa menjelang pileg ini, dia sudah jauh berbeda dari ayahnya dalam memandang dan memperlakukan orang-orang desa. Jika Kiai Zainudin memandang orang-orang desa sebagai masyarakat yang harus dididik dan dibimbing dari sisi moral dan spiritual, maka Gus Fahmi memandang orang-orang di desanya sebagai lahan mendulang suara dengan biaya yang relatif murah.

Gus Fahmi menilai orang-orang di desanya sebagai masyarakat terbelakang, yang karena pola pikir mereka, sangat mudah dimanfaatkan dalam pileg ini. Hanya diberi amplop berisi uang lima puluh ribuan, orang-orang desa berbondong-bondong menyerahkan suara mereka. Jumlah suara orang-orang di desa tidak bisa diremehkan. Daftar orang yang mempunyai hak pilih di desanya saja mencapai dua ribu orang. Kalau dia bisa mengajak semua orang di empat

“  
DIA BETUL-BETUL SADAR  
BAHWA SESEORANG TIDAK BISA  
BERPIKIRAN SERATUS PERSEN  
SAMA DENGAN ORANG LAIN  
MESKIPUN ANAKNYA SENDIRI.  
LAGIPULA SI ANAK BERHAK  
MENENTUKAN DI WILAYAH MANA  
DIA BERKECIMPUNG.”

atau lima desa saja di dapilnya untuk menyerahkan suara mereka, jalan masuk ke kantor DPRD akan menjadi lapang mulus tanpa rintangan. Bagi orang desa, uang lima puluh ribu itu nilainya sangat banyak. Karena ketidaktahuan, mereka tidak merasa rugi menyerahkan suara mereka dengan imbalan lima puluh ribu. Orang-orang di desa Gus Fahmi tidak tahu jumlah gaji anggota DPRD berikut tunjangan-tunjingannya, jadi bagi mereka untung saja kalau suara mereka dihargai lima puluh ribu. Sementara bagi Gus Fahmi yang mendapat dukungan material secara penuh, jumlah itu tidak menjadi beban baginya. Dalam pileg nanti, jika dia tidak terpilih, yang rugi uang adalah kawan-kawan partainya dan bukan dia, sementara jika dia masuk dan menjadi anggota DPRD, dia juga yang akan mendapat untungnya.

Ruang tamu Kiai Zainudin sekarang dipenuhi keheningan, lama. Sang kiai telah disadarkan, dengan cara yang sangat tidak menyenangkan, lewat wajah polos Marmo yang kini sedang duduk di depannya, bahwa anaknya telah melangkah terlalu jauh. Laporan yang keluar dari mulut orang desa selugu Marmo ini diterimanya sebagai teguran dari Tuhan atas kelalaiannya dalam mendidik anak. Dia juga sadar, bahwa dirinya sekarang harus melakukan sesuatu. Dia harus mengembalikan anaknya dari jalan penuh tipu daya ke jalan yang benar, jalan yang diridhoi Tuhan. Meski dia masih merasa tidak perlu menarik Gus Fahmi dari bidang politik, tapi anaknya itu tidak boleh dimenangkan dengan keadaan yang sekarang.

“Mo,” kata Kiai Zainudin setelah mendapat gagasan. “Katakan pada orang-orang desa untuk tidak memilih anakku, karena terbukti bahwa menempuh pileg dengan cara yang tidak benar. Mereka berdosa kalau memilih anakku karena uang suapnya.”

“Saya siap, Kiai. Tapi bagaimana meyakinkan orang-orang? Uang lima puluh ribu itu banyak dan...”

Kiai Zainudin buru-buru memotong. “Mereka boleh mengambil uangnya, asal pasti mereka tidak memilih anakku. Itu saja.”

“Kiai... Bukankah Kiai sendiri yang mengajarkan, berdasarkan petikan dari hadis, bahwa orang yang memberi suap sekaligus orang yang menerimanya, akan masuk neraka?”

Sang kiai tersenyum simpul. Memang benar bahwa dia telah mengajarkan itu. “Marmo...”

“Saya, Kiai.”

“Apa kau ingat, hal lain yang kuajarkan padamu? Apa kau

ingat juga, bahwa menurut fikih, setiap perbuatan mempunyai rukun-rukun. Satu saja rukun itu tidak terpenuhi, maka perbuatan itu akan...?”

“Batal! Berikut semua akibatnya, termasuk pahala dan dosa.”

“Bagus. Nah, sekarang coba kamu sebutkan semua rukun suap-menyuap.”

“Itu gampang sekali, Kiai,” kata Marmo bangga seolah dia adalah murid Kiai Zainudin yang paling pintar. “Penyuap, orang yang disuap, uang atau barang yang digunakan untuk menyuap, akad atau perjanjian suap-menyuap itu, lalu permintaan atas diberikannya uang atau barang tadi.”

“Satu saja di antara rukun-rukun itu tidak dipenuhi atau tidak ada, maka suap-menyuapnya batal. Bukan begitu?”

“Betul Kiai.” Di sini Marmo masih belum paham akan maksud kiainya. Kata-kata kiainya benar menurut fikih, tapi bagaimana itu bisa menjadikan uang dalam amplop di depannya itu tidak mengandung dosa? Dia pun mengotak-atik kata-kata sang kiai dalam benaknya. Seandainya si penyuap tidak ada, maka tidak mungkin akan terjadi perbuatan yang disebut suap-menyuap, karena orang yang disuap tidak mungkin bertransaksi dengan dirinya sendiri. Hasil yang sama akan didapat ketika si penyuap ada, tapi orang yang disuap tidak ada. Kemudian, jika semuanya ada kecuali uang atau barang yang digunakan untuk menyuap, maka perbuatan itu tidak disebut suap-menyuap, tapi meminta tolong saja. Pada akhirnya, pikir Marmo, jika permintaan atas diberikannya uang atau barang suap itu tidak dipenuhi, maka perbuatan itu pun tidak bisa disebut sebagai suap-menyuap. Untuk yang ini, terkesan agak licik memang, tapi ini adalah akibat-akibat langsung yang diperoleh dari cara mengambil kesimpulan dalam fikih, jadi sah-sah saja.

Paham, Marmo pun mengulum senyum. Semuanya menjadi jelas sekarang.

Seperti bisa menerka isi hati laki-laki dengan peci miring itu, Kiai Zainudin menambahkan, “Lagipula, anakku mengatakan padamu kalau uang itu ‘sodaqoh,’ bukan? Kalau dia marah setelah pemilihan, biar aku yang mengurus.”

Mendung di langit masih menggelayut tapi mendung dalam kepala Marmo telah lenyap sama sekali. Dia pamit dan hujan deras turun ketika dia sudah tiba di rumah. Dengan turunnya hujan, hawa panas dan lembab di desanya berubah basah dan sejuk.

KOMIK BANG PEPE  
**SOBAT AMBYAR**



\*HARI TAQWAN SANTOSO, tinggal di Yogyakarta. Aktif sebagai volunteer Global Village untuk Habitat for Humanity Yogyakarta. Pernah menerbitkan novel The Jazab Boy (Diva Press, 2012), Mandaraka (RWTC, 2017) Antologi Puisi Teruntuk Mentari dan Rembulan (Bebook Publisher, 2016), Sajak-Sajak Rembulan Biru (WA Publisher, 2017). Penulis dapat dihubungi lewat wa : 08987766859 atau email : narasoma7@gmail.com.

## Pentingnya *Public Financial Management*

**L**ight Rail Transit (LRT) Palembang dan kereta bandara Jakarta sepi penumpang, menimbulkan kerugian operasional yang tidak sedikit. Lemahnya studi kelayakan, penentuan rute, dan kurangnya dukungan kelengkapan antarmoda disinyalasi menjadi penyebabnya. Dalam kasus lainnya, bahkan negara-negara PIGS; Portugal, Irlandia, Greece (Yunani) dan Spanyol bangkrut akibat krisis hutang Eropa 2009 karena terjebak *fixed cost* untuk program-program sosial.



railforthevalley.com

Memang karakteristik pemerintah adalah *cost center*, terutama Pemerintah Daerah yang mengelola wilayah serta penduduk. Dengan sumber daya terbatas, pemerintah berkewajiban memberikan layanan kepada masyarakat melalui program-program pembangunan. Sehingga pemerintah perlu memegang prinsip-prinsip *public financial management* (PFM) untuk melengkapi akuntabilitas dan transparansi keuangan yang telah dikenal sebelumnya, demi mewujudkan *good governance*.

PFM adalah sebuah sistem dimana sumber daya keuangan pemerintah direncanakan, dilaksanakan, serta dikendalikan untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien (CIPFA, 2010). Lawson (2015) menguraikan PFM berdasarkan siklus berikut ini; (1) penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan pemerintah (meliputi rencana jangka panjang dan menengah), (2) penyusunan anggaran, (3) persetujuan anggaran, (4) pelaksanaan anggaran, (5) pencatatan dan penyusunan laporan keuangan, dan (6) pemeriksaan oleh auditor eksternal. Siklus diatas sangat dipengaruhi oleh peran para aktor seperti; lembaga perwakilan rakyat, partai politik, akademisi, masyarakat sipil, audit internal, dan/atau pengelola keuangan negara/daerah.

Bank Dunia, IMF, dan Uni Eropa pada Tahun 2001

mengembangkan sebuah instrumen untuk mengukur kualitas PFM pemerintah (Pusat dan Daerah) menggunakan *Public Expenditure Financial Accountability* (PEFA). Meskipun terdapat perdebatan mengenai beberapa indikatornya dengan revisi terakhir pada Tahun 2016, tersusun 31 indikator dan 94 sub indikator yang menyangga tujuh pilar PEFA yang bersifat deskriptif dan berguna untuk mendiagnosa "kesehatan" pengelolaan keuangan pemerintah di setidaknya 150 negara.

Sementara tujuh pilar utama PEFA adalah; (1) Keandalan anggaran (*budget reliability*), (2) Transparansi keuangan negara/daerah, (3) Manajemen aset dan kewajiban, (4) Penganggaran dan strategi fiskal berdasarkan kebijakan pemerintah, (5) Prediktabilitas dan pengendalian pelaksanaan anggaran, (6) Akuntansi dan pelaporan, serta (7) Audit dan pengawasan eksternal. Ketujuh pilar PFM ini harus dikelola sebaik-baiknya untuk mewujudkan keuangan negara/daerah yang sehat dan mencapai sasaran.

Anggaran pemerintah daerah selama ini disinyalir kurang sejalan dengan rencana pembangunan (jangka pendek, menengah dan panjang) seperti hasil pemeriksaan kinerja tematik Renbangda BPK, sehingga program-program andalan kurang didukung oleh anggaran yang memadai. Di tengah minimnya sumber pendapatan asli daerah dan ketergantungan yang besar terhadap transfer dari Pemerintah Pusat, sering diberitakan anggaran acara seremonial di Daerah jauh lebih besar dibanding untuk mengatasi kemiskinan.

Untuk disiplin fiskal, pemerintah harus mampu menjaga keseimbangan antara pendapatan, belanja dan utang pemerintah. Jika defisit tak bisa dihindari, maka haruslah dirancang agar tak melebihi prosentase yang diijinkan peraturan perundangan. Selain itu, alokasi anggaran pemerintah haruslah diarahkan untuk membiayai program/

kegiatan prioritas sesuai perencanaan strategis, dengan tetap mempertimbangkan efisiensi dan keberlanjutannya (*sustainability*).

Harus dihindari tumpang-tindih, saling beririsan ataupun duplikasi anggaran berbagai instansi pemerintah untuk mencegah pemborosan sumber daya manusia dan keuangan. *Value for money*, sebuah prinsip bahwa setiap Rupiah haruslah memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat perlu diterapkan. Bahkan, pemerintah perlu mencari alternatif pembiayaan program, termasuk dengan menggandeng sektor swasta dalam rangka mewujudkan tujuan bersama. Salah satu contohnya adalah program Rumah Bahasa di Kota Surabaya yang para pengajarnya adalah ekspatriat yang rela tidak dibayar alias gratis.

Beberapa gejala mengindikasikan kelemahan keandalan penganggaran pemerintah (Sudjali, 2019), diantaranya adalah tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang menurut BKF meningkat dari Rp78,5 Trilyun (2011) menjadi Rp101,6 Trilyun (2015). Di masa lalu bahkan Pemerintah Daerah cenderung "memarkir" uangnya di BPD, sehingga minim pemanfaatan bagi pembangunan daerah. Demikian pula, kelemahan pengelolaan aset menyebabkan tertundanya berbagai Pemda mendapatkan opini WTP dari BPK. Terdapat banyak kasus dimana pemerintah kurang mengamankan aset tanah dan bangunan mereka, lemah dalam berkontrak dengan pihak ketiga, bahkan terjadi pembelian aset sendiri.

Berbagai faktor diluar PFM memang mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan pemerintah, seperti; kepemimpinan, kualitas SDM, maupun kondisi sosial dan politik. Apalagi di era swasta saat ini dimana proporsi *spending* pemerintah (yang tak selalu tepat sasaran) maksimal berkisar 15 persen dalam mendorong pencapaian indikator-indikator makro pembangunan. Banyak sekolah atau klinik/RS yang dikelola swasta (Muhammadiyah, NU, lembaga lainnya) yang turut mendukung pencapaian target pendidikan dan kesehatan masyarakat. Namun demikian, meskipun tidak mampu menunjukkan hubungan kausalitas, berbagai penelitian mengindikasikan bahwa PFM yang baik memiliki korelasi positif terhadap pencapaian tujuan pembangunan (dalam Sudjali, 2019).

Pertama, penelitian Frenc (2013) menunjukkan bahwa PFM mampu menekan timbulnya *fraud* atau korupsi

kecil, meskipun gagal mencegah kolusi antara para pejabat tinggi pemerintah. Kedua, Penelitian de Renzio (2009) dan Andrew (2010) menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara PFM yang baik dengan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, penelitian Rao (2013), Welham, Krause, dan Heger (2013) menemukan bahwa kualitas PFM yang buruk mengganggu kegiatan pelayanan publik, meskipun terdapat faktor-faktor eksternal lainnya, seperti hambatan kelembagaan, kerumitan birokrasi, ataupun motivasi ASN yang rendah, yang turut menentukan tinggi rendahnya kualitas layanan publik. Terakhir, penelitian Welham, Hart, Mustapha, dan Hadley (2017) menyimpulkan terdapat hubungan positif antara kualitas PFM dengan indikator kesehatan (angka kematian balita dan bayi di bawah satu tahun, serta angka harapan hidup).

Mengingat fakta-fakta diatas, paradigma *public financial management* harus diperkenalkan dan diterapkan pada pemerintah, terutama di Daerah untuk menghindari kelemahan-kelemahan pengelolaan anggaran selama ini. Prinsip-prinsip PFM haruslah ditekankan pada setiap proses; tahap perencanaan dan penganggaran, pengendalian program dan kegiatan, pelaporan dan pemeriksaan keuangan oleh auditor eksternal, serta evaluasi oleh lembaga perwakilan rakyat. Begitu banyak temuan BPK selama ini yang menunjukkan proyek-proyek pemerintah tidak bisa segera dimanfaatkan, bahkan sampai rusak, karena tidak adanya dukungan sarana dan prasarana pelengkap yang dibutuhkan.

Perlu dihindari hasil pembangunan tidak dimanfaatkan karena kurangnya perencanaan, tidak adanya/diterapkannya rencana tata ruang wilayah yang menyebabkan pembangunan dilakukan secara tambal-sulam, ataupun pemborosan keuangan negara/daerah karena fasilitas tidak termanfaatkan optimal seperti kasus-kasus di awal tulisan ini. Kasus termutakhir adalah mangkraknya ratusan bus Transjakarta senilai ratusan milyar rupiah akibat pengadaan di masa lalu yang tak sesuai aturan. Harus lebih ditekankan bahwa yang terpenting dari pembangunan adalah tercapainya tujuan (*outcome*), dan bukan sekedar terwujudnya *output*. Sehingga yang tercipta bukan hanya sekedar akuntabilitas keuangan, namun lebih dari itu adalah akuntabilitas kinerja, akuntabilitas program, dan bahkan akuntabilitas kebijakan.

Nico Andrianto

Bekerja di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  
Republik Indonesia



## Kebijakan Pertumbuhan Hijau Indonesia

Tahun 2019 ini, Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) menerbitkan laporan tentang Tinjauan Kebijakan Pertumbuhan Hijau Indonesia. Di dalam pengantar laporan dijelaskan bahwa tinjauan dilakukan dengan mempertimbangkan status sebagai negara berpenduduk keempat terbesar di dunia sekaligus sebagai negara kepulauan

terluas. Keberhasilan ekonomi yang dicapai dalam beberapa kurun waktu dikhawatirkan menimbulkan dampak kerusakan lingkungan hidup yang masif. Beberapa indikator menunjukkan gejala ini diantaranya: laju perubahan tata guna lahan yang masih besar, salah satu negara terbesar penghasil emisi gas rumah kaca (GRK) sekaligus bergantung kepada penggunaan *fossil fuel*.

Secara umum, OECD memberikan rekomendasi beberapa peluang dan hambatan bagi pengembangan isu pertumbuhan hijau di Indonesia. Beberapa hal yang menjadi peluang di antaranya: tingginya keanekaragaman hayati, modernisasi tata kelola guna lahan, potensi energi terbarukan yang besar dan masih belum tergarap dengan baik, integrasi target lingkungan rendah karbon dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional serta kemajuan penerapan kebijakan fiskal hijau melalui pengurangan subsidi *fossil fuel* serta mekanisme penandaan anggaran.

Untuk tantangan, beberapa yang dicoba disampaikan dalam tinjauan diantaranya: meningkatnya emisi GRK dan kerentanan terhadap dampak perubahan iklim, hutan dan lahan gambut yang kaya karbon secara perlahan mulai hilang, infrastruktur dan sumber daya pengelolaan limbah dan air tidak memadai, kapasitas kelembagaan dan koordinasi di level pemerintah masih lemah serta penerapan pajak lingkungan dan instrumen ekonomi lainnya belum maksimal.

### Strategi pembangunan rendah karbon

Momen peluncuran laporan OECD ini sekiranya menjadi menarik jika dikaitkan dengan peluncuran dokumen Strategi Pembangunan Rendah Karbon (PRK) oleh Bappenas beberapa periode sebelumnya. Kerangka strategi tersebut dibingkai



dalam laporan “*Low Carbon Development – A Paradigm Shift Towards a Green Economy in Indonesia*”. Secara umum laporan tersebut berupaya untuk menerjemahkan paradigma baru dalam menjalankan pembangunan ekonomi jangka panjang di Indonesia yang berlandaskan berbagai aktivitas rendah emisi dan ramah lingkungan. Output dari strategi tersebut adalah dihasilkannya peta jalan yang pasti menuju ekonomi

hijau lintas generasi. Di dalam laporan juga disebutkan bahwa eksploitasi sumber daya alam (SDA) yang masih berlangsung hingga saat ini, berbagai investasi beremisi tinggi sekaligus penggunaan energi dan sistem transportasi yang tidak efisien telah menimbulkan dampak kerusakan lingkungan yang relatif masif di Indonesia.

Bukti-bukti banyaknya kerusakan lingkungan yang belum tertangani, dapat dijumpai secara mudah. Investigasi *bbc.com* misalnya, mengingatkan betapa cepatnya laju penurunan permukaan tanah di Jakarta ataupun laporan beberapa lembaga internasional terkait kualitas udara di beberapa kota besar di Indonesia. Keseluruhan hal ini cukup menjadi fakta perlunya isu degradasi lingkungan ini mendapat perhatian yang lebih memadai. Terlebih ketika dikaitkan dengan besaran biaya yang harus dikeluarkan dalam mengembalikan fungsi lingkungan. Biaya mengatasi kebakaran hutan dan lahan saja, dalam hitungan Bank Dunia nilainya setara dengan 1,9% PDB nasional.

Dokumen laporan tersebut memberikan deskripsi yang jelas ketika pola pembangunan konvensional terus saja dilakukan, maka laju pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih cepat berada di titik batas daya dukung dan daya tampung (*carrying capacity*). Sementara laju pertumbuhan penduduk justru terus bertambah bagai deret ukur dan deret hitung. Pembangunan konvensional juga memberi membatasi potensi pertumbuhan ekonominya sendiri karena penggunaan sumber daya dan fungsi produksi dipercepat di periode saat ini. Ingat bahwa teori ekonomi klasik memberikan pelajaran di periode jangka panjang (*long run period*) perekonomian akan berada pada kondisi *full employment* dan *full capacity*.

Ketika ekonomi sudah mencapai titik daya dukung dan daya

tampung, satu-satunya cara untuk terus melanjutkan pertumbuhan melalui penciptaan kreasi dan inovasi teknologi. Daya dorong kreasi dan inovasi teknologi pun akan makin optimal ketika pola pembangunan sudah mengarah kepada penggunaan teknologi ramah lingkungan. Pada tahapan inilah manfaat penurunan laju destruksi SDA saat ini akan terasa seiring dengan semakin mahalnya harga input di periode mendatang.

Karenanya pemerintah memang sudah selangkahnya melakukan transformasi pola pembangunan ekonomi sedari dini, sekaligus memikirkan bagaimana bentuk ukuran keberhasilan pertumbuhan ekonomi yang kekinian. Hingga saat ini, ukuran keberhasilan pertumbuhan ekonomi masih didasarkan kepada hitungan Produk Domestik Bruto (PDB) semata, tanpa mempertimbangkan aspek kualitas hidup, kesejahteraan dan keberlanjutan lingkungan. Praktik penggunaan Indeks Kebahagiaan Nasional di Bhutan atau dimulainya *Well-Being Budget* oleh Pemerintah New Zealand, harusnya menjadi pengingat bahwa angin perubahan sudah mulai nyata.

Sebagai bagian dari komunitas global, sejak 2009 pemerintah sebetulnya sudah menyatakan komitmen atas penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) nasional sebesar 26% dengan pendanaan sendiri (APBN/APBD) dan 41% jika dibantu pendanaan internasional hingga tahun 2020. Komitmen tersebut kemudian diregulasikan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Penurunan Emisi GRK Nasional (RAN-GRK). Pasca ratifikasi Kesepakatan Paris tahun 2015, target direvisi menjadi 29% dan 41% di tahun 2030 dalam kerangka *Nationally Determined Contribution* (NDC).

Untuk permasalahan menjaga kehati, langkah pemerintah juga relatif dinamis. Beberapa prestasi positif telah diraih jika dikaitkan dengan upaya mengurangi potensi kehilangan kehati akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pemerintah baru saja memenangkan gugatan terhadap PT Waringin Argo Jaya (WAJ) yang dianggap bertanggung jawab atas kebakaran hutan atas lahan perseroan di wilayah Sumatera Selatan pada tahun 2015 silam. Sebagai ganti rugi atas biaya pemulihan lingkungan, PT WAJ diwajibkan membayar lebih dari Rp466 miliar, masih lebih kecil dibandingkan tuntutan Rp754 miliar. Dalam gugatannya, pemerintah yang diwakili Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggunakan pasal 88 dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Pasal 88 tersebut merupakan bentuk pasal *Strick Liability* yang berbunyi *Setiap orang yang tindakannya, usahanya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap*

*lingkungan hidup, bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan*. Meski ada beberapa pihak yang kemudian mencoba membawa Pasal 88 tersebut dalam uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK), namun tak sedikit yang mengapresiasi putusan tersebut. MA bahkan diyakini sudah mulai berjalan di arah kebenaran, meskipun sejujurnya nilai denda yang dikenakan masih jauh dari tingkat kerusakan lingkungan yang telah ditimbulkan. Putusan tersebut juga tercatat sebagai salah satu milestone dalam peradilan lingkungan di Indonesia, karena terlalu banyaknya bandit-bandit dan maling-maling perusak lingkungan yang masih bebas tak tersentuh hukum di Indonesia.

Dari keseluruhan strategi dan kebijakan tersebut, yang terpenting adalah ketika pemerintah berhasil memasukkannya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebagai piranti dalam menjalankan politik anggaran. Dengan demikian, aksi penurunan emisi menjadi bagian yang terintegrasi dengan pembangunan ekonomi dan sosial, bukan lagi sebuah kebijakan yang terpisahkan. Kebijakan penurunan laju deforestasi, pemanfaatan energi terbarukan, efisiensi energi, peningkatan produktivitas pertanian serta efisiensi pemanfaatan Sumber daya Alam (SDA) dan lingkungan pun akan semakin diintensifkan.

Pasca bergulir secara nasional, PRK juga wajib diterjemahkan ke dalam proses perencanaan penganggaran di daerah terlebih di era otonomi ini. PRK justru menjadi kebutuhan perencanaan pembangunan yang sangat *urgent* jika dikaitkan dengan kondisi daerah yang banyak menghadapi persoalan lingkungan khususnya di era otonomi daerah. Masih ditemukannya fenomena kutukan SDA di beberapa daerah, mengindikasikan adanya kebutuhan tersebut. Dengan mendasarkan kepada PRK maka daerah menjadi lebih mudah dalam menyusun sektor prioritas baru menuju visi pembangunan rendah karbon yang berkelanjutan dan inklusif.

Hal ini juga selaras dengan perkembangan pola pembangunan yang mulai meninggalkan paradigma ego-sentris menuju arah pembangunan eko-sentris. Jika dalam pola pembangunan ego-sentris, manusia diletakkan sebagai yang utama dengan prinsip mengeksploitasi lingkungan, eko-sentris justru menempatkan kepentingan ekologi sebagai yang utama. Dan peran negara sangatlah sentral dalam mewujudkan ide eko-sentris ini. Negara dengan segala pranata dan kelengkapannya sekiranya mampu dan memiliki kapasitas berlebih untuk menjadi pengawal terdepan kelangsungan ekologi demi keberlanjutan antar generasi. Jika tidak sekarang kapan lagi, jika bukan kita siapa lagi yang akan menjamin keberlanjutan lingkungan hidup.

Joko Tri Haryanto

Peneliti Badan Kebijakan Fiskal  
Kementerian Keuangan-RI



## Membenahi KEK

**P**rogres pengembangan dan pembangunan 12 kawasan ekonomi khusus (KEK) masih berjalan lambat, ini tercermin dari rendahnya serapan tenaga kerja serta realisasi investasi untuk proyek-proyek tersebut. Dari 12 KEK yang ada saat ini, belum ada satu pun yang bisa menjadi kisah sukses. Sebagai contoh, nasib KEK Sei Mangkei di Sumatera Utara yang masih membutuhkan koneksi kereta api untuk mengangkut produk *oleochemical* (produk yang dihasilkan dari lemak/minyak nabati maupun hewani) dan turunannya yang diproduksi. Hal ini dikarenakan lokasinya yang cukup jauh dari pelabuhan. Infrastruktur dasarnya belum memadai. Tidak heran, hingga kini belum ada lagi investor yang mau masuk ke sana.

Meski begitu, sebetulnya infrastruktur dasar saja tidak cukup untuk menarik perhatian investor ke KEK. Dibutuhkan aspek pendukung lain yang tidak kalah pentingnya yaitu, *soft infrastructure* berupa regulasi yang lebih longgar, kemudahan arus masuk keluar barang, dan birokrasi investasi pro bisnis. Ambil contoh, Shenzen di China yang sukses dengan KEK-nya. Dulu, Shenzen hanyalah sebuah desa nelayan di tepian Laut China Timur. Namun, sejak 1978, Kota Shenzen bermetamorfosis menjadi sebuah kota yang pesat, lantaran kemudahan regulasi di sisi fiskal, hingga kebijakan tenaga kerja.

Shenzen, beda dengan kita. Berdasarkan data Dewan KEK, dari 12 proyek KEK yang ditargetkan beroperasi pada 2019, baru 6 yang berhasil diresmikan. Padahal, tahun ini menjadi penentuan bagi pemerintah untuk memenuhi salah satu target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), yaitu mengoperasikan 12 KEK. Ada pun, realisasi investasi di 12 proyek tersebut baru Rp 17,7 triliun per November 2018 dari komitmen yang ditargetkan senilai Rp 104,54 triliun. Sementara itu, serapan tenaga kerjanya hanya 10.700 orang per November 2018 dari estimasi kebutuhan sebanyak 695.783 orang.

Sejauh ini baru enam KEK yang telah beroperasi, yaitu Sei Mangkei, Tanjung Lesung, Palu, Mandalika, Galang Batang, dan Arun Lhoksemawe. Data Dewan KEK juga mengungkapkan, KEK Bitung, Morotai, dan MBTK telah dikategorikan siap beroperasi dengan rencana peresmian dijadwalkan pada Februari 2018. Namun, hingga kini rencana tersebut belum terlaksana. Di sisi lain, KEK Tanjung Kelayang, Sorong dan Tanjung Api Api dikategorikan baru dalam tahap pembangunan.

Celakanya, kini ada 3 usulan KEK lagi dari badan usaha

yang dalam proses penetapan. Ketiga KEK tersebut a.l. KEK Pariwisata Sungailiat seluas 273 hektare yang diusulkan PT Pantai Timur Sungailiat, dan KEK Pariwisata Tanjung Gunung seluas 385 hektare yang diusulkan oleh PT Pan Semujur Makmur. Ada juga KEK Pariwisata Singasari seluas 107,6 hektare yang diusulkan oleh konsorsium badan usaha PT Pengembangan Pariwisata Indonesia/ITDC, PT Intelegensia Grahatama, serta PT Cakrawala Mandala Nusantara.

Oleh karenanya, pemerintah harus sigap dan tepat mengatasi persoalan ini. Beberapa *soft infrastructures* yang diperlukan bagi KEK di Indonesia harus segera diselesaikan. Pertama, perubahan PP No 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan KEK serta PP No 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan KEK. Perubahan PP itu harus memberikan kepastian jumlah dan jangka waktu pemberian fasilitas berdasarkan nilai investasi. Misalnya, investasi Rp 20 miliar mestinya sudah bisa mendapatkan *tax holiday* selama 5 tahun sebesar 50 persen. Diberikan pula masa transisi selama 2 tahun sebesar 25 persen. Kalau dulu investasi yang mendapat *tax holiday* itu minimal Rp 500 miliar. Sekarang investasi Rp 20 miliar harus sudah bisa dapat *tax holiday*.

Kedua, pembelian dan sewa tanah atau bangunan di KEK juga tidak dipungut PPh dan PPN. Harus ada pemotongan PPh orang pribadi pada KEK yang bergerak di bidang jasa seperti KEK bidang pendidikan dan kesehatan yang akan dikembangkan. KEK yang ada saat ini sebagian besar mengembangkan dua zonasi KEK yaitu KEK industri dan KEK pariwisata. Sehingga, diperlukan beberapa penyesuaian atas regulasi itu sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam pengembangan KEK.

Ketiga, diperlukan penyederhanaan proses, penyempurnaan perluasan jenis zona di dalam KEK sesuai dengan perkembangan, transisi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), pelaksanaan perizinan berusaha di KEK melalui *Online Single Submission* (OSS) dan penambahan Badan Layanan Umum (BLU) sebagai pengelola KEK.

Keempat, memperpendek durasi bongkar muat di pelabuhan (*dwelling time*), perpanjangan Hak Guna Bangunan di atas Hak Milik di dalam KEK yang bisa lebih dari 30 tahun, hingga masalah insentif fiskal. Intinya, dalam aturan yang baru harus ada insentif fiskal dan non-fiskal, seperti kemudahan layanan kepabeanan, layanan imigrasi, hingga penggunaan tenaga kerja asing.

■ MOH.ILHAM A.HAMUDY



# CALL FOR PAPERS

## JURNAL BINA PRAJA

MAY & NOVEMBER



### THEME

## “Home Affairs Governance”

### SUBTHEME

Regional Autonomy and Bureaucracy  
Politics and Public Administration  
Territorial Administration  
and Rural Governance  
Population and Civil Registration  
Regional Election and Regional Innovation  
Regional Fiscal Policy and Development  
Other Issues in Public Administration

Accredited Number  
21/E/KPT/2018 (Sinta 2)



### TERMS & CONDITIONS

Open to the public | Manuscripts may contain the results of empirical or nonempirical research | Manuscripts should address the theme and subthemes set by the Jurnal Bina Praja Editorial Team | Submitted manuscripts have not been published in other media | Manuscripts should have a minimum of 38000-40000 character in Indonesian or English (preferably in English) | For the writing systematics and format, see <http://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/jbp/index> | A minimum of 15 references taken from primary sources (scientific journals articles, dissertations, master's theses, undergraduate theses, and/or other research reports) | Attach biodata along with complete mailing address and contact number.

### INDEXED BY:



RESEARCH AND DEVELOPMENT AGENCY  
MINISTRY OF HOME AFFAIRS  
Jl. Kramat Raya 132, Jakarta Pusat  
0821 1139 3927 | redaksijbp@gmail.com